

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sejak berdirinya sudah diminati oleh masyarakat dari segala penjuru dunia, walaupun pondok pesantren ini banyak mengalami pasang surut dan perubahan baik dari segi bentuk, kurikulum, pengelolaan dan kepemimpinan, namun pondok pesantren sampai saat ini masih berperan dalam mencerdaskan bangsa dan selalu mengutamakan (*Tafaqquh fi al-din*) sepanjang perjalanannya. Pada dasarnya pondok pesantren banyak memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan dalam menyiapkan kader-kader muslim yang siap berdakwah di kalangan masyarakat. Keikhlasan jiwa yang memancar pada kader-kader ini sebagai ulama, *muballigh* atau guru agama yang kompeten dalam mengabdikan untuk membuka cakrawala umat Islam.

Pondok pesantren memiliki posisi yang sangat strategis karena banyak masyarakat memercayainya sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada era globalisasi ini. Salah satu contohnya adalah pondok pesantren yang terus mengembangkan lembaganya dengan membuka cabang-cabang di beberapa kabupaten, dan jumlah santri yang ribuan. Sehingga bisa dikatakan pesantren sebagai pendidikan yang memberikan solusi pada kebutuhan masyarakat dalam hal pengetahuan pendidikan agama, moral dan akhlak.

Sistem pendidikan pesantren memiliki ciri khas tersendiri dalam pembelajarannya, yang tidak dikenal luas dan beredar di ranah pendidikan umum. Masalah pembelajaran di pesantren ini diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3, dan 4 serta PP tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 tahun 2005 pasal 93, setelah adanya peraturan tersebut pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas dalam pembelajarannya, dan memiliki hak yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam masalah fasilitas ketika pesantren mengikuti perubahan-perubahan atau regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan ketetapan undang-undang tersebut, kualitas lulusan pesantren mulai mendapat pengakuan dari masyarakat maupun lembaga pendidikan luar negeri.

Sistem pendidikan pondok pesantren banyak mengalami perubahan seiring mengikuti perkembangan zaman yang begitu kompleks. Jumlah pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren baik kurikulum maupun dalam pembelajarannya yang masih menggunakan kitab-kitab klasik dan penyampaiannya menggunakan metode *bandongan*, *sorogan* dan *wetonan* ini masih dipertahankan sampai saat ini. Namun banyak pesantren yang sudah mengadopsi sistem pendidikan pemerintah dengan menggunakan sistem pendidikan formal yang menggunakan kurikulum pemerintah jenjang pendidikan terdiri dari MI, MTs, MA atau menyelenggarakan SD, SMP dan SMA/SMK bahkan pondok pesantren mendirikan Perguruan Tinggi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 bahwa pendidikan di pondok pesantren terbagi kepada beberapa program pendidikan Antara lain:

1. Pendidikan diniyah formal,
2. Pendidikan diniyah nonformal,
3. Pendidikan umum,
4. Pendidikan umum berciri khas Islam,
5. Pendidikan kejuruan,
6. Pendidikan kesetaraan,
7. Pendidikan mu'adalah,
8. Pendidikan tinggi.¹

Di Kalimantan Tengah, berdasarkan data statistik pada situs Pangkalan Data Pondok Pesantren oleh Kementerian Agama, telah berdiri 76 pondok pesantren dengan rincian berikut.

**Tabel 1. Data Statistik
Pondok Pesantren di Kalimantan Tengah**

No	Kabupaten	Jumlah Pesantren	Tipe Pesantren		Jumlah Santri	
			Satuan Pendidikan	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	Mukim	Tidak Mukim
1	Kotawaringin Barat	11	3	8	1145	337
2	Kotawaringin Timur	22	5	17	4032	1513
3	Kapuas	11	1	10	1274	1758

¹Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, pasal 19

4	Barito Selatan	1	0	1	99	67
5	Barito Utara	3	1	2	303	95
6	Katingan	5	3	2	662	491
7	Seruyan	2	0	2	153	49
8	Sukamara	2	2	0	165	92
9	Lamandau	1	1	0	11	32
10	Pulang Pisau	6	0	6	681	677
11	Murung Raya	3	0	3	373	1
12	Barito Timur	1	0	1	141	123
13	Kota Palangka Raya	8	1	7	487	1081

Sumber Data: Website kemenag.go.id Pangkalan Data Pondok Pesantren

Dari tabel di atas, kabupaten Kotawaringin Timur memiliki jumlah lembaga pondok pesantren terbanyak di antara kabupaten lain di Kalimantan Tengah, yaitu berjumlah 22 pondok pesantren. Dari 22 pondok pesantren tersebut ada 17 pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dan ada 5 pesantren yang telah terdaftar di Dirjen Pendidikan Islam sebagai satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*. Pada jenjang *ula* setingkat SD/MI diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Aitam dan Pondok Pesantren Nurul Jannah dan pada jenjang *wustha* diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, Pondok Pesantren Ibrohimiyyah dan Pondok Pesantren Darul Aitam.

Pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren *Salafiyah* merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan

pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren *Salafiyah* (PPS) sebagai satuan pendidikan nonformal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren *Salafiyah* tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

Meskipun termasuk dalam kategori satuan pendidikan nonformal, kedudukan pondok pesantren *salafiyah* yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, tertuang dalam pasal 23 berikut:

(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian. (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.²

Ujian yang dimaksud dalam Pasal 23 di atas adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sehingga dengan adanya UU RI nomor 19 tahun 2019 ini seharusnya pesantren bisa mengeluarkan *syahadah*/Ijazah secara mandiri dan *syahadah*/Ijazah tersebut mendapat pengakuan di jenjang pendidikan formal lainnya atau digunakan untuk memperoleh kesempatan bekerja, namun karena tidak adanya petunjuk teknis yang jelas dalam pelaksanaan UU RI nomor 19 tahun 2019

²Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 23

sehingga hal tersebut belum bisa menjadi acuan dalam penyelenggaraan pondok pesantren *salafiyah*.

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* (PK-PPS) diatur lebih rinci dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1772 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren *Salafiyah* dan nomor 3543 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren *Salafiyah*. Dalam SK tersebut PK-PPS terbagi kepada 3 jenjang yaitu *ula* setingkat SD/MI, *wustha* setingkat SMP/MTs, dan *ulya* setingkat SMA/MA/SMK. Kemudian dijelaskan pula mengenai kurikulum yang diatur secara khusus untuk satuan pendidikan kesetaraan.

Kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga pendidikan termasuk pendidikan pesantren dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan pondok pesantren yaitu untuk membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.³ SK Dirjen nomor 1772 merincikan kurikulum yang harus diterapkan oleh PK-PPS sebagai berikut.⁴

1. Kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* adalah kurikulum khas yang telah berlaku di pondok pesantren yang bersangkutan dan beberapa mata pelajaran umum sesuai dengan standar isi masing-masing jenjang.

³Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 7

⁴Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 tahun 2018

2. Kurikulum tersebut menjadi satu kesatuan kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah*.
3. Mata pelajaran umum yang wajib diajarkan pada tingkat *Ula* paling sedikit:
 - a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, b) Matematika, c) Bahasa Indonesia, d) Ilmu Pengetahuan Alam, dan e) Ilmu Pengetahuan Sosial.
4. Mata pelajaran umum yang wajib diajarkan pada tingkat *Wustha* paling sedikit:
 - a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, b) Matematika, c) Bahasa Indonesia, d) Bahasa Inggris, e) Ilmu Pengetahuan Alam, dan f) Ilmu Pengetahuan Sosial.
5. Mata pelajaran umum wajib diajarkan pada tingkat *Ulya* paling sedikit:
 - a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, b) Matematika, c) Bahasa Indonesia, d) Bahasa Inggris, e) Sejarah Indonesia, dan f) Mata pelajaran sesuai dengan peminatan yang diberlakukan oleh satuan pendidikan.
6. Kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* dikembangkan oleh penyelenggara dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan, penulis mendapati hampir semua pondok pesantren yang berstatus pendidikan kesetaraan pondok pesantren *Salafiyah* di Kotawaringin Timur belum sepenuhnya menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang disebutkan dalam SK Dirjen nomor 1772 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren

Salafiyah. Observasi penulis ini dibenarkan oleh staf bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur.

Pembahasan mengenai kurikulum PK-PPS tentu perlu dijadikan bahan kajian untuk Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang menjunjung visi menjadi universitas Islam negeri terdepan, unggul, terpercaya dan berkarakter, serta mengambil peran sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan riset ilmu-ilmu pengetahuan khususnya di Kalimantan Tengah.

Keterlibatan IAIN Palangka Raya dalam mengkaji mengenai penerapan kurikulum PK-PPS diharapkan dapat merumuskan gagasan dan ide terhadap permasalahan pendidikan yang ditemui di lapangan sehingga mampu meningkatkan kualitas peserta didik dan lulusan pondok pesantren yang diakui setara dengan pendidikan formal, mengingat pendidikan Pondok Pesantren sangat berpengaruh pada pengembangan Islam moderat.

Berdasarkan fakta di atas, penulis berasumsi tidak terlaksananya suatu program secara komperhensif dikarenakan ada suatu kendala yang dialami, baik itu berasal dari faktor intern pondok pesantren ataupun faktor ekstern. Pada umumnya kendala-kendala yang muncul terkait penerapan kurikulum kesetaraan pada mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* antara lain:

1. Penyesuaian alokasi waktu untuk materi pesantren dan mata pelajaran umum,
2. Perbedaan dalam pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum,
3. Kondisi latar belakang pendidikan tenaga pendidik sekaligus penyusun kurikulum terhadap pemahaman tentang kurikulum dan rencana pembelajaran,
4. Perbedaan muatan isi antara pondok pesantren dan pendidikan formal,

5. Penyesuaian kalender pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengadakan penelitian mengenai problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur. Sehingga dari problem yang dijumpai dapat dirumuskan solusi untuk perbaikan penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*. Agar penelitian ini lebih tajam dan mendalam maka penulis akan fokus kepada tiga pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman dan Pondok Pesantren Darul Aitam. Penelitian ini penulis tuangkan dalam judul "PROBLEM PENERAPAN KURIKULUM MATA PELAJARAN UMUM PADA PENDIDIKAN KESETARAAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SE-KOTAWARINGIN TIMUR".

B. Rumusan Masalah

Pada Penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur?
2. Apa saja problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur?
3. Bagaimana solusi dari penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur
2. Mendeskripsikan dan menganalisis problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur
3. Mendeskripsikan tentang solusi dari problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang problem dan solusi penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur.

2. Bagi Pondok Pesantren yang Diteliti

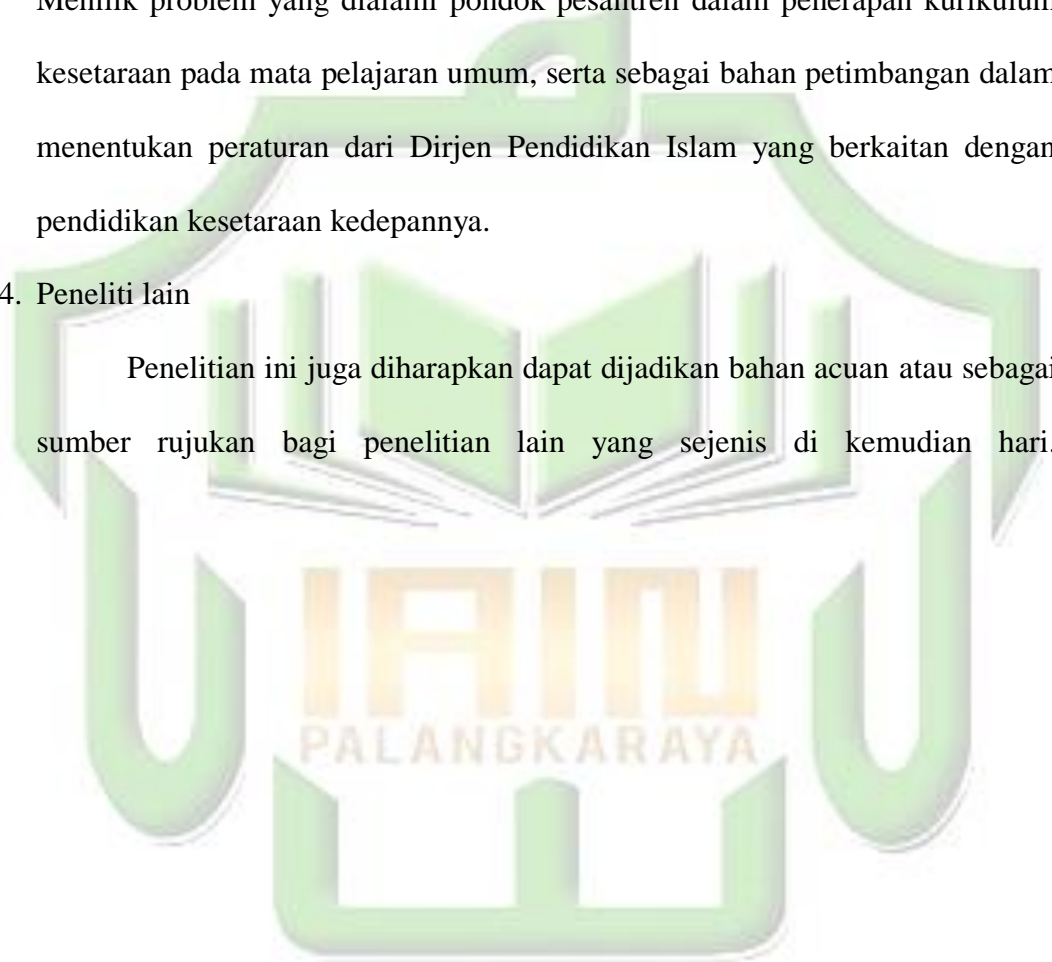
Bagi pondok pesantren, Penelitian ini sebagai bahan masukan dalam kelanjutan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren.

3. Bagi Kementerian Agama

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan bahan kajian Kementerian Agama dalam mengevaluasi penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1772 tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*. Menilik problem yang dialami pondok pesantren dalam penerapan kurikulum kesetaraan pada mata pelajaran umum, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan peraturan dari Dirjen Pendidikan Islam yang berkaitan dengan pendidikan kesetaraan kedepannya.

4. Peneliti lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau sebagai sumber rujukan bagi penelitian lain yang sejenis di kemudian hari.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Problem Penerapan

Problem memiliki arti masalah atau persoalan.¹ Di dalam kamus filsafat dan psikologi karangan Sudarsono dijelaskan bahwa problem adalah masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan masalah.² Sedangkan masalah adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi rugi, atau sulit dalam melakukan sesuatu.³ Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa problem atau masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya (harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, dan yang sejenis lainnya.

Sedangkan penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan (rancangan).⁴ Sehingga penerapan dapat diartikan sebagai cara untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dari definisi ini dapat penulis simpulkan problem penerapan adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Dalam sistem pendidikan pasti ada problem yang perlu diantisipasi dan dicari solusi penyelesaiannya. Problem pendidikan akan mengganggu

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/problem>
Diakses pada 27 Juli 2020

²Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h. 207

³*Ibid.*, h. 148

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/penerapan>
Diakses pada 27 Juli 2020

keberhasilan pembelajaran jika tidak ditemukan alternatif pemecahannya. Ada beberapa kemungkinan problem yang terjadi antara lain:

a. Problem yang berkaitan dengan peserta didik

Peserta didik merupakan pokok persoalan dalam semua kegiatan pendidikan dan pengajaran. Peserta didik memiliki kedudukan penting dalam sebuah proses pembelajaran karena guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Faktor intern peserta didik mencakup intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan. Masing-masing peserta didik memiliki problematikanya sehingga guru dituntut mengenal sifat dan karakteristik anak didik serta memiliki kecakapan dalam membimbing.

b. Problem yang berkaitan dengan pendidik

Pendidik dalam proses pembelajaran merupakan subjek utama. Karena di tangan pendidiklah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran. Problem yang berkaitan dengan pendidik antara lain:

1) Problem penguasaan guru terhadap materi

Pengetahuan dan kemampuan seorang guru dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh sebelumnya, sehingga apa saja yang diberikan kepada peserta didiknya betul-betul sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sebagai guru hendaklah menguasai bahan atau materi yang diajarkan serta mengembangkannya, dalam arti meningkatkan

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai peserta didik.⁵

2) Problem penguasaan guru terhadap pengelolaan kelas

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang wajib dimiliki bagi guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dengan kata lain merupakan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan kondisi yang optimal dalam proses belajar. Dalam peranannya sebagai pengelola belajar atau *learning manager* hendaknya guru mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan belajar serta suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasikan.⁶

3) Problem politis birokrasi

Lambatnya kualitas pembelajaran bisa disebabkan oleh adanya problem dari aspek politis birokrasi yaitu sistem yang disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah. Di mana kebijakan ini berada di luar kemampuan guru.⁷ Guru harus menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut meskipun secara teori pembelajaran kadang kala belum tentu sesuai.

Misalnya Ujian Nasional (UN) merupakan realitas kebijakan politik birokrasi. Secara teoritik UN merupakan sistem yang mengharuskan guru melaksanakan pembelajaran secara monoton dalam artian mengejar target materi yang diujikan dalam UN. Sistem ini akan

⁵Uzar Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, h. 9

⁶*Ibid.*, 10

⁷Saekan Muchith, dkk, *Cooperative Learning*, Semarang: Rasail Media Group, 2010), h. 125

melahirkan pembelajaran guru hanya mengejar target dan melaksanakan metode secara klasikal.

c. Problem yang berkaitan dengan metode

Bertitik tolak pada pengertian metode, yaitu suatu cara penyampaian bahan ajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka fungsi metode mengajar tidak dapat diabaikan karena metode tersebut turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam sistem pengajaran.⁸ Problem metode adalah adanya pemahaman atau cara pandang guru terhadap cara atau metode mengajar. Guru yang memiliki problem metode kerap tidak ingin dan malas menggunakan metode lain selain yang dilakukan selama ini.⁹

Menurut pendapat guru yang memiliki problem metode, bahwa menggunakan metode baru dianggap tidak efisien dari segi waktu dan pemborosan dari segi tenaga dan biaya. Oleh sebab itu metode baru merupakan sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan. Untuk menghindari adanya problem metode di atas pendidik atau guru harus bisa memvariasikan metode agar peserta didik tidak bosan dan terus bersemangat dalam proses pembelajaran.

⁸Ahmad Rohani dan Abu Ahmad, *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h.113

⁹Saekan Muchith, dkk, *Cooperative Learning...*, h. 124

d. Problem yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran

Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.¹⁰ Pada kegiatan evaluasi problem yang sering muncul adalah kesulitan guru membuat standar soal karena kurang memahami tingkat pengetahuan peserta didik, karena latar belakang peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang berbeda-beda.¹¹ Sehingga akan memunculkan respon dan daya serap peserta didik terhadap pelajaran yang diajarkan berbeda. Aspek *Life Skill* (keterampilan hidup) kurang tersentuh, selain hal itu guru juga tidak menguasai strategi mengevaluasi, sehingga guru tidak mengetahui kemampuan peserta didik yang sesungguhnya.

Untuk mengatasi hal tersebut guru sudah seharusnya mengetahui karakteristik dan tingkat pengetahuan peserta didik. Hal ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan catatan atau dokumen seperti rapor ataupun menggunakan pre test. Selain itu guru dituntut melakukan pengamatan dan penilaian saat proses belajar berlangsung. Selain itu peserta didik hendaknya diwajibkan memiliki Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk tugas di rumah dan portofolio.

e. Problem yang berkaitan dengan lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik. Misalnya letak geografis sekolah, sarana dan prasarana, selain itu juga hubungan antar insani, misalnya hubungan peserta didik dengan peserta

¹⁰Fadillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h. 137

¹¹Ahmad Rohani dan Abu Ahmad, *Pengelolaan Pengajaran...*, h. 171

didik yang lainnya, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan keluarga di rumah, dan peserta didik dengan orang lain.¹²

Problem yang sering terjadi yaitu keterbatasannya sarana dan prasarana yang ada dalam sekolah tersebut, yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Seperti contoh jika sekolah tidak memiliki laboratorium komputer, maka saat peserta didik memperoleh materi yang berkaitan dengan praktikum, maka peserta didik hanya bisa membayangkan tanpa bisa membuktikan secara langsung dengan teori yang sudah dipelajarinya.

f. Problem yang berkaitan dengan kurikulum

Kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, menentukan pendekatan dan strategi/metode, memilih dan menentukan media pembelajaran, menentukan teknik evaluasi, yang semuanya harus berpedoman pada kurikulum.¹³

Problem yang sering terjadi yaitu kurang adanya sosialisasi kepada guru dan peserta didik mengenai kurikulum yang berlaku di sekolah, sehingga pemahaman guru dan peserta didik mengenai tujuan dari kurikulum tersebut sangat minim. Selain itu juga kerap terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang membingungkan guru dan peserta didik sehingga akan berdampak pada hasil belajar peserta didik.

¹²Hamruni, *Strategi dan model-model Pembelajaran aktif menyenangkan*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 13

¹³Aunurrahman, *Belajar Dan Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 194

2. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, “*Curriculum*”, yang berarti bahan pengajaran. Adapula yang mengatakan berasal dari bahasa Perancis, “*Courier*”, yang artinya berlari.¹⁴ Kurikulum juga berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olah raga yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finis.¹⁵ Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat didalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran-mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu.

Secara umum dalam dunia pendidikan Menurut Mac Donald, sistem persekolahan terbentuk atas empat subsistem, yaitu; mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum.¹⁶

Mengajar (*teaching*) merupakan kegiatan profesional yang diberikan oleh guru. Belajar (*learning*) merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Pembelajaran (*instruction*) adalah keseluruhan runtutan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar-

¹⁴Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 3

¹⁵*Ibid.*, h. 2

¹⁶James B. MacDonald, *Educational Models for Instruction*, Washington DC: The Association for Supervision and Curriculum Development, 1965, h. 3

mengajar. Kurikulum (*curriculum*) merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar.

Kurikulum sering dibedakan sebagai rencana (*curriculum plan*) dengan kurikulum yang fungsional (*functioning curriculum*). Menurut Beauchamp “*a curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school*”.¹⁷ Beauchamp lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran bagi siswa dalam ruang lingkup sekolah.

Pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan tradisional dan pandangan modern.

- 1) Pandangan tradisional merumuskan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah.¹⁸ Secara singkat, pandangan ini pengertian kurikulum terlihat lebih sempit sehingga hanya berfokus pada mata pelajaran sebagai rencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi didalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.¹⁹

Pandangan ini mengartikan kurikulum dalam lingkup lebih luas, bukan

¹⁷George A. Beauchamp, *Curriculum Theory*, Wilmette, Illinois: The KAGG Press, 1975, h. 6

¹⁸Zainal Arifin, *Konsep dan Model...*, h. 3

¹⁹*Ibid.*, h. 3

hanya terfokus pada kompetensi pengetahuan saja, tetapi juga pada sikap dan keterampilan selama bersekolah untuk mencapai tujuan pendidikan

Berdasarkan Ensiklopedia Nasional, kurikulum bukanlah sekedar suatu daftar mata pelajaran. Kurikulum memuat juga ketentuan mengenai bahan, komposisi bahan, sistem penyampaian dan sistem evaluasi. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia bahan kurikulum dibagi menjadi lima kelompok bahan belajar mengajar, yaitu (1) sikap dan nilai hidup; (2) pengetahuan; (3) keterampilan; (4) humaniora; (5) kewarganegaraan.²⁰

Dari seluruh pengertian dan pandangan mengenai kurikulum di atas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan kurikulum dapat dipandang dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit dari kurikulum hanya meliputi mata pelajaran atau materi pembelajaran yang disesuaikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan dalam pengertian luas kurikulum bersifat komprehensif sebagai rencana dalam proses pembelajaran selama menempuh pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

b. Kurikulum Standar Pendidikan Nasional

Berdasarkan amanat UU pendidikan nasional yang telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Dalam UU tersebut pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik

²⁰Lilian D. Tedjasudhana, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990, h. 240

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, dijelaskan pula bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²¹ Untuk mencapai tujuan pendidikan maka disusunlah sebuah kurikulum sebagai jalan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut

Seiring berkembang pesatnya era globalisasi dan teknologi menuntut perubahan kurikulum pendidikan nasional terus diupayakan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi dasar dalam pembelajaran, tidak luput perguruan tinggi ikut menyiapkan konsep pengembangan kurikulum tersebut. Peningkatan mutu jadi tujuan utama dalam pengembangan dan perubahan kurikulum itu, namun hal demikian masih belum terealisasi secara maksimal di lapangan dimana pembelajaran di sekolah, selama cenderung teoritis dan tidak terkait dengan lingkungan di mana anak berada. Akibatnya peserta didik tidak mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah dalam kesehariannya.²²

²¹Undang-undang RI. No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

²²Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa Press, 2010, h. 147

Berdasarkan hasil laporan UNESCO bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain, sehingga peningkatan mutu pendidikan menjadi sasaran perubahan dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional. Didalam standar tersebut ditetapkan aturan dan patokan baku yang harus dicapai dalam kegiatan pendidikan. Patokan standar ini dilakukan oleh sebuah institusi yang kredibel dan independen yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, kemudian dapat diukur dengan menggunakan nilai.²³

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari kelompok mata pelajaran, dimana kelompok tersebut adalah mata pelajaran agama; mata pelajaran kewarganegaraan; pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; pelajaran estetika; mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.²⁴

Pada poin pertama kelompok mata pelajaran agama ditujukan guna membentuk akhlak mulia berbudi pekerti hematnya manjadikan manusia yang bermoral, berilmu dan bermartabat. Kendalanya dalam mata pelajaran agama yang ditetapkan pemerintah masih dalam tataran teori, sedangkan dalam pengaplikasiannya di lingkungan sekolah (mendidik peserta didik)

²³Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner (Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 310–311

²⁴Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan, Konsep Perinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Educa, 2010, h. 193

masih belum terealisasi. Selanjutnya pada kelompok-kelompok mata pelajaran lainnya, jika dicermati kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang utuh, pengembangan kemampuan siswa dalam berbagai bidang keilmuan, potensi fisik, membudayakan sikap sportif, disiplin, berfikir ilmiah, dan mampu menciptakan keharmonisan bermasyarakat.

Dalam setiap satuan pendidikan dituangkan kompetensi yang harus dikuasai sesuai dengan beban belajar yang terbentuk dalam struktur kurikulum. Kompetensi terdiri dari kompetensi dasar dan dasar kompetensi yang dikembangkan berdasarkan kompetensi kelulusan. Sebagai contoh struktur kurikulum tersebut dapat dilihat pada struktur kurikulum SD/MI, MTs/SMP, dan SMA/MA. Di mana masing-masing jenjang satuan pendidikan memiliki mata pelajaran yang harus dituntaskan berdasarkan standar lulus. Masing-masing dari jenjang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

- a. Struktur kurikulum SD/MI memuat delapan mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri yang ditempuh dalam kurun waktu enam tahun, seperti Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBK, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
- b. Jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu tiga tahun memiliki kesamaan mata pelajaran pada jenjang SD/MI hanya saja pada jenjang SMP/MTs

²⁵*Ibid.*, h. 196-205

ditambah dua mata pelajaran menjadi sepuluh mata pelajaran yang wajib dituntaskan, seperti, Bahasa Inggris dan Keterampilan atau Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- c. Jenjang SMA/MA yang juga ditempuh dalam tiga tahun ditambah enam mata pelajaran menjadi “enam belas” (sesuai dengan jurusan yang diambil, IPA, IPS dan Bahasa) mata pelajaran yang wajib dituntaskan sesuai dengan jurusan yang diambil, seperti Ekonomi, Fisika, Biologi, Geografi Kimia, dan Sosiologi.

Mengenai tambahan mata pelajaran di masing-masing jenjang disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan yang ditempuh. Sedangkan pengembangan diri merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik tersebut.

Materi pendidikan umum dan pendidikan agama Islam tergambar dalam kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikannya dengan memperhatikan perkembangan masyarakat sekitarnya. Untuk itu dalam kurikulum terdapat kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap dan nilai pribadi yang integral sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berbagai upaya dilakukan hingga pembentukan undang-undang untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan nasional, walaupun belum dapat dirasakan hasilnya.²⁶

²⁶Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 158

Namun demikian dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan penetapan standar nasional, kita jangan membuat suatu konsep bahwa pendidikan nasional menjadi satu-satunya tujuan dalam pendidikan dan menempatkannya menjadi ukuran kesuksesan lembaga pendidikan, kemudian seluruh upaya diarahkan kepada standar nasional tersebut tanpa melakukan usaha-usaha yang konkret untuk mencapainya.

3. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah dikenal sejak zaman kolonial. Umur pesantren sudah sangat tua dan tidak pernah diterpa perubahan zaman. Semakin lama, semakin modern dan jumlahnya semakin banyak. Kata pondok berasal dari kata *funduq* (Arab) yang berarti penginapan atau wisma sederhana.²⁷ Karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren sebagaimana dikatakan oleh berasal dari kata santri yang berarti orang yang mendalami agama Islam. Kata tersebut di imbuhi awalan pe- dan akhiran -an sehingga sebutan pesantrian menjadi pesantren.²⁸ Disebut pesantren karena seluruh murid yang belajar disebut dengan istilah santri. Sebutan santri merupakan konsep baku, meskipun maknanya sama dengan siswa, murid, atau anak didik. Sebutan santri memiliki perbedaan substansial dengan sebutan siswa atau murid. Santri hanya berlaku

²⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Bahasa Arab-indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997, h. 1073

²⁸Hasan Basri & Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 227

bagi siswa yang belajar dipesantren dan objek kajian yang didalamnya ilmu agama Islam.

Pesantren yang pertama didirikan adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Ia adalah seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India.²⁹ Pada awal mula berdirinya, pondok pesantren hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja dan menggunakan cara nonklasikal (sistem pesantren), yakni seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab bahasa arab oleh ulama-ulama besar dari abad pertengahan (abad ke-12 s/d abad ke-16).³⁰ Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini.

Secara definisi, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat.³¹

Di dalam lembaga pendidikan pesantren ini terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Selain itu juga didukung dengan adanya pondok yang merupakan tempat tinggal para santri. Dengan demikian, santri tidak kembali ke rumah untuk beristirahat setelah

²⁹*Ibid.*, h. 228

³⁰*Ibid.*, h. 230

³¹Ridwan Abawihda, "*Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 86

belajar, melainkan mereka kembali ke pondok (asrama) yang sudah disediakan. Santri yang dimaksudkan di sini adalah sebutan bagi para pelajar yang belajar di pondok pesantren.³²

Seiring dengan perubahan dan tantangan zaman, maka banyak pesantren berbenah diri dan melakukan perubahan dalam semua bidang. Memasuki tahun 2006/2007 pengelolaan dipondok pesantren ditanah air mungkin banyak mengalami perubahan. Karena Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Kementerian Agama, menambah direktorat baru pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang biasa disebut dengan Direktorat PD Pontren. Direktorat ini bertugas mengorganisir pengelolaan lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.³³

a. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu, kata pondok berasal dari Bahasa Arab *funduq* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal

³²Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, h. 24

³³Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: CV. Diandra Primamita Media, 2011, h. 56

dengan istilah *dayah* atau *rangkang* atau *menuasa*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*.³⁴

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain adalah sebagai berikut : Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional, di mana para santrinya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri atau berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Komplek ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁵

Sedangkan menurut Mastuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.³⁶

Dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren secara terminologi adalah lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam untuk memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam (*Tafaqquh Fiddien*) dengan menekankan moral agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat, yang di dalamnya terdiri beberapa elemen yang tidak bisa dipisahkan, antara lain kiai sebagai pengasuh sekaligus

³⁴Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3S, 1983, h. 22

³⁵*Ibid.*, h. 18

³⁶Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS, 1994, h. 9

pendidik, masjid sebagai sarana peribadatan sekaligus berfungsi sebagai tempat pendidikan santri dan asrama sebagai tempat tinggal dan belajar santri.

b. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-kurangnya ada beberapa unsur antara lain: kiai yang mengajar dan mendidik serta jadi panutan, santri yang belajar kepada kiai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sholat jamaah, dan asrama tempat tinggal santri. Sementara Zamakhsyari Dhofier menyebutkan ada lima elemen utama pesantren yaitu pondok, masjid, pengajian kitab klasik, santri dan kiai.³⁷

Menurut Moh. Akhyadi, ada tiga hal utama yang melatarbelakangi sentralisnya peran kiai dalam pesantren;

Pertama, keunggulan di bidang ilmu dan kepribadian yang dapat dipercaya dan diteladani. kedua, keberadaan Kiai sebagai pemilik tanah wakaf, pendiri pesantren dan ketiga, kultur pesantren yang sangat kondusif bagi terciptanya pola hubungan kiai-santri yang bersifat atasan bawahan, dengan model komunikasi satu arah: sistem komando, sehingga santri menjadikan kiai sebagai sesepuh dan tempat konsultasi berbagai persoalan hidup.³⁸

Berdasarkan proses tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjadi seorang kiai setiap orang mempunyai kesempatan apabila mampu memenuhi berbagai kriteria di atas dan dapat diterima oleh masyarakat.

c. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren

³⁷Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, h. 44

³⁸Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001, h. 144

Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh sebab itu, pesantren telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kiai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Pesantren dapat juga disebut sebagai lembaga nonformal, karena eksistensinya berada dalam jalur sistem pendidikan kemasyarakatan, pesantren memiliki program yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal, nonformal dan informal yang berjalan sepanjang hari dalam sistem asrama. Dengan demikian pesantren bukan saja lembaga belajar, melainkan proses kehidupan itu sendiri.³⁹

Peran dan fungsi pesantren sangat banyak salah satu yang menjadi ciri khas dalam sebuah pesantren adalah pembinaan moral/akhlak sehingga mayoritas *attitude/sikap output* dari pesantren mencerminkan seseorang yang santun serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

d. Bentuk-bentuk Pondok Pesantren

³⁹Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001, h. 43

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

Menurut Hasbullah, ada tiga bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, yaitu:

- 1) Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan cara sistem *bandungan* dan *sorogan*, di mana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama besar sejak abad pertengahan. Para santri pada pondok pesantren bentuk ini biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama yang telah disediakan.⁴⁰

Bentuk ini banyak diterapkan di pondok pesantren klasik sekarang, bahan ajarnya berupa kitab kuning, dengan mata pelajaran nahwu saraf yang menjadi mata pelajaran utama, dan setiap pesantren biasanya mempunyai kurikulum khas tersendiri untuk menentukan kitab yang akan digunakan. Dan biasanya kitab yang digunakan hampir tidak pernah berubah dari pertama kali pesantren didirikan.

- 2) Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren klasik, tetapi para santrinya tidak disediakan asrama di kompleks pesantren, namun

⁴⁰Hasbullah, *Dasar-Dasar...*, h. 146

tinggal tersebar di sekeliling pesantren (santri kalong), di mana cara dan metode pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan sistem *weton*, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu.⁴¹

Pesantren jenis ini lebih dikenal dimasyarakat dengan majelis taklim, di mana santri tidak diwajibkan hadir dan menerima pembelajaran setiap hari, tidak ada pembinaan dalam keseharian seperti santri yang mukim di asrama. Tidak ada penjenjangan serta penilaian yang diberikan kepada santri sebagai evaluasi pelaksanaan pendidikan.

- 3) Pondok pesantren yang merupakan lembaga gabungan antara sistem pendidikan pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem *bandungan*, *sorogan* ataupun *wetonan* dengan para santri disediakan asrama ataupun merupakan santri *kalong*. Pondok pesantren seperti ini biasa disebut dengan pondok pesantren modern, selain menyelenggarakan pendidikan nonformal juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan sekolah umum dalam berbagai tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat.⁴²

Pesantren modern saat ini, sistem pembelajarannya sudah menyamai dengan sekolah formal, baik dari metode pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran, sehingga banyak pesantren yang dikatakan modern kehilangan ciri khas ilmu keislaman, sehingga terlihat mirip dengan pendidikan madrasah.

⁴¹*Ibid.*, h. 146

⁴²*Ibid.*, h. 146

Ketiga bentuk pondok pesantren ini memberikan gambaran bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan sekolah, luar sekolah dan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat, milik masyarakat dan untuk masyarakat. Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi sebagai lembaga penyiaran agama Islam. Sejak awal kehadiran pesantren ternyata mampu mengadaptasi diri dengan masyarakat. Pesantren juga berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam.

Seiring perkembangan zaman pengelolaan pondok pesantren pun dari segi penyelenggaraan pendidikan makin berkembang. Sebagian pondok pesantren menggunakan sistem madrasah dan kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum pemerintah dengan menyelenggarakan MI, MTs, MA atau penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA/SMK bahkan sampai Perguruan Tinggi, namun sebagian pesantren masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya.

e. Pondok Pesantren *Salafiyah*

Secara umum pondok pesantren bisa dibedakan atas pesantren *salafiyah* dan pesantren *khalafiyah*. Pondok pesantren *khalafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern. Melalui kegiatan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekoah (SD, SMP, SMA, dan SMK), atau perguruan tinggi, dengan pendekatan klasikal.

Sedangkan *Salaf* artinya lama, dahulu, atau tradisional. Pondok pesantren *salafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, berbahasa Arab. Penjurusan tidak didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya suatu kitab tertentu, santri dapat naik kejenjang berikutnya dengan mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal dengan sistem pembelajaran tuntas. Dengan cara ini, santri lebih intensif mempelajari suatu cabang ilmu.

Dalam konteks keilmuan, pondok pesantren *salafiyah* merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya.⁴³ Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan agama (pengetahuan umum) tidak diajarkan. Selain itu, sistem pengajaran yang digunakan masih dengan metode klasik. Metode ini dikenal dengan istilah *sorogan* atau layanan individual (*Individual Learning Process*); dan *wetonan* (berkelompok); yaitu para santri membentuk *halaqah* dan kiai berada di tengah untuk menjelaskan materi agama yang disampaikan. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung tanpa penjurusan kelas dan kurikulum yang ketat; dan biasanya dengan memisahkan kelompok santri

⁴³Yasmadi, *Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, Cet. I, h. 70-71.

berdasarkan jenis kelamin.⁴⁴ Akibatnya, pesantren *salafiyah* cenderung mendapatkan stigma sebagai lembaga pendidikan yang *out of date*, konservatif, eksklusif dan teralienasi.

Kurikulum di pesantren *salafiyah* tidak memakai bentuk silabus, tetapi berupa jenjang level kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu; dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tradisional pula. Beberapa pesantren tradisional melakukan praktek-praktek tasawuf atau hal-hal yang berbau sufistik menjadi subkultur pesantren hingga sekarang.⁴⁵

f. Kurikulum Pondok Pesantren

Menurut Nurcholis Madjid bahwa istilah kurikulum tidak terkenal di dunia pesantren (masa pra kemerdekaan), walaupun sebenarnya materi pendidikan sudah ada didalam pesantren, terutama pada praktek pengajaran bimbingan rohani dan latihan kecakapan hidup di pesantren. Oleh karena itu, kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit atau mengimplementasikannya dalam kurikulum. Di samping itu tujuan pendidikan pesantren sering hanya ditentukan oleh kebijakan kiai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.⁴⁶

Kurikulum yang dikembangkan di pesantren dapat dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan jenis pola pesantren itu sendiri, yaitu:

⁴⁴Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006., h. 3

⁴⁵Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, h. 26-27

⁴⁶Ridwan Abawihda, *Kurikulum Pendidikan...*, h. 80

- 1) Pesantren *Salaf* (tradisional), kurikulum pesantren *salaf* yang statusnya sebagai lembaga pendidikan nonformal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi: Tauhid, tafsir, hadis, ushul fiqh, tasawuf, bahasa arab (Nahwu, sharaf, balaghah dan tajwid), mantik, akhlak. Pelaksanaan kurikulum pesantren ini berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Jadi ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan
- 2) Pesantren Modern, pesantren jenis ini yang mengkombinasikan antara pesantren *salaf* dan juga model pendidikan formal dengan mendirikan satuan pendidikan semacam SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA bahkan sampai pada perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pesantren *salaf* yang diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Departemen Agama dalam sekolah (Madrasah). Sedangkan kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau mungkin diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi (madrasah) pada waktu kuliah. Sedangkan waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk mengkaji keilmuan Islam khas pesantren (pengajian kitab klasik).⁴⁷

4. Pendidikan Kesetaraan

⁴⁷*Ibid.*, h. 89

a. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 26 dalam penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/ MA.⁴⁸

Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/ MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.⁴⁹ Menurut UNESCO pendidikan kesetaraan yakni *“An equivalency program is defined as an alternative educational program equivalent to existing formal program of vocational education”*. Pendidikan kesetaraan didefinisikan sebagai program pendidikan alternatif yang setara dengan pendidikan formal dalam pendidikan kejuruan.⁵⁰

Pendidikan kesetaraan meliputi program kesetaraan Paket A, Kesetaraan Paket B dan Kesetaraan Paket C. Istilah “Setara” mempunyai makna sepadan atau sejajar yang berarti peserta didik lulusan program

⁴⁸Depdiknas, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Gamedia Pustaka Umum, 2003, h. 60

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, *Achieving EFA Through Equivalency Programmes in Asia-Pacific*, Bangkok: Mom Luang Pin Malakul Centenary Building, 2010, h. 2

pendidikan kesetaraan memperoleh pengakuan dalam hal bobot, nilai, ukuran/kadar, pengaruh, kedudukan fungsi, dan kewenangan yang setara atau sama dengan peserta didik lulusan pendidikan formal (sekolah). Program ini ditunjukkan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. Program ini juga melayani warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karakteristik peserta didik pendidikan kesetaraan adalah anggota masyarakat yang kurang beruntung dan memperoleh kesempatan menempuh pendidikan melalui jalur formal, termasuk diantaranya karena faktor geografis, demografis, ekonomi, psikologis, sosial dan budaya.

b. Sasaran dan Tujuan Pendidikan Kesetaraan

Dalam Acuan Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C, Sasaran pendidikan kesetaraan yaitu:

- 1) Petani, yang mereka hidup di lingkungan pertanian yang secara ekonomi dan geografis tidak mampu mengikuti pendidikan formal
- 2) Masyarakat pesisir khususnya nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan
- 3) Masyarakat pondok pesantren salafi
- 4) Masyarakat perkotaan (anak jalanan) yang secara ekonomi, sosial dan psikologis tidak bisa mengikuti pendidikan formal

5) Masyarakat lainya yang terasing dan terpinggirkan karena alasan geografi.⁵¹

Berdasarkan Acuan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan program ini bertujuan:

- 1) Membentuk warga belajar yang beriman, bertaqwa, berkarakter dan bermartabat,
- 2) Memberikan pembelajaran bermakna dan produktif dengan standar yang memadai,
- 3) Memberikan kecakapan hidup yang berorientasi mata pencaharian, kewirausahaan, kejuruan dan pekerjaan,
- 4) Memberikan pembekalan untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan hidup dimasyarakat.⁵²

c. Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Pondok pesantren *ssalafiyah* yang menyelenggarakan program ini tetap menggunakan kurikulum khas pesantren yang selama ini berlaku, hanya menambah beberapa mata pelajaran umum dalam kurikulum pesantren. Mata pelajaran umum tersebut ada yang harus diajarkan oleh guru melalui belajar mengajar tatap muka dan ada yang dapat diberikan melalui penyediaan buku-buku perpustakaan atau penugasan dan bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing.

⁵¹Depdiknas, *Acuan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, h. 4

⁵²*Ibid.*,

Pada tahun 2018 Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Keputusan nomor 1772 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*, dalam SK tersebut dibahas mengenai kurikulum yang wajib dilaksanakan pada PK-PPS, kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* adalah kurikulum khas yang telah berlaku di pondok pesantren yang bersangkutan dan beberapa mata pelajaran umum sesuai dengan standar isi masing-masing jenjang.

Mata pelajaran umum yang wajib diajarkan pada tingkat *Ula* paling sedikit:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
- 2) Matematika,
- 3) Bahasa Indonesia,
- 4) Ilmu Pengetahuan Alam,
- 5) Ilmu Pengetahuan Sosial.

Mata pelajaran umum yang wajib diajarkan pada tingkat *Wustha* paling sedikit:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
- 2) Matematika,
- 3) Bahasa Indonesia,
- 4) Bahasa Inggris,
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam,
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial.

Mata pelajaran umum wajib diajarkan pada tingkat *Ulya* paling sedikit:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 2) Matematika;
- 3) Bahasa Indonesia;
- 4) Bahasa Inggris;
- 5) Sejarah Indonesia;
- 6) Mata pelajaran sesuai dengan peminatan yang diberlakukan oleh satuan pendidikan.

Setiap pondok pesantren *salafiyah* berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi, serta kondisi setempat. Bahan ajar mata pelajaran umum untuk program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* pada dasarnya sama dengan yang digunakan pada SD/MI atau pada SMP/MTs. Buku-buku yang digunakan pada SD/MI atau SMP/MTs dapat digunakan untuk pondok pesantren *salafiyah*. Khusus untuk program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah*, diupayakan penyusunan dan penerbitan buku mata pelajaran umum yang bernuansa pesantren tanpa mengurangi substansi materi harus diberikan pada jenjang pendidikan dasar.

B. Kerangka Berpikir

Satuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* dilaksanakan sebagai alternatif penyetaraan derajat pondok pesantren dengan pendidikan formal dari kaca mata Standar Pendidikan Nasional di Indonesia.

Ditetapkannya SK Dirjen Pendidikan Islam membuat satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* mendapatkan lembar hasil ujian akhir (ijazah) yang diterbitkan oleh Dirjen pendidikan Islam dengan penamaan pondok pesantren *salafiyah* tingkat *ula/wustha/ulya*.

Peserta didik pada satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* mengikuti ujian yang sama seperti sekolah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional, dengan mengujikan mata pelajaran umum seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Atas dasar penyetaraan inilah maka dalam SK Dirjen Pendidikan Islam, kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* dipertimbangkan dengan memuat materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan standar pendidikan nasional, sehingga jika pondok pesantren mengikuti pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*. Maka yayasan pondok pesantren harus memastikan peserta didik mendapatkan materi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional di Indonesia.

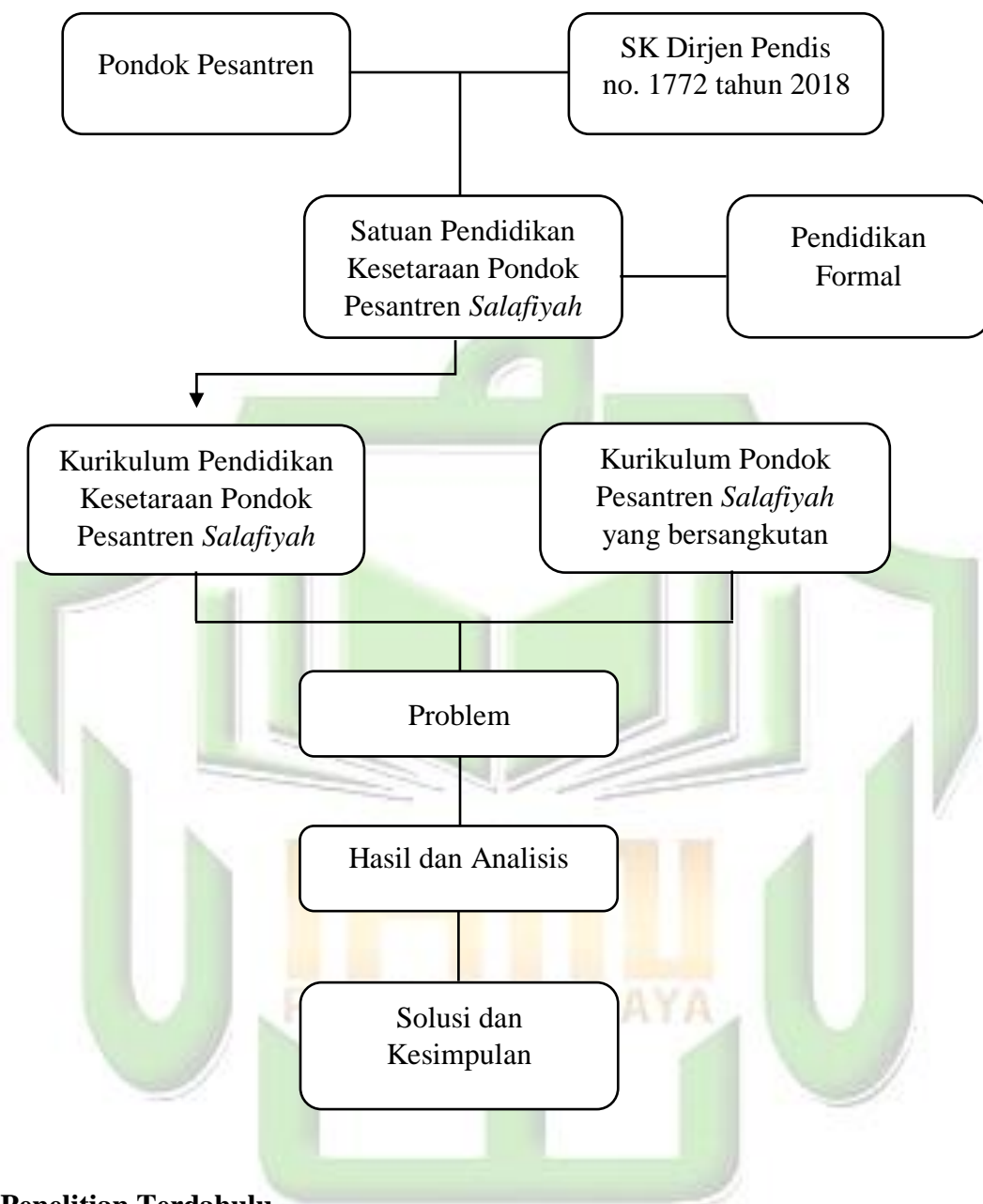
Surat tanda tamat belajar atau jazah yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam memuat rincian mata pelajaran keagamaan Islam dan juga mata pelajaran umum, sehingga sebagai satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* seharusnya juga dapat bertanggung jawab untuk mengisi penilaian akhir pada blanko ijazah dengan nilai yang benar dan relevan. Ijazah yang diperoleh santri dari satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sekolah

formal, perguruan tinggi atau digunakan untuk berkas persyaratan melamar pekerjaan.

Sebagai penunjang untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* ini tentu penyelenggara pondok pesantren harus menerapkan ketentuan dalam SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1772 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai acuan dasar hukum dalam penyelenggaraan kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*. Namun pada faktanya yang penulis temui di lapangan hampir semua pondok pesantren di Kotawaringin Timur belum sepenuhnya menerapkan kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* terutama pada mata pelajaran umum.

Ada tiga pokok yang akan dibahas pada penelitian ini: pertama, mendeskripsikan penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur. Kedua menganalisis problem dari penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pada mata pelajaran umum di pondok pesantren *Salafiyah* se-Kotawaringin Timur. Ketiga, merumuskan solusi dari problem penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pada mata pelajaran umum di pondok pesantren *Salafiyah* se-Kotawaringin Timur.

SKEMA KERANGKA BERPIKIR



C. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Sherly Budiarto dengan judul “Desain dan Implementasi Kurikulum Mu’adalah Pada Kulliyatul Mu’allimat Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka (Analisis Integrasi Kurikulum)” pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan

metode studi multi kasus kualitatif, mengkaji bagaimana pondok pesantren Darussalam Gontor Putri Dan Pondok Modern Tazakka mendesain dan mengimplementasikan kurikulum muadalah.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan desain kurikulum muadalah yang diterapkan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka memiliki kesamaan. Akan tetapi dalam proses dan penerapan kurikulum mu'adalah Pondok Modern Darussalam Gontor menjadi kiblat percontohan, sehingga pesantren yang sudah mendapatkan penyetaraan kurikulum atau muadalah dapat melihat dan mengimplementasikan kurikulum di Pondok-pondok pesantren lainnya sesuai dengan yang dicontohkan Pondok Modern Darussalam Gontor.⁵³

2. Penelitian karya Khairul Umam dan Imron Fauzi dengan judul “Implementasi Program Mu'adalah Di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember” pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif, mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi, problematika dan dampak implementasi program mu'adalah di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa program muadalah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dalam penelitian ini pula dibahas beberapa keunikan yang ditemukan di Pondok Pesantren Baitul

⁵³Sherly Budiarto, “*Desain dan Implementasi Kurikulum Mu'adalah Pada Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka (Analisis Integrasi Kurikulum)*”, Tesis Magister, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020, t.d.

Arqom Balung Kabupaten Jember. Adapun problematika dalam implementasi program mu'adalah di pesantren Baitul Arqom Balung antara lain:

- a. Belum lengkapnya peraturan teknis administratif penyelenggaraan Mu'adalah;
- b. Adanya kontroversi terkait evaluasi secara mandiri;
- c. Problem terkait dengan pembiayaan berupa bantuan operasional dan tidak adanya standar gaji guru;
- d. Tidak adanya kualifikasi guru harus Strata 1 (S-1); dan
- e. Tunjangan sertifikasi guru yang tidak dapat dicairkan.

Terlepas dari beberapa problematika yang dialami pesantren Baitul Arqom Balung dalam mengimplementasikan program mu'adalah ditemui dampak baik pada pembuktian mutu pendidikan pesantren mu'adalah kepada masyarakat, hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang pendidikan Mu'adalah setelah keluar dari pesantren, dan terbukanya peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.⁵⁴

3. Tesis karya Binti Nur Afifah dengan judul "Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumberhari Kencong Kepung Kediri" pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif, mengkaji implementasi sistem pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah PP. Darussalam Sumberhari yang meliputi tujuan, kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi.

⁵⁴Khairul Umam dan Imron Fauzi, "Implementasi Program Mu'adalah Di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember". Penelitian DIPA tahun 2017, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017, t.d.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tujuan dari Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri adalah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren agar para santri ketika sudah lulus dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk teknis penyelenggaraan kurikulum muadalah di Pesantren Darussalam Sumbersari, pesantren hanya memberikan porsi yang sangat sedikit untuk materi pelajaran umum yakni hanya 1 jam pelajaran pada semua pelajaran umum yang diselenggarakan. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode bandongan/ wetonan dan sorogan, Musyawarah. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2 macam ujian yaitu Ujian semester dan ujian akhir Madrasah.⁵⁵

4. Jurnal karya Suroso dengan judul “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah Surabaya” pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif, mengkaji tentang upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui manajemen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen pembelajaran di PDF Ponpes Assalafi Al Fitrah tahun 2015-2016 sudah berlangsung dengan baik, terlihat dari terlaksananya ciri-ciri pokok manajemen pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Dalam

⁵⁵Binti Nur Afifah, “Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri”, Tesis Magister, Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2017, t.d.

pelaksanaan manajemen pembelajaran ustadz/ustadzah membuat perencanaan pembelajaran khususnya terkait penguasaan materi, alokasi dan tujuan pembelajaran, meskipun perencanaan ini belum tertulis secara sistematis. Keadaan ini dikarenakan baru adanya panduan perencanaan pembelajarannya yang ditetapkan secara nasional juga kesibukan ustadz/ustadzah sehingga rencana pembelajaran belum tersusun secara terperinci. Selain itu, juga karena mata pelajaran umum adalah hal yang baru, sehingga indikator pencapaian tujuannya adalah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.⁵⁶

5. Tesis karya Abdulloh Shodiq dengan judul “Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren *Salafiyah* Pasuruan)” pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode studi multi kasus kualitatif, mengkaji landasan yang mejadi dasar dilaksanakannya pengembangan kurikulum pesantren muadalah, orientasi pengembangan kurikulum pesantren muadalah, model pengembangan kurikulum pesantren muadalah, dan dampak pengembangan kurikulum pesantren muadalah dalam peningkatan dan pengembangan di Pondok Pesantren Sidogiri dan Pesantren *Salafiyah* Pasuruan.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan temuan pada masing-masing pondok pesantren mengenai landasan, orientasi, model dan dampak dari pengembangan kurikulum muadalah, kemudian dari dua temuan tadi dibuat tabel perbandingan sehingga penulis menarik kesimpulan berupa tabel temuan

⁵⁶Suroso, “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah Surabaya”, Adabiyah Jurnal Pendidikan Islam, Vol. II, No. 1, Desember 2017, h. 73 – 106. DOI Link: <https://doi.org/10.21070/ja.v2i1.1237>

lintas situs yang menyatakan bahwa bahwa empat fokus penelitian yang diteliti pada dua pondok pesantren memiliki kesamaan. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu tentang kurikulum inti pendidikan nasional. Pada pondok pesantren Sidogiri, kurikulum inti pendidikan nasional itu belum direspon. Namun pada Pondok Pesantren *Salafiyah* Pasuruan, kurikulum inti itu sudah dilaksanakan di kelas 1 dan 2 Aliyah.⁵⁷

6. Jurnal karya Mushollin dengan judul “Kurikulum Pondok Pesantren Mu’adalah” pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif, menganalisis tentang manajemen kurikulum di pondok pesantren mu’adalah al-Fitrah Kedinding Surabaya.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa struktur kurikulum di struktur mata pelajaran di MA As-Salafi Al-Fitrah mencakup 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum. Standar kompetensi yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di MA as-Salafi al-Fitrah telah dibuat sendiri oleh tim penyusun. Standar kompetensi tersebut mengacu pada isi kitab-kitab yang dikaji. Hasil penelitian juga membahas tentang proses dan kegiatan pembelajaran di pondok pesantren hingga aspek yang menjadi keunikan pondok pesantren MA As-Salafi Al-Fitrah.⁵⁸

7. Tesis Karya Ali Munif dengan judul “Manajemen Mutu Program Pendidikan Kesetaraan Di Ma’had Al-Faruq Karanglewas Kabupaten Banyumas”, pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif,

⁵⁷Abdulloh Shodiq, “*Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*”, Tesis Magister, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018, t.d.

⁵⁸Mushollin, “*Kurikulum Pondok Pesantren Muadalah*”, Jurnal Nuansa, Vol. 11 No. 1 Januari – Juni 2014, h. 127-150

mengkaji manajemen mutu program pendidikan kesetaraan di Ma'had Al-Faruq Karanglewas, menganalisis strategi dan implikasi manajemen mutu terhadap peningkatan mutu program pendidikan kesetaraan di Ma'had Al-Faruq Karanglewas.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan: (1) Manajemen mutu program pendidikan kesetaraan di Ma'had Al-Faruq Karanglewas dengan mengikuti konsep berpikir TQM, adalah suatu peningkatan terus menerus, menghasilkan lulusan yang berkualitas, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi global, proses pembelajaran yang interaktif, sampai kepada ikut bertanggungjawab untuk memuaskan pengguna lulusan itu. (2) Strategi peningkatan mutu program pendidikan kesetaraan di Ma'had Al-Faruq Karanglewas dapat dilakukan melalui: *pertama*, menfokuskan pada kepuasan wali santri dengan meningkatkan keberhasilan belajar santri, memberikan kepercayaan kepada wali santri, dan memberikan kesejahteraan bagi guru. *Kedua*, melibatkan secara totalitas seluruh *stakeholders* untuk menerapkan budaya mutu. *Ketiga*, membuat ukuran baku mutu lulusan. *Keempat*, membangun komitmen, untuk mewujudkan tujuan pondok pesantren. *Kelima*, melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan. (3) Terdapat dua implikasi penting, yakni implikasi terhadap pengembangan tipologi pemikiran pendidikan dan implikasi terhadap pengembangan kurikulum.⁵⁹

8. Tesis karya Muthoharoh dengan judul “Problem Dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Kota

⁵⁹Ali Munif, “Manajemen Mutu Program Pendidikan Kesetaraan Di Ma'had Al-Faruq Karanglewas Kabupaten Banyumas”, Tesis Magister, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019, t.d.

Semarang (Studi Kasus di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan dan MIN Sumurrejo, Gunungpati)” pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi multi kasus kualitatif, menganalisis terkait problem implementasi kurikulum 2013 di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan dan MIN Sumurrejo Gunungpati Semarang, dan merumuskan solusi dari problem implementasi kurikulum 2013 tersebut.

Hasil dari penelitian ini ditemui Problem implementasi kurikulum 2013 di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan dan MIN Sumurrejo Gunungpati Semarang terdapat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian dari tiap tahap tersebut dirumuskan solusi dari problem implementasi kurikulum 2013 di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan dan MIN Sumurrejo Gunungpati Semarang pada tahap perencanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di antaranya dengan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan tentang kurikulum 2013 secara merata dan menyeluruh sehingga profesionalisme guru juga akan meningkat. Dalam hal pelaksanaan pembelajaran bisa dengan memotivasi dan apresiasi terhadap siswa, agar siswa antusias dan pembelajaran juga bisa lebih kondusif. Pada evaluasi kurikulum 2013 mata pelajaran PAI yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman guru terhadap konsep penilaian dan praktik menyusun instrumen penilaian.⁶⁰

9. Tesis karya Siti Mau'izatul Hasanah dengan judul “Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren *Salafiyah* Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

⁶⁰Muthoharoh, “*Problem Dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Mi Kota Semarang (Studi Kasus Di Mi Darul Ulum Wates Ngaliyan Dan Min Sumurrejo, Gunungpati)*”, Tesis Magister, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, t.d.

Tahun Di Kabupaten Barito Kuala” pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode studi multi kasus kualitatif, menganalisis terkait manajemen kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di Kabupaten Barito Kuala, serta menganalisis usaha menata-kelola kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di kabupaten Barito Kuala.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pondok Pesantren *Salafiyah* Al-Amin, Nururssalam dan Tarbiyatul Furqan, belum menggunakan prinsip-prinsip manajemen (baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi) dalam tata kelola kurikulum; karena belum memiliki kurikulum secara tertulis, sehingga secara eksplisit belum ditetapkan tujuan pendidikan.

Pondok pesantren *salafiyah* masih mengutamakan pengajian kitab kuning sebagai bahan ajar, namun fokus dan perhatian tetap mengacu pada pembinaan akhlak dan kemandirian. Sedangkan Pembelajaran beberapa mata pelajaran umum diberikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga pondok pesantren *salafiyah* masih dapat direkonstruksi menjadi kurikulum modern.⁶¹

10. Jurnal karya Ara Hidayat dan Eko Wahib dengan judul “Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah *Salafiyah* Pondok Tremas Pacitan” pada tahun 2014, Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif, mengkaji kebijakan pesantren muadalah, dan bagaimana implementasi kurikulum mu’adalah di Madrasah Aliyah *Salafiyah* Pondok Tremas Pacitan.

⁶¹Siti Mau’izatul Hasanah, “*Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Barito Kuala*”, Tesis Magister, Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2012, t.d.

Hasil Penelitian ini mendeskripsikan bahwa Status *mu'adalah* pada MA *Salafiyah* Pondok Tremas tersebut menjadi pendorong untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya implementasi kurikulum *mu'adalah* dan peningkatan kompetensi guru. Dijelaskan pula komponen-komponen implementasi kurikulum *mu'adalah* meliputi rumusan tujuan, identifikasi sumber-sumber yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, peran pihak-pihak terkait dalam implementasi kurikulum, pengembangan kemampuan profesional, penjadwalan kegiatan pelaksanaan, unsur penunjang, komunikasi, dan monitoring.⁶²

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Saya
1	Sherly Budiarto	Desain dan Implementasi Kurikulum Mu'adalah Pada Kulliyatul Mu'allimat Al Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka (Analisis Integrasi Kurikulum)	Teori desain kurikulum mu'adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka	Desain kurikulum mu'adalah yang dirancang di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka adalah berorientasi pada disiplin ilmu, yang termasuk dalam organisasi <i>sepereted subject curriculum</i> dalam penyajian materinya. model implementasi <i>Innovation profile models</i> , karena dalam proses implementasinya para tenaga pengajar menggunakan 3 bidang	Dalam penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan penelitian saya, akan tetapi memiliki masalah penelitian yang berbeda, dalam penelitian saya meneliti kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum

⁶²Ara Hidayat dan Eko Wahib, "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan", Jurnal Pendidikan Islam: Volume III, Nomor 1, Juni 2014, h. 183-201

				(diagnosis, penerapan dan evaluasi),	
2	Khairul Umam dan Imron Fauzi	Implementasi Program Mu'adalah Di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember	Teori implementasi program mu'adalah di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember	Implementasi program mu'adalah di Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terdapat beberapa problematika implementasi antara lain terkait masalah administrasi, evaluasi mandiri, pembiayaan, kualifikasi guru dan tunjangan sertifikasi guru tidak dapat dicairkan. Akan tetapi implementasi program mu'adalah tersebut berdampak baik pada pembuktian mutu pendidikan pesantren mu'adalah kepada masyarakat, hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang pendidikan Mu'adalah setelah keluar dari pesantren, dan terbukanya peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.	Dalam penelitian saya menggunakan studi multi kasus, yaitu ada beberapa pondok pesantren yang diteliti dan memiliki masalah penelitian yang berbeda pula, dalam penelitian saya meneliti kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum.
3	Binti Nur Afifah	Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari	Teori Kurikulum Mu'adalah, Proses Pembelajaran dan Evaluasi sistem pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari sistem pendidikan Mu'adalah di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari adalah untuk mendapatkan ijazah yang diakui oleh	Dalam penelitian saya menggunakan studi multi kasus, yaitu ada beberapa pondok pesantren yang diteliti dan memiliki masalah penelitian yang berbeda pula,

		Kencong Kepung Kediri	Mu'adalah	pemerintah supaya dapat mempermudah para santri melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum pendidikan <i>salaf</i> terbagi menjadi dua, yakni ma'hadiyah dan madrasah. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode bandongan/ wetonan dan sorogan, Musyawarah. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2 macam ujian yaitu Ujian semester dan ujian akhir Madrasah	dalam penelitian saya meneliti kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum.
4	Suroso	Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	Teori manajemen pembelajaran PDF Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	Manajemen pembelajaran yang ada di PDF Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah telah terlaksana dengan baik dengan adanya perencanaan tujuan, materi peajaran, pelaksanaan pembelajaran, alokasi waktu dan jenis evaluasi, Pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik.	Dalam jurnal penelitian ini memuat cakupan yang lebih sempit. Yaitu terkait pembelajaran dan mengkaji pada satu pondok pesantren, Dalam penelitian saya menggunakan studi multi kasus, yaitu ada beberapa pondok pesantren yang diteliti mengenai kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum.

5	Abdulloh Shodiq	Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren <i>Salafiyah</i> Pasuruan)	Teori model pengembangan kurikulum pesantren muadalah berbasis integrasi kitab kuning dengan kurikulum inti pendidikan nasional	Landasan pengembangan kurikulum dilakukan sesuai ketentuan pengembangan kurikulum yaitu: filosofis, yuridis, sosial budaya dan agama, pengembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Orientasi pengembangan kurikulum muadalah pada kedua MA tersebut adalah memberikan kesetaraan pendidikan lulusan muadalah dengan lulusan MA. Model pengembangan kurikulum pesantren muadalah pada MA adalah model administrative dan beauchan (4) Dampak pengembangan kurikulum muadalah adalah santri mengalami perkembangan dalam belajarnya, jumlah santri bertambah, dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi	Dalam penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan penelitian saya, akan tetapi tujuan dari penelitian ini berbeda dengan penelitian saya yang mendeskripsikan penerapan kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum, kemudian mentelaah problem dari penerapannya serta mencari solusi dari permasalahan tersebut
6	Mushollin	Kurikulum Pondok Pesantren Muadalah	Teori manajemen kurikulum di pondok pesantren muadalah al-Fitrah Kedinding Surabaya	Struktur mata pelajaran dalam Kurikulum MA As-Salafi Al-Fitrah mencakup pelajaran agama dan umum dengan komposisi 70% dan 30%. Dan dalam praktiknya mata pelajaran umum diberikan pada kelas 3	Dalam penelitian saya menggunakan studi multi kasus, yaitu ada beberapa pondok pesantren yang diteliti dan memiliki masalah penelitian yang berbeda pula, dalam penelitian

				<p>Aliyah saja. Standar kompetensi yang digunakan pedoman dalam pembelajaran di MA as-Salafi al-Fitrah telah dibuat sendiri oleh tim penyusun. Standar kompetensi tersebut mengacu pada isi kitab - kitab yang dikaji. Struktur kurikulum mata pelajaran yang langsung berkaitan dengan ajaran-ajaran thoriqoh masih sedikit.</p>	<p>saya meneliti kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum.pesantren muadalah.</p>
7	Ali Munif	Manajemen Mutu Program Pendidikan Kesetaraan Di Ma'had Al-Faruq Karanglewas Kabupaten Banyumas	Teori Manajemen Mutu Program Pendidikan Kesetaraan Di Ma'had Al-Faruq Karanglewas Kabupaten Banyumas	<p>Hasil penelitian ini mendeskripsikan: (1) Manajemen mutu program pendidikan kesetaraan di Ma'had Al-Faruq Karanglewas dengan mengikuti konsep berpikir TQM, adalah suatu peningkatan terus menerus, menghasilkan lulusan yang berkualitas, (2) Strategi peningkatan mutu program pendidikan kesetaraan di Ma'had Al-Faruq Karanglewas dapat dilakukan dengan menfokuskan pada kepuasan peserta didik, melibatkan secara totalitas seluruh <i>stakeholders</i> untuk menerapkan budaya mutu, membuat ukuran baku mutu lulusan, membangun komitmen, untuk mewujudkan tujuan pondok,</p>	<p>Dalam penelitian saya menggunakan studi multi kasus, yaitu ada beberapa pondok pesantren yang diteliti dan memiliki masalah penelitian yang berbeda pula, dalam penelitian saya meneliti kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum.</p>

				<p>melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan. (3)</p> <p>Terdapat dua implikasi penting, yakni implikasi terhadap pengembangan tipologi pemikiran pendidikan dan implikasi terhadap pengembangan kurikulum.</p>	
8	Muthoharoh	<p>Problem Dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Mi Kota Semarang (Studi Kasus Di Mi Darul Ulum Wates Ngaliyan Dan Min Sumurrejo, Gunungpati)</p>	<p>Teori Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Kota Semarang</p>	<p>Implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran PAI di kedua sekolah tersebut mengalami kendala yang dilihat dari guru, siswa, sarana, maupun motivasi dan juga dilihat dari pedoman standar kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari problem tersebut juga terdapat solusi yang telah disesuaikan dengan problem-problem tersebut</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan penelitian saya, akan tetapi dengan permasalahan yang berbeda, Dalam penelitian saya meneliti kurikulum kesetaraan pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan mata pelajaran umum.</p>
9	Siti Mau'izatul Hasanah	<p>Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren <i>Salafiyah</i> Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren <i>Salafiyah</i> Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9</p>	<p>PPS Al-Amin, Nururssalam dan Tarbiyatul Furqan, belum menggunakan prinsip-prinsip manajemen (baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi) dalam tata kelola kurikulum; karena belum memiliki kurikulum secara tertulis, sehingga secara eksplisit belum</p>	<p>Penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan penelitian saya, dan mempunyai permasalahan penelitian yang juga hampir mirip, akan tetapi penelitian saya mendeskripsikan penerapan kurikulum kesetaraan dengan acuan SK dirjen</p>

				<p>ditetapkan tujuan pendidikan. Pondok Pesantren <i>Salafiyah</i> masih mengutamakan pengajian kitab kuning; yaitu kitab keagamaan klasik sebagai bahan ajar, namun fokus dan perhatian tetap mengacu pada pembinaan akhlak dan kemandirian. Sedangkan Pembelajaran beberapa mata pelajaran umum diberikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.</p>	<p>tahun 2018 pada pondok pesantren <i>Salafiyah</i> dan berfokus pada penerapan kurikulum mata pelajaran umum, kemudian mentelaah problem dari penerapannya serta mencari solusi dari permasalahan tersebut</p>
10	Ara Hidayat dan Eko Wahib	Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah <i>Salafiyah</i> Pondok Tremas Pacitan	Teori Kebijakan Pesantren Mu'adalah di Madrasah Aliyah <i>Salafiyah</i> Pondok Tremas Pacitan	<p>MA Pondok Tremas telah ditetapkan sebagai lembaga yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya oleh Kementerian Agama. Status lembaga pendidikan pesantren semakin kuat. Status mu'adalah pada MA <i>Salafiyah</i> Pondok Tremas tersebut menjadi pendorong untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya implementasi kurikulum mu'adalah dan peningkatan kompetensi guru</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan penelitian saya, akan tetapi memiliki masalah penelitian yang berbeda, dalam penelitian saya lebih berfokus kepada problem yang dihadapi pondok pesantren dalam penerapan kurikulum pendidikan umum pada kurikulum muadalah</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis, Tempat, Waktu Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dari data yang didapat akan mengungkap masalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹ Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menganalisis fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Penelitian ini menggunakan metode studi multi kasus/multi situs, karena Penelitian ini dilakukan di tiga pondok pesantren *salafiyah* di kabupaten Kotawaringin Timur yaitu di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin di kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman di kecamatan Pulau Hanaut, dan Pondok Pesantren Darul Aitam di kecamatan Ketapang. Waktu pelaksanaan penelitian ini dari bulan Agustus – bulan Oktober.

B. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa prosedur yang penulis lakukan, yaitu:

1. Tahapan pendahuluan, yaitu:
 - a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian
 - b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing

¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 100

- c. Membuat desain proposal Tesis
 - d. Mengajukan desain proposal Tesis ke Pascasarjana IAIN Palangka Raya untuk dikoreksi dan disetujui.
2. Tahapan persiapan
- a. Melaksanakan seminar proposal Tesis
 - b. Merevisi proposal Tesis yang berpedoman pada hasil seminar dan petunjuk dari dosen pembimbing
 - c. Mengajukan Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Pascasarjana IAIN Palangka Raya untuk kelancaran penelitian
 - d. Menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan disertai Surat Permohonan Izin Penelitian dari Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya
 - e. Menyiapkan teknik-teknik pengumpulan data berupa wawancara dan instrumennya, observasi, dan dokumentasi.
3. Tahapan pelaksanaan
- a. Melakukan wawancara kepada subjek dan informan serta melakukan observasi
 - b. Pengumpulan data-data di lapangan
4. Tahapan penyusunan laporan, terdiri dari:
- a. Pengolahan data-data yang telah diperoleh
 - b. Penganalisisan data
 - c. Mengajukan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan disetujui, selanjutnya siap diajukan untuk dipertanggung jawabkan di hadapan Tim Sidang Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

C. Teknik Penggalian Data

Teknik Penggalian Data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek dan informan melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (bahan-bahan yang ditulis tentang objek).

1. Metode Observasi

Penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan kesetaraan pada mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur. Sehingga bisa didapati data yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan observasi langsung dan tidak langsung, observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berfokus pada penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *Salafiyah*, pola pengembangan kurikulum keagamaan Islam yang menjadi ciri khas pondok pesantren, penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*, dan problem yang nampak dilapangan terkait penerapan kurikulum kesetaraan di pondok pesantren.

2. Metode Wawancara

Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat, penulis akan melakukan wawancara kepada orang yang bisa dimintai informasi mengenai

profil pondok pesantren yang bersangkutan, penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*, problem dalam penerapannya dan solusi dari problem yang ditemukan. Target wawancara penulis dalam penelitian ini adalah Pengasuh atau Kepala sekolah, waka kurikulum, pendidik dan santri. Berikut ini adalah sebuah kisi-kisi pertanyaan yang akan di gunakan penulis untuk melakukan wawancara yaitu:

- a. Bagaimana penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur?
- b. Apa saja problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur?
- c. Bagaimana solusi dari problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur?

Selain melakukan wawancara dengan pihak pondok pesantren, penulis juga akan mewawancarai staf kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang bersentuhan langsung dengan pengembangan dan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai setiap

tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa.

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai hasil penerapan kurikulum kesetaraan pada mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah*, muatan pembelajaran atau jadwal pembelajaran yang telah dijalankan di pondok pesantren *salafiyah*. Penulis juga akan mengambil beberapa foto yang berkaitan dengan penunjang penerapan kurikulum kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* dan juga meminta arsip terkait proses pembelajaran.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok dan data penunjang.

a. Data Pokok

Data berkenaan dengan penerapan kurikulum kesetaraan pada mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* yang terdiri dari:

- 1) Penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur
- 2) Problem dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur

- 3) Solusi dari Problem dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur

b. Data Penunjang

Data ini merupakan data pelengkap atau data penunjang dari data pokok yang berkenaan dengan deskripsi umum mengenai pondok pesantren *salafiyah* dalam penelitian yang meliputi:

- 1) Profil pondok pesantren
- 2) Surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam mengenai penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* yang bersumber dari kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur
- 3) Penerapan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* yang relevan
- 4) Usaha-Usaha yang diupayakan kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur dan pondok pesantren dalam penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*.

2. Sumber Data

Data-data tersebut diperoleh melalui sumber data yang terdiri dari:

- a. Hasil penelitian terdahulu mengenai pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* baik berupa Jurnal, artikel ataupun karya tulis ilmiah lainnya
- b. Subjek Penelitian, yaitu kepala sekolah atau penanggung jawab program atau pengasuh.

- c. Informan, yaitu waka kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan pondok pesantren, santri pondok pesantren serta staf kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- d. Dokumen, yaitu catatan atau arsip tertulis ataupun media yang berkaitan dengan kurikulum pondok pesantren dan penerapan kurikulum kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:²

1. Pengumpulan Data, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur.
2. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³ Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren

²Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16

³Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2008, h. 247

salafiyah se-Kotawaringin Timur direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

3. Penyajian Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁴ Penyajian data dilakukan untuk mempermudah penulis untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur.
4. Kesimpulan dan Verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵ Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penulis akan didukung oleh data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengabsahan Data

⁴*Ibid.*, h. 249

⁵*Ibid.*, h. 252

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.⁶ Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁷

Dalam menguji keabsahan data penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.⁸ Teknik triangulasi sumber digunakan penulis dengan melakukan wawancara bersama subjek penelitian dan beberapa informan di pondok pesantren, kemudian membandingkan hasil wawancara yang diperoleh, untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran informasi yang valid dan gambaran yang utuh mengenai kebenaran dari problem penerapan kurikulum mata pelajaran

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h. 330

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

⁹*Ibid.*,

umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawarigin Timur.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

a. Profil Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

Pondok pesantren Sabilal Muhtadin beralamat di Jalan Jaya Karet, Rt. 04, Rw. 02 No. 02, Desa Jaya Karet, kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah, Yayasan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin memiliki 4 Jenjang pendidikan sekolah antara lain: madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, madrasah Aliyah dan Madrasah *Salafiyah*, Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin memiliki luas tanah 6689,6 m² yang terdiri dari musholla, kantor, ruang tamu, ruang belajar, WC/kamar mandi, asrama, dapur santri, panggung, perumahan ustadz-ustadzah dan laboratorium komputer.¹

Ditinjau dari sudut pandang geografis, posisi Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin berada di bantaran sungai Mentaya desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan kabupaten Kotawaringin Timur. Di sekeliling lokasi pondok, masih banyak lahan-lahan pertanian masyarakat dan mayoritas pertanian adalah kelapa dan karet. Berdasarkan data penduduk terakhir yang didapat, jumlah penduduk yang tinggal di Desa Jaya Karet berjumlah 2520 jiwa dan 723 Kepala Keluarga. Secara umum

¹Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

kehidupan masyarakat yang ada di desa Jaya Karet, mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun dan masih tergolong penduduk yang berada pada strata perekonomian di bawah garis rata-rata/miskin.²

b. Sejarah Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

Sejarah membuktikan bahwa Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin merupakan lembaga pendidikan tertua di kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Samuda), dan bahkan merupakan pondok pesantren tertua di kabupaten Kotawaringin Timur. Pondok pesantren ini merupakan hasil swadaya masyarakat yang berkedudukan di Kayuara Laut, Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Pondok/Yayasan ini didirikan pada tahun 1969, kala itu masih berbentuk Madrasah Diniyah dan belum memiliki asrama. Adapun santrinya, selain dari dalam daerah, juga ada yang dari luar daerah, tetapi mereka ditempatkan pada keluarganya atau dititipkan kepada masyarakat yang mau menampungnya.

Pada tahun 1972 diteruskan menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan tahun 1977 mulai terdaftar hingga pada tahun ajaran 1979/1980 pertama kalinya mengikuti ujian dan setelah mereka lulus, mereka langsung dikirim ke Pondok Pesantren “Ibnul Amin” yang ada di desa Pemangkih, Kalimantan Selatan. Adapun santri yang tidak mampu dalam masalah biaya, mereka langsung berhenti (tidak melanjutkan pendidikan).

²Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

Tahun 1980, di MI tersebut didatangkan beberapa ustadz yang dipimpin oleh K. H. Muhammad Yusuf untuk mengasuh sebuah pondok pesantren yang baru yakni mendirikan pesantren baru dan juga asramanya. Akan tetapi, K. H. Muhammad Yusuf memimpin di pesantren tersebut tidak berjalan lama, karena pada tahun 1982, beliau mendapat musibah tenggelam di laut dan tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, diteruskan oleh K. H. Zainuri HB, seorang alumni Madrasah Diniyah Sabilal Muhtadin yang baru pulang dari tanah suci Mekkah dan beliau mengasuh sampai sekarang.³

c. Visi Misi Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

1) Visi

Membentuk peserta didik yang berprestasi dalam sains dan teknologi, serta berkepribadian unggul sehingga mampu bersaing di era globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah.

2) Misi

- a) Menciptakan lebih banyak generasi pencinta dan penghafal al-Qur'an.
- b) Menciptakan sarana dan lingkungan pondok pesantren yang mendorong peserta didik menjadi pribadi bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, menguasai iptek dan beramal soleh sehingga terbentuk generasi bangsa yang berkarakter islami berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah

³Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

- c) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, bersih, tertib, aman, asri, dan nyaman.
- d) Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik.⁴

d. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin didapatkan sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin sebagai berikut:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin⁵

No	Nama/Jenis	Jumlah	Keadaan
1	Mushalla	1	Baik
2	Kantor	1	Baik
3	Ruang Tamu	1	Baik
4	Ruang Belajar	6	Baik
5	Kamar Mandi	5	Baik
6	Asrama	2	Baik
7	Rumah Ustadz	7	Baik
8	Dapur Umum	1	Baik
9	Panggung	1	Baik

⁴Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

⁵Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

10	Lab Komputer	1	Baik
----	--------------	---	------

e. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Sabil Muhtadin

Dalam kepengurusan di Pondok Pesantren Sabil Muhtadin diadakan reorganisasi selama 5 tahun sekali dengan dilakukan rapat bersama-sama pihak yayasan untuk menentukan kepengurusan yang baru. Kepengurusan Pondok Pesantren Sabil Muhtadin sebagai berikut:⁶

Tabel 4. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Sabil Muhtadin⁷

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Zaky Mubarak, S. HI	S1 Sayri'ah	Ketua
2.	Samiri	PP Sabilal Muhtadin	Bendahara
3.	Iqlima, S.Pd	S1 Pendidikan	Administrasi/ Tata Usaha
4.	H. Siswanto	PP Sabilal Muhtadin	Wk. Kurikulum
5.	Muamar	PP Sabilal Muhtadin	Wk. Kesantrian
6.	Rustam Effendy	PP Sabilal Muhtadin	Wk. Sarpras
7.	Sugiannur, S.Ag	S1 Tafsir Hadis	Wali Santri Putra
8.	Firda Fahriani	PP Sabilal Muhtadin	Wali Santri Putri
9.	Firda Mihyati	PP Sabilal Muhtadin	Wali Santri Putri

f. Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Sabil Muhtadin

⁶Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

⁷Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

Dalam melaksanakan pembelajaran pasti ada tenaga pendidik untuk mengajarkan atau menularkan ilmunya. Berikut tenaga pendidik di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin:

Tabel 5. Data Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin⁸

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Samiri	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
4.	H. Siswanto	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
5.	Muamar	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
6.	Rustam Effendy	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
7.	Sugiannur, S.Ag	S1 Tafsir Hadis	Pengajar
8.	H. M. Makki	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
9.	Abdul Qasim	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
10.	Ruslan	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
11.	Ali Muhyiddin	PP Karangmangu	Pengajar
12.	Muhassin	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
13.	Muhammad	PP Darussalam	Pengajar
14.	Syarwani	PP Sabilal Muhtadin	Pengajar
15.	Saibatul Hamdi, S.Pd	S1 Pendidikan	Pengajar Mata Pelajaran Umum
16.	Iqlima, S.Pd	S1 Pendidikan	Pengajar Mata Pelajaran Umum

⁸Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

17.	Anis Wahdati	S1 Pendidikan	Pengajar Mata Pelajaran Umum
-----	--------------	---------------	------------------------------

Dari tabel tenaga pengajar di atas terdapat 3 orang tenaga pendidikmata pelajaran umum yaitu bapak Saibatul Hamdi, S.Pd merupakan tenaga pengajar di madrasah aliyah dan mengajar di *salafiyah* pada jenjang *wustha* kelas 8, ibu Iqlima, S.Pd dan ibu Anis Wahdati, S.Pd yang merupakan tenaga pengajar madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah dan mengajar di kelas *salafiyah* pada jenjang kelas 7 secara bergantian.⁹

g. Keadaan Santri Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin terdiri dari empat jenjang pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah *Salafiyah*. Madrasah *Salafiyah* atau sekarang yang dikenal dengan pondok pesantren *salafiyah* berdiri paling awal diantara madrasah yang lain, pondok pesantren *salafiyah* (PPS) merupakan alternatif bagi santri yang memang ingin fokus memperdalam pelajaran agama, sehingga santri di PPs memang memiliki karakter yang homogen. Awalnya santri di PPs memang tidak lebih banyak dari Madrasah Tsanawiyah dikarenakan ijazah lulusannya bukan ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau pun Kementerian Agama, sehingga minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke PPs sangat kurang.¹⁰

⁹Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin September 2020

¹⁰Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

Sekarang pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* Sabilal Muhtadin di tingkat *wustha* sudah meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. Hingga pada ajaran tahun 2020/2021 ini jumlah semua santri ada 238 yang terdiri dari santri putra dan putri, dari semua santri ada 117 santri yang mengikuti pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* yang terdiri dari kelas 7, 8 dan 9.¹¹

h. Kegiatan Santri Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

Kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin rutin pada setiap harinya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh semua santri pondok pesantren, dan beberapa kegiatan amaliyah yang membedakan kegiatan santri putra dan putri, kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren Sabilal Muhtadin yaitu sebagai berikut.

Tabel 6. Rutinitas Santri Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin¹²

NO	Kegiatan	Waktu
1.	Bangun tidur, mandi, dan shalat tahajjud	03.00 – 04.00
2.	Shalat subuh berjama'ah dan membaca wirid shalat, serta membaca wurdullatif	04.00 – 05.00
3.	Menerima pelajaran setelah shalat subuh / Ziarah	05.00 – 05.45
4.	Sarapan pagi dan bersiap masuk ke kelas	06.00 – 06.30

¹¹Dokumentasi sumber data Admin TU PPs. Sabilal Muhtadin, 27 September 2020

¹²Dokumentasi sumber data Pengelola Asrama PPs. Sabilal Muhtadin, 4 Oktober 2020

5.	Masuk kelas menerima pelajaran	06.30 – 10.30
6.	Persiapan shalat zhuhur berjama'ah/Khailullah	10.30 – 11.30
7.	Shalat zhuhur berjama'ah dan membaca wirid shalat	11.30 – 12.00
8.	Makan siang dan istirahat	12.00 – 13.00
9.	Murajaah kitab/Ekstrakurikuler (Kaligrafi/Syarhil)/ Mengaji/Setor Hafalan (Program Tahfidz)	13.00 – 14.30
10.	Persiapan shalat Ashar	14.30 – 14.45
11.	Shalat Ashar berjama'ah dan membaca wirid shalat	14.45 – 15.15
12.	Menerima pelajaran setelah shalat Ashar	15.15 – 16.15
13.	Istirahat (olahraga)	16.15 – 17.00
14.	Persiapan Shalat Magrib (Mandi sore dll)	17.00 – 17.30
15.	Shalat Magrib berjama'ah dan membaca wirid shalat Magrib	17.30 – 18.00
16.	Tadarus/ Maulid Al-Habsy/ Maulid Diba (Menyesuaikan Jadwal Kegiatan)	18.00 – 18.45
17.	Shalat Isya' berjama'ah	18.45 – 19.15
18.	Makan Malam	19.15 – 20.00
19.	Muhadharah/ Burdah/ Belajar Kelompok	20.00 – 21.00

	(Menyesuaikan Jadwal)	
20.	Tidur / istirahat	21.0 – 03.00

Dari rutinitas santri di atas, ada dua kali pembelajaran wajib, yaitu pada pagi hari dari jam 07.00 – 10.30 dan pada sore hari dari jam 15.15 – 16.15. Waktu pembelajaran di pagi hari diisi dengan 3 mata pelajaran dan pada sore hari diisi dengan 1 mata pelajaran.

2. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

a. Profil Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman beralamat di Jalan Bapinang Pegatan Rt.03 Rw.01, Desa Babaung, kecamatan Pulau Hanaut, kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah. Berdiri pada tahun 2000 dengan tanah wakaf seluas 500m² dan luas bangunan mencapai 300m² yang terdiri dari musholla, kantor, ruang tamu, ruang belajar, WC/kamar mandi, asrama, peenggrahan, perumahan ustadz-ustadzah dan rumah pengasuh. Yayasan Tahfidzul Qur'an Darul Iman memiliki 3 Jenjang pendidikan sekolah antara lain: Tempat Pembelajaran Qur'an (TPQ), Madrasah Ibtidaiyah, dan Pondok Pesantren *Salafiyah (wustha)*. Pada jenjang *wustha* para santri mempelajari kitab kuning, selain itu juga dijalankan program menghafal al-Qur'an (tahfiz) untuk menunjang program tersebut pengasuh mewajibkan seluruh santri *salafiyah* tinggal di asrama.¹³

¹³Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

b. Sejarah Berdirinya PPs. Tahfidz Qur'an Darul Iman

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman Desa Bebaung awal mula berdirinya pada tahun 2000 digagas oleh Abah H. Agan Abdurrahim, beliau mendirikan Tempat Pengajian Al-Qur'an sehabis zuhur, TPA ini didirikan memang untuk diniatkan agar dijalankan oleh pengasuh pondok pesantren Darul Iman yaitu Anang Ahmad S.Pd. Sampai pada tahun 2007 melihat latar belakang santri yang ikut mengaji sebagian besar tamat SD dan tidak melanjutkan sekolah, sehingga tercetuslah pemikiran untuk membangun pesantren sebagai wadah santri yang putus sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan agama Islam, pada tahun tersebut mulai penamaan pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 5 orang. Setelah satu tahun pondok pesantren berjalan telah menarik perhatian banyak masyarakat, sehingga Pondok Pesantren Darul Iman didorong untuk mendirikan asrama.

Atas dorongan dari masyarakat, pengasuh bergegas untuk mengusulkan bantuan asrama untuk pondok pesantren. Dengan bantuan dari H. Fauzan Nurdin selaku Kesra Kotawaringin Timur dan KH. Zainuri HB sebagai Anggota DPRD pada waktu itu, sehingga bantuan asrama bisa direalisasikan. Dengan adanya asrama peminat santri di pondok pesantren tiap tahun semakin meningkat. Melihat minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren inilah sehingga mengukuhkan niat pengasuh untuk mengembangkan Pondok Pesantren Darul Iman.

Pondok Pesantren Darul Iman didirikan di desa Babaung, kecamatan Pulau Hanaut, letaknya bertepatan di seberang Pasar Samuda, didirikannya pondok pesantren di Desa Babaung dengan tujuan agar hidup kembali nuansa Islam di desa tersebut. Hingga pada saat ini sudah banyak santri terdaftar di pesantren untuk mempelajari kitab kuning dan bersamaan muncul pula santri yang berminat untuk mendalami dan menghafal al-Qur'an. Agar santri fokus dalam pembelajaran pengasuh memutuskan agar dibagi dua pembedangan pembelajaran yaitu pembelajaran kitab kuning dan pembelajaran menghafal Al-Qur'an.

Pondok Pesantren Darul Iman berdiri mulanya dengan jenjang *wustha*/SMP/MTS/Sederajat. Setelah berjalannya jenjang *wustha* ternyata banyak peserta didik yang tidak tamat SD namun ingin masuk pondok pesantren, sehingga pengasuh memutuskan untuk membuka jenjang *ula*, namun kurangnya pengetahuan masyarakat dengan jenjang pendidikan *ula* sehingga pengasuh mengubah izin operasional dari *ula* menjadi madrasah ibtidaiyah, dan saat ini telah diadakan pula jenjang *Ulya*/SMA/MA/Sederajat yang masih menunggu izin operasional dari Kementerian Agama.¹⁴

c. Visi Misi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

1) Visi

¹⁴Dokumentasi sumber data Pengasuh PPs. Tahfidzul Qur'an, 28 September 2020

Membentuk santri yang berakhlakul karimah sebagai cikal bakal untuk mengajak umat beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mengutamakan sikap disiplin, bijaksana, mampu menghadapi tantangan zaman, tanpa meninggalkan nilai keIslaman

2) Misi

- a) Menciptakan lebih banyak generasi pencinta dan penghafal al-Qur'an.
- b) Menciptakan sarana dan lingkungan pondok pesantren yang mendorong peserta didik menjadi pribadi bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, menguasai iptek dan beramal soleh sehingga terbentuk generasi bangsa yang berkarakter islami berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah
- c) Menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman, bersih, tertib, aman, asri, dan nyaman.
- d) Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik.¹⁵

d. Sarana Prasarana Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman didapatkan sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman sebagai berikut:

**Tabel 7. Sarana dan Prasarana
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman¹⁶**

¹⁵Dokumentasi sumber data sekretaris PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

¹⁶Dokumentasi sumber data sekretaris PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

No	Nama/Jenis	Jumlah	Keadaan
1	Mushalla	1	Baik
2	Kantor	1	Baik
3	Ruang Kelas	4	Baik
4	Asrama	5	Baik sebagian
5	Kamar Mandi	9	Baik
6	Rumah Ustadz	3	Baik
7	Panggung	1	Baik

e. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul

Iman

Dalam kepengurusan diadakan reorganisasi jika ada kepengurusan yang mengundurkan diri, keluar dari kepengurusan atau lembaga. Kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman sebagai berikut:¹⁷

Tabel 8. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman¹⁸

No	Nama	Jabatan
1	Anang Ahmad, S.Pd	Pimpinan/Pengasuh
2	Muhammad Hafidz	Sekretaris
3	Qurratul Aini, S.Pd	Bendahara

¹⁷Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

¹⁸Dokumentasi sumber data sekretaris PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

4	Ahmad Fauzan	Seksi Usaha Dana
5	Abdul Dedet	Seksi Usaha Dana
6	Syahruji	Seksi Usaha Dana
7	Mahdul Habib	Seksi Usaha Dana
8	Zainudin	Pembantu Umum
9	Fahrul	Pembantu Umum
10	Siti Khairiyah	Pembantu Umum
11	Norma Sela	Pembantu Umum

f. Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Dalam melaksanakan pembelajaran pasti ada tenaga pendidik untuk mengajarkan atau menularkan ilmunya. Berikut tenaga pendidik di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman:

**Tabel 9. Data Tenaga Pendidik
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman¹⁹**

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Anang Ahmad S.Pd	S1 Pendidikan	Pimpinan
2.	M. Badarudin	SLTA	Guru Tetap
3.	Anang Setiawan	SLTA	Guru Tetap
4.	Abdurrahim Hasan	SLTA	Guru Tetap
5.	M. Irwan	SLTP	Guru Tetap
6.	Fahrurraji	SLTP	Guru Tetap

¹⁹Dokumentasi sumber data sekretaris PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

7.	Zainudin	SLTA	Guru Tetap
8.	Sayuti Malik	SLTA	Guru Tetap
9.	Qurratul Aini, S.Pd	S1 Pendidikan	Guru Tetap
10.	Asliyah	SLTA	Guru Tetap
11.	Nur Inayah	SLTA	Guru Tetap
12.	Salbiyah	SLTA	Guru Tetap
13	Antariksawan, SP	S1 Pertanian	Guru Tetap

Dari tabel di atas hampir keseluruhannya adalah tenaga pendidik pada kurikulum keagamaan Islam hanya bapak Antariksawan, SP sebagai guru kurikulum mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul.

g. Keadaan Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Awalnya santri pada pondok pesantren ini hanya mengaji atau belajar ilmu agama, tetapi setelah ditetapkannya pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* santri yang belum tamat SMP/MTs bisa mengikuti program ini. Awal tahun diselenggarakannya pendidikan kesetaraan ada dua jenjang yang didaftarkan, yaitu *ula* dan *wustha* namun akhirnya *ula* di tutup dan didaftarkan ke MI.

Hingga sekarang pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* di tingkat *wustha* masih terlaksana. Dari tahun ke tahun jumlah santri bertambah banyak. Awalnya sebelum terselenggara pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* di Tahfidzul Qur'an Darul Iman jumlah santri

yang ada tidak mencapai 50. Setelah adanya pendidikan kesetaraan tersebut jumlah santri dari tahun ke tahun meningkat hingga saat ini.²⁰

Pada tahun 2020/2021 ini jumlah semua santri ada 175 terdiri dari santri putra dan putri, yang mengikuti pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* yang terdiri dari kelas 7, 8 dan 9.²¹

h. Kegiatan Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman rutin pada setiap harinya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh semua santri pondok pesantren, baik santri putra ataupun santri putri. Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman yaitu sebagai berikut.

Tabel 10. Rutinitas Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman²²

NO	Kegiatan	Waktu
1.	Bangun tidur, mandi, dan shalat tahajjud	03.00 – 04.00
2.	Shalat subuh berjama'ah dan membaca wirid shalat, serta membaca wurdullatif	04.00 – 05.30
3.	Pengajian Kitab	05.30 – 06.30
4.	Sarapan pagi dan bersiap masuk ke kelas	06.00 – 07.30

²⁰Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 23 September 2020

²¹Dokumentasi sumber data sekretaris PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

²²Dokumentasi sumber data sekretaris PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 27 September 2020

5.	Masuk kelas menerima pelajaran	07.30 – 11.00
6.	Persiapan shalat zhuhur berjama'ah/Khailullah	10.30 – 11.30
7.	Shalat zhuhur berjama'ah dan membaca wirid shalat	11.30 – 12.00
8.	Makan siang dan istirahat	12.00 – 13.00
9.	Muzakarah Mandiri/Istirahat	13.00 – 14.30
10.	Persiapan shalat Ashar	14.30 – 14.45
11.	Shalat Ashar berjama'ah dan membaca wirid shalat	14.45 – 15.15
12.	Menerima pelajaran setelah shalat Ashar	15.15 – 16.15
13.	Istirahat (olahraga)	16.15 – 17.00
14.	Persiapan Shalat Magrib (Mandi sore dll)	17.00 – 17.30
15.	Shalat Magrib berjama'ah dan membaca wirid shalat Magrib	17.30 – 18.00
16.	Tadarus	18.00 – 18.45
17.	Shalat Isya' berjama'ah	18.45 – 19.15
18.	Muhadharah/ Burdah/ Maulid Habsyi/Muzakarah	19.15 – 20.30
19.	Makan malam	20.30 – 21.30
20.	Tidur / istirahat	21.30 – 03.00

Dari rutinitas santri di atas, ada dua kali pembelajaran wajib, yaitu pada pagi hari dari jam 07.30 – 11.00 dan pada sore hari dari jam 15.15 –

16.15. waktu pembelajaran di pagi hari diisi dengan 3 mata pelajaran dan pada sore hari diisi dengan 1 mata pelajaran.

3. Pondok Pesantren Darul Aitam

a. Profil Pondok Pesantren Darul Aitam

Pondok pesantren Darul Aitam beralamat di Jalan H.M. Arsyad – Teratai IV (Jl. Suprpto Selatan) kelurahan Ketapang, kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah merupakan panti asuhan sekaligus pondok pesantren *salafiyah* dengan luas tanah 6.920 m² yang terdiri dari musholla (masjid), kantor, ruang tamu, ruang belajar, kios, WC/kamar mandi, asrama, ruang masak, ruang makan, pasenggrahan, pos piket dan kamar tidur tamu. Panti asuhan ini telah berdiri sejak tahun 1998 dikenal dengan nama Panti Asuhan Putra Borneo dan pondok pesantren mulai beroperasi sejak tahun 2006 dengan nama Pondok Pesantren Darul Aitam.²³

b. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Aitam

Pada awal bulan Agustus 1997 bersepakat beberapa orang warga Jalan Teratai II untuk mendirikan musholla, kemudian warga bersilaturahmi kepada pemilik tanah yaitu Abdurrahim yang dikenal warga sekitar dengan panggilan “Kai Bunut” yang beralamat di Jalan Teratai IV yang dulu hanya ada badan jalan saja sampai pada masa jabatan Bupati Kotawaringin Timur

²³Observasi di Pondok Pesantren Darul Aitam, 12 September 2020

Didik Salmiyardi jalan mulai diperbaiki sehingga akses jalan menuju Panti Asuhan Putra Borneo menjadi lebih mudah.

Selanjutnya warga bermusyawarah di rumah Drs. Cecep Sumantri, dan hasil musyawarah menghasilkan kesepakatan antara warga dengan Kai Bunut yang akan meghibahkan tanah seluas 40m x 40m untuk dibangun Musholla, tanah tersebut bertepatan di belakang rumah pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam yakni KH. Muhammad Yusuf. Setelah pembangunan musholla selesai, warga meminta untuk diadakan pengajian kitab kuning yang disampaikan KH. Muhammad Yusuf.

Sebelum mulai mengadakan pengajian pada awal bulan Februari 1998 terlebih dahulu KH. Muhammad Yusuf menghubungi guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari (Guru Sekumpul) untuk memohon restu dan izin mengadakan pengajian kitab, kemudian dijawab oleh Guru Sekumpul “tidak usah mengadakan majelis pengajian kitab kuning, biar orang lain saja yang aku kirim untuk membuka majelis pengajian kitab, kamu cukup memelihara yang ada di rumah itu aja” yang dimaksud oleh Guru Sekumpul adalah anak yatim piatu yang tinggal di rumah KH. Muhammad Yusuf. Perkataan dari Guru Sekumpul pun diindahkan oleh KH. Muhammad Yusuf, sampai akhirnya beliau mendirikan panti asuhan.

Berdasarkan kesepakatan warga di rumah Drs. Cecep Sumantri (polisi) Panti Asuhan yang didirikan oleh KH. Muhammad Yusuf diberi nama “Putra Borneo”, kemudian pada bulan Juni 2006 dari pihak

Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur pada waktu itu dikepalai bapak Hairuddin Halim meminta untuk didirikan pondok pesantren yang diberi nama dari hasil kesepakatan bersama dengan sebutan Pondok Pesantren “Darul Aitam”. Panti asuhan sekaligus pondok pesantren ini tidak dipungut biaya sama sekali (gratis), melihat perkembangan pondok pesantren akhirnya pemilik tanah mewaqafkan kembali tanahnya sehingga Pondok Pesantren Darul Aitam memiliki luas tanah 40m x 173 m.²⁴

c. Visi Misi Pondok Pesantren Darul Aitam

1) Visi

Terbangunnya citra positif dan terjalinnya rasa setia kawan dalam kebersamaan dalam wadah Pondok Pesantren yang efektif menuju jalan yang diridhoi Allah dengan kemandirian, kreatif berdedikasi tinggi dalam mencapai tujuan mulia selaku hamba Allah

2) Misi

- a) Menjadikan santri mampu hidup mandiri dengan membawa jiwa agamis, memiliki keilmuan yang matang dalam berbaur dalam masyarakat.
- b) Menjadikan santri bermental kuat, Iman dan Takwa dalam menghadapi globalisasi, agar mampu bersaing dengan lajunya komunikasi berlandaskan kepribadian mulia atau berakhlakul karimah dengan beramal sholeh serta munajat kepada Allah semata.

²⁴Dokumentasi sumber data Pengasuh PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

- c) Menjadikan santri panutan, figur cerdas yang handal dalam memimpin masyarakat dari segala bidang syariat keagamaan.²⁵

d. Sarana Prasarana Pondok Pesantren Darul Aitam

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis di Pondok Pesantren Darul Aitam didapatkan sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Darul Aitam sebagai berikut:

Tabel 11. Sarana Prasarana Pondok Pesantren Darul Aitam ²⁶

No	Nama/Jenis	Jumlah	Keadaan
1.	Masjid	1	Baik/sedang dalam Penyelesaian
2.	Kantor	1	Baik
3.	Ruang Tamu	1	Baik
4.	Ruang Kelas	3	Baik
5.	Kios	1	Baik
6.	WC/Kamar Mandi	2	Rusak/sedang dalam perbaikan
7.	Kamar Mandi	2	Rusak/sedang dalam perbaikan
8.	Asrama	1	Rusak/perlu perbaikan
9.	Asrama	1	Baik
10.	Asrama Ustadz	2	Rusak/sedang dalam perbaikan
11.	Ruang Masak	1	Baik
12.	Ruang Makan	1	Baik

²⁵Dokumentasi sumber data Pengasuh PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

²⁶Dokumentasi sumber data Pengasuh PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

13.	Pasenggrahan	2	Baik
14.	POS Piket	1	Baik
15.	Kamar tidur tamu	1	Baik

e. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Aitam

Dalam kepengurusan diadakan reorganisasi jika ada kepengurusan yang mengundurkan diri, keluar dari kepengurusan atau lembaga. Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Aitam sebagai berikut:²⁷

Tabel 12. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Aitam ²⁸

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	KH. Muhammad Yusuf Al-Hudromy, MA	S2 Manajemen	Ketua/Pengasuh
2.	Muhammad Wiyadi, WS	Pontren Jombang	Wk. Pengasuh I
3.	S. Muhsien Yus Al-Hudromy, SHI	S1 Syari'ah	Wk. Pengasuh II
4.	Hj. Fathul Jannah	SLTA	Bendahara
5.	Furnama Sari	SLTP	Bagian Masak
6.	Salasiah	MAN Kandangan	Bagian masak
7.	Fitiyana Hikmah	D1 Komputer	Administrasi
8.	Joko Siswanto	STM	Administrasi
9.	M. Arsyad	SLTA	Administrasi

²⁷Observasi di Pondok Pesantren Darul Aitam, 12 September 2020

²⁸Dokumentasi sumber data Pengasuh PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

10.	Muhammad	SLTA	Administrasi
11.	Gina Mardhiyah, S.Kom	S1 Komputer	Bagian Umum
12.	Yuda	SLTA	Bagian Umum
13.	Emilia	SLTA	Bagian Umum
14.	Ahmad Subhan	PP Darul Aitam	Bagian Umum
15.	Zakaria	PP Darul Aitam	Bagian Umum
16.	Rama	PP Darul Aitam	Bagian Umum
17.	Ahmad Fauzan	PP Darul Aitam	Bagian Umum
18.	M. Ilham	PP Darul Aitam	Bagian Umum

f. Tenaga pengajar Pondok Pesantren Darul Aitam

Dalam melaksanakan pembelajaran pasti ada tenaga pendidik untuk mengajarkan atau menularkan ilmunya. Berikut tenaga pendidik di Pondok Pesantren Darul Aitam:

Tabel 13. Data Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Darul Aitam²⁹

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Ahmad Rizani	PP Darussalam	Pengajar
2.	Nordiansyah	MAN Kandangan	Pengajar
3.	Syarifuddin	PP Darul Aitam	Pengajar
4.	Ahmad sairi	PP Darussalam	Pengajar
5.	Ahmad Yamani	PP Darussalam	Pengajar

²⁹Dokumentasi sumber data Pengasuh PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

6.	Hj. Fathul Jannah	SLTA	Pengajar
----	-------------------	------	----------

Ada enam tenaga pengajar di pondok pesantren Darul Aitam, dan dari keenam tenaga pengajar tersebut merupakan guru pengajar pendidikan Agama Islam, dan tidak ada guru pengampu mata pelajaran umum.

g. Keadaan Santri Pengajar Pondok Pesantren

Pondok pesantren Darul Aitam ini awalnya sebuah panti asuhan yang sudah berdiri sejak tahun 80 an, sebagai sebuah panti asuhan tentu juga bertanggung jawab akan pendidikan anak asuhnya. Pengasuh ingin anak santrinya dibina langsung oleh beliau sehingga didaftarkan pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* agar mereka mendapatkan ijazah kesetaraan sehingga anak asuh beliau bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengingat pendidikan kesetaraan di pondok pesantren hanya ada dua jenjang yaitu *ula* dan *wustha*.³⁰

Setelah terdaftar dalam program kesetaraan santri di pondok pesantren Darul Aitam meningkat dari tahun ke tahun, sekarang sudah ada 82 santri di Pondok Pesantren Darul Aitam dan semuanya adalah santri putra yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah seperti Sampit, Ketapang, Baamang, Cempaka, Trantang, Patai, Sungai Paring, Ramban, Jemaras, Kota Besi, Tumbang Samba, dan ada 2 orang dari provinsi Kalimantan Selatan.³¹

h. Jadwal Kegiatan/Rutinitas Santri

³⁰Observasi di Pondok Pesantren Darul Aitam, 12 September 2020

³¹Dokumentasi sumber data Tenaga Pengajar PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

Kegiatan yang ada di pondok pesantren darul Aitam rutin pada setiap harinya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh semua santri pondok pesantren, kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Aitam yaitu sebagai berikut.

Tabel 14. Rutinitas Harian Santri Pondok Pesantren Darul Aitam³²

No	Kegiatan	Waktu
1.	Bangun Tidur	03.30
2.	Mandi + Persiapan Sholat Subuh	03.30 – 04.00
3.	Sholat Subuh Berjamaah + Wirid + Kultum	04.00 – 05.30
4.	Membersihkan Lingkungan Pesantren dan Asrama	05.30 – 07.00
5.	Sholat Dhuha Berjamaah	07.00 – 07.30
6.	Makan Pagi	07.30 – 08.30
7.	Kegiatan Belajar	08.30 – 11.00
8.	Shalat Dzuhur Berjamaah	11.00 – 12.00
9.	Makan Siang	12.00 – 13.00
10.	Istirahat (Tidur Siang)	13.00 – 14.20
11.	Sholat Ashar Berjamaah	14.20 – 15.30
12.	Kegiatan Belajar	15.30 – 16.30

³²Dokumentasi sumber data Teaga Pengajar PPs. Darul Aitam, 12 September 2020

13.	Membersihkan Lingkungan Pesantren dan Asrama + Mandi	16.30 – 17.20
14.	Sholat Magrib Berjamaah + Wirid + Amaliyah + Shalat Isya Berjamaah	17.20 – 19.30
15.	Kegiatan Belajar	19.30 – 21.00
16.	Makan Malam	21.00 – 22.00
17.	Tidur	22.00

Jadwal kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari bahkan hari libur seperti hari minggu atau jum'at pun dilakukan kegiatan yang sama. Terlihat dari rutinitas kegiatan di atas, pondok pesantren Darul Aitam sangat mengutamakan kebersihan, hal ini bisa dirasakan penulis ketika berkunjung ke pondok pesantren, santri terlihat sigap memungut ketika melihat sampah, dan terlihat juga ketika penulis mengambil beberapa dokumentasi ada santri yang sedang membersihkan lingkungan diwaktu istirahat mereka. Ada tiga kali pembelajaran wajib, yaitu pada pagi hari dari jam 08.30 – 11.00, pada sore hari dari jam 15.30 – 16.30 dan pada malam hari dari jam 19.30 – 21.00.

B. Penyajian Data

1. Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* se-Kotawaringin Timur

a. Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin

Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin mengadakan jalur pendidikan nonformal yakni pendidikan kesetaraan *salafiyah* tingkat *wustha*, program yang setara dengan pendidikan formal SMP/MTS. Alasan dibentuknya pendidikan kesetaraan yaitu untuk mengikuti zaman saat ini yang tidak lepas dari pengetahuan umum yang semakin maju, serta mengikuti program yang diadakan oleh Kementerian Agama.

Setelah adanya pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin lambat laun jumlah santri di pondok pesantren meningkat dan dengan adanya mata pelajaran umum santri lebih mempunyai rasa percaya diri dalam hal pengetahuannya. Seperti yang dikatakan oleh ZM selaku penanggung jawab pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin:

Dengan diadakannya pendidikan kesetaraan, santri yang ada di pondok pesantren pun lebih meningkat, lebih dari tahun-tahun sebelumnya, selain pengetahuan mereka meningkat, *mindset* mereka juga sudah berubah, sebelum diadakannya pembelajaran mata pelajaran umum, pola pikir mereka hanya mengaji kitab-kitab kuning saja, setelah mereka lulus ijazah mereka pun karena memang masih ijazah pondok maka kepercayaan diri mereka begitu kurang dibandingkan anak-anak yang sekolah umum lain, akan tetapi setelah adanya pendidikan kesetaraan, Alhamdulillah meningkat dalam segala hal, yang pastinya dari segi pengetahuan, dan kedua pola pikir mereka juga, dan rasa percaya diri mereka juga bertambah, dan yang

lebih utama bagi kami khususnya pengelola, setiap tahun itu jumlah santri makin meningkat.³³

Tenaga pendidik yang ada di pendidikan kesetaraan pondok pesantren Sabilal Muhtadin mayoritas dari alumni, sedangkan untuk tenaga pendidik mata pelajaran umum juga merupakan alumni yang sudah menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mereka merupakan tenaga pendidik yang direkrut di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, kemudian diminta untuk membantu mengajarkan mata pelajaran umum di Madrasah *Salafiyah*.³⁴ SH yang menyatakan alasannya mau mengajar mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* sebagai berikut:

Alasan saya mau mengajar di pendidikan kesetaraan pondok pesantren Sabilal Muhtadin adalah karena, pertama saya turut prihatin dengan keadaan, guru yang masih minim, karena masih kekurangan tenaga pengajar disini, jadi banyak guru yang mengajar di MTs dan di Aliyah tetapi untuk dipesantren mata pelajaran umumnya masih sedikit, sehingga saya turut membantu dalam pembelajaran di pondok pesantren.³⁵

Tenaga pendidik dipondok pesantren *salafiyah* Sabilal Muhtadin terdiri dari 3 orang dan mengajarkan enam mata pelajaran. Enam mata pelajaran tersebut yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS. Dengan jumlah tenaga pendidik yang ada otomatis ada yang mengampu beberapa mata pelajaran sehingga masuk secara bergantian setiap minggunya, ada juga yang mengampu sekaligus

³³Wawancara bersama ZM di Jaya Karet, 21 September 2020

³⁴Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

³⁵Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

enam mata pelajaran umum yang ada namun hanya mengajar khusus untuk satu kelas.³⁶

Kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin menggunakan kurikulum yang ada di daerah sekitar yaitu daerah kabupaten Kotawaringin Timur, dengan menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Kurikulum 2013. Dengan mengikuti kurikulum di daerah sekitar diharapkan siswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama dengan yang lainnya. Ketika ujian nasional pun siswa mendapatkan bekal untuk mengerjakannya. Tetapi karena waktu yang terlalu sedikit untuk kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan kesetaraan maka materi tidak dapat tersampaikan secara maksimal.³⁷

Pembelajaran mata pelajaran umum yang ada di pondok pesantren dilakukan secara bergantian dalam setiap minggunya sehingga untuk mempelajari seluruh mata pelajaran yang ada diperlukan waktu 6 minggu. Meskipun memerlukan waktu lebih lama untuk santri dapat menerima materi dari semua mata pelajaran yang ada namun dengan waktu yang ada sudah dirasa cukup oleh tenaga pendidik untuk santri dapat menerima mata pelajaran umum di pondok pesantren seperti yang diutarakan AW berikut:

Sistem sekolah kami menyediakan waktu untuk pelajaran umum hanya satu kali pertemuan untuk setiap minggunya, waktu yang diberikan pondok pesantren untuk pendidikan umum ini sudah cukup menurut saya, karena pembelajaran pondok tetap lebih kami utamakan.³⁸

³⁶Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

³⁷Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

³⁸Wawancara bersama AW di Jaya Karet, 03 Oktober 2020

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah diatur oleh guru pengampu mata pelajaran sehingga memang pihak pengelola pondok pesantren menyerahkan penuh kepada guru pengampu mata pelajaran umum. Namun tidak semua santri mengikuti kegiatan mata pelajaran umum, karena di pondok pesantren *salafiyah* Sabilal Muhtadin terdapat 3 penjenjangan yaitu, *wustha*, *Ulya*, dan santri yang tingkatan kitabnya lebih tinggi, sehingga ada sebagian kelas yang memang dijadwalkan dengan mata pelajaran lain, seperti pernyataan SH berikut:

Dikarenakan adanya kurikulum mata pelajaran umum baru beberapa tahun terakhir ini jadi yang mengikuti mata pelajaran umum itu hanya kelas 1 dan kelas 2, jadi untuk kelas yang di atas itu tidak lagi mengikuti. Bagi santri yang tidak mengikuti pembelajaran mata pelajaran umum, mereka diprogramkan dengan mata pelajaran yang lain, dengan menambah mata pelajaran agama dan sebagainya. Jadi yang umum itu fokusnya hanya di kelas 1 dan kelas 2.³⁹

Dengan adanya pembelajaran mata pelajaran umum yang diajarkan hanya satu kali per minggu ini sama sekali tidak mengganggu santri dalam pembagian waktu pembelajaran, bahkan SH melihat santri sudah sangat lihai dalam pembagian waktu belajar seperti pada pernyataannya berikut:

Mereka membagi waktu belajar antara pondok pesantren dan mata pelajaran umum sudah cukup lihai, karena mata pelajaran umum pun juga tidak terlalu mendominasi, masih banyak mata pelajaran agamanya, sehingga waktu mereka belajar pun juga disesuaikan, ketika mereka belajar mata pelajaran agama mereka bisa fokus dan juga ketika mereka mengikuti mata pelajaran umum mereka juga bisa fokus, artinya mereka sudah bisa membagi waktu dengan baik.⁴⁰

³⁹Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

⁴⁰Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

Ungkapan SH ini dibenarkan oleh MP salah seorang santri kelas 7 yang mengikuti pembelajaran mata pelajaran umum dengan pernyataan berikut:

Bila membagi waktu itu kalau tidak ada pekerjaan lain aja kak, misalnya hari ini belajar kitab kuning berarti malamnya belajar kitab kuning, begitu juga bila mata pelajaran umum, terkadang saya mengerjakan tugas sesaat sebelum masuk mata pelajaran umum.⁴¹

Menurut AW selaku tenaga pendidik mata pelajaran umum di Pendidikan Kesetaraan Pondok pesantren mengungkapkan bahwa jadwal kegiatan sudah terorganisir secara baik, tetapi perlu ditingkatkan kembali karena dalam memberikan informasi jika ada kegiatan yang mendadak atau kegiatan di luar jadwal informasinya kurang tepat waktu. Sedangkan untuk jadwal kegiatan yang dilaksanakan setiap hari sudah terorganisir dengan baik.

Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren *salafiyah* Sabilal Muhtadin dilaksanakan selama satu minggu ada satu kali pertemuan pada setiap kelas yakni hari Kamis dari pukul 08:00 sampai pukul 09:00 di kelas 7A, dari pukul 09:30 sampai 10.30 di kelas 7B, dan hari Sabtu pukul 08:00 sampai 09:00 di kelas 8. Pembelajaran pun cukup singkat, karena tenaga pendidik dituntut untuk bisa menyelesaikan satu BAB pada sekali pertemuan agar bisa mengimbangi materi dengan tingkat MTs.⁴²

⁴¹Wawancara bersama MP di Jaya Karet, 04 Oktober 2020

⁴²Dokumentasi Jadwal Pembelajaran di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 21 September 2020

Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran umum pendidikan kesetaraan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab resitasi dan penugasan. Dengan metode tersebut para tenaga pendidik dan para santri bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajarnya. Dengan jadwal yang sudah diatur dan pelajaran yang sudah ditentukan para santri yang mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran umum dengan baik. Hasil dari peserta didik pun juga memuaskan, tetapi ada sebagian kecil dari peserta didik yang menyepelkan dalam kegiatan pembelajaran.⁴³

Sarana dan prasana yang digunakan yakni seperti sarana dan prasarana pondok pesantren yang ada, sedangkan untuk buku-buku paket atau materi diambil dari buku-buku paket yang diajarkan di MTs. Santri yang mengikuti pembelajaran mata pelajaran umum mencatat apa yang sudah diajarkan oleh guru mata pelajaran, dan terkadang beberapa guru membagikan ringkasan dari materi yang akan dipelajari, sehingga santri bisa membaca materi dan waktu pembelajaran bisa dimanfaatkan untuk penjelasan materi dan evaluasi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak ZM selaku Penanggung Jawab Program Pendidikan Kesetaraan yang ada di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin.

Sarana prasarana yang digunakan sama seperti biasa, ada papan tulis ada spidol, kemudian juga ada bahan ajar untuk dibagikan kepada siswa, supaya mereka lebih mudah, bahan yang kami berikan itu seperti ringkasan-ringkasan.⁴⁴

Pelaksanaan ujian Sekolah, ulangan semester dilakukan secara tertulis di pondok pesantren dengan waktu yang telah disepakati oleh

⁴³Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 3 Oktober 2020

⁴⁴Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

yayasan dan ujian praktek dilaksanakan oleh masing-masing guru dengan waktu yang fleksibel. Sedangkan untuk pelaksanaan ulangan harian tergantung oleh masing-masing guru mata pelajaran, seperti yang dinyatakan oleh SH berikut.

Evaluasi mata pelajaran umum tentu ada, kita juga melaksanakan ulangan semester dan sebagainya seperti mata pelajaran yang lain, biasanya disetiap pertemuan, setelah materi disampaikan dipelajari, kita memberikan evaluasi, sebagai tindak lanjut untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita laksanakan sudah tuntas atau belum.⁴⁵

Pelaksanaan Ujian Nasional PPS. Sabilal Muhtadin bisa dilakukan secara Mandiri di lingkungan Yayasan, karena yayasan memutuskan untuk pengadaan 2 Lab Komputer yang bisa dipakai bersama. Seperti yang diungkapkan ZM selaku penanggung jawab pendidikan kesetaraan berikut.

Evaluasi pasti ada, karena kami setiap semester atau enam bulan sekali memang diadakan ulangan semester, yang membuat soal ini dari tenaga pendidik, jadi setiap semester kami mengadakan penyerahan hasil belajar siswa atau rapot, untuk ulangan harian sudah dikondisikan juga oleh para tenaga pendidik, khusus untuk mata pelajaran umum pendidikan kesetaraan tersebut. sedangkan pelaksanaan ujian Nasional, kami sudah memiliki Lab Komputer tetapi kami juga statusnya masih minjam dengan madrasah Aliyah, jadi kalau untuk ujian pendidikan kesetaraan itu kami santri-santri mengikuti tidak keluar dari pondok tersebut.⁴⁶

Pembiayaan untuk Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin menggunakan uang bantuan operasional sekolah atau sering yang disebut dengan BOS. BOS ini didapatkan dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Awalnya untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah yaitu dengan mengajukan proposal dan persyaratan

⁴⁵Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

⁴⁶Wawancara bersama ZM di Jaya Karet, 21 September 2020

yang ada, setelah diterima maka BOS bisa diberikan kepada pondok pesantren atau pelaksana Pendidikan Kesetaraan dengan ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya dengan surat perjanjian kerja sama antara komitmen dan penanggung jawab program. Dari BOS tersebut sebagian besar terealisasi untuk kegiatan pendidikan kesetaraan yakni untuk membeli peralatan, perlengkapan, honor tenaga pendidik, honor ekstra kurikuler perawatan sarana dan prasarana pondok pesantren, pembayaran listrik dan digunakan untuk lain-lain yang bersangkutan dengan program kesetaraan, seperti yang dijelaskan penanggung jawab pendidikan kesetaraan pondok pesantren Sabilal Muhtadin berikut.

Untuk biaya operasional pendidikan kesetaraan yang kami selenggarakan selama ini kami menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, adanya BOS ini yaitu dengan mengajukan proposal dengan persyaratan yang ada, selanjutnya tinggal menandatangani surat perjanjian kerja antara komitmen dengan penanggung jawab pendidikan kesetaraan, untuk terealisasinya BOS digunakan untuk pendidikan kesetaraan di pondok pesantren Sabilal Muhtadin, seperti halnya untuk membeli peralatan, perlengkapan honor tenaga pendidik juga, honor pelatih ekstrakurikuler, perawatan sarana dan prasarana pondok, bayar listrik dan sebagainya yang bersangkutan dengan pendidikan kesetaraan.⁴⁷

b. Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman mengadakan jalur pendidikan nonformal yakni Pendidikan Kesetaraan, program yang setara dengan pendidikan formal SMP/MTS. Alasan dibentuknya Program Pendidikan Kesetaraan yaitu agar santri yang belajar di pondok pesantren

⁴⁷Wawancara bersama ZM di Jaya Karet, 21 September 2020

Tahfidzul Qur'an Darul Iman bisa memiliki ijazah yang setara dengan SMP/MTs sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke depannya. Selain itu, berhubung lokasi pondok pesantren Tahfidzul Qur'an yang tepat disamping Madrasah Tsanawiyah Sirajul Munir membuat pondok ini memilih daya tarik dengan fokus kepada pengajian kitab kuning. Seperti yang dikatakan oleh AA selaku penanggung jawab pendidikan kesetaraan.

Dulu itu kita mempunyai santri yang lulusan SD, kemudian masuk ke pesantren kita, setelah dipikir-pikir kembali, supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan ke depan, harus ada ijazah formal yang kami keluarkan, yang pertama itu jenjang paket b yang sekarang dikenal dengan jenjang kesetaraan *wustha*, kami memilih untuk membentuk pendidikan kesetaraan daripada pendidikan madrasah karena disamping pesantren kita ada Madrasah Tsanawiyah, tepat disamping pondok pesantren kita, namanya Madrasah Tsanawiyah Sirajul Munir, dulunya berpikir memang buka paket b, kalo seandainya paket ini gagal, maka akan berubah juga menjadi Madrasah Tsanawiyah, tapi *alhamdulillah* sekarang berjalan dengan lancar, dan seiring bertambahnya santri kita tingkatkan awalnya paket b itu jadi kesetaraan *wustha*.⁴⁸

Setelah adanya pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman lambat laun pendidikan di pondok pesantren meningkat dan orang tua santri tidak khawatir lagi untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi setelah selesai mengaji di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman.

Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* mewajibkan pondok untuk mengajarkan kurikulum mata pelajaran umum. Tenaga pendidik yang mengajarkan kurikulum mata pelajaran umum di Pondok

⁴⁸Wawancara bersama AA di Babaung, 23 September 2020

Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman direkrut dari tenaga pendidik yang mengajar di SMP/MTs dan SMKN di sekitar lingkungan pondok, sudah beberapa kali upaya yang dilakukan pondok pesantren dengan merekrut tenaga pendidik untuk mengajarkan mata pelajaran umum, seperti tenaga pendidik dari MTs Sirajul Munir tetapi hanya bertahan sebentar karena merasa gaji yang kurang sesuai.⁴⁹ Sekarang hanya ada satu orang tenaga pendidik kurikulum mata pelajaran umum di PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman yaitu bapak A, seorang pegawai kecamatan Pulau Hanaut yang dulunya mengajar di SMKN Pulau Hanaut, beliau diminta pengasuh sejak pertama kali diadakannya kurikulum mata pelajaran umum. A menyatakan alasannya mau mengajar di pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

Karena panggilan bu, saya mengajar di pondok hari Sabtu, sedangkan aktivitas sehari-hari memang bekerja di kecamatan, jadi pengasuh meminta saya untuk mengajarkan mata pelajaran umum, menambahkan matematika dan Bahasa Inggris, karena pengasuh yang meminta, jadi mau tidak mau saya mengiyakan.⁵⁰

Keterbatasan tenaga pendidik yang ada dan dari pernyataan A sehingga hanya ada dua mata pelajaran umum yang diajarkan di pondok pesantren *salafiyah* yaitu Matematika dan Bahasa Inggris. Dan dalam satu minggu hanya ada satu kali pertemuan yang terdiri dari dua jam pelajaran yang dimanfaatkan A untuk mengajarkan dua mata pelajaran tersebut. Dikarenakan kesibukan beliau sebagai pegawai kecamatan juga sehingga

⁴⁹Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 23 September 2020

⁵⁰Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

beliau hanya bisa meluangkan waktu pada hari Sabtu untuk mengajar di tiga kelas jenjang *wustha*.⁵¹

Kurikulum yang digunakan dalam penerapan mata pelajaran umum di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman yaitu kombinasi dari beberapa kurikulum, karena menurut tenaga pendidik tidak ada kejelasan mengenai penerapan kurikulum, Sehingga beliau menggunakan kurikulum kombinasi dari kurikulum 2003 sampai kurikulum 2013. A selaku tenaga pengajar mata pelajaran umum menyatakan sebagai berikut:

Sebagian materi itu saya jiplak dari internet, ada yang kurikulum 2013 ada masih pakai kurikulum 2003, jadi kombinasi, karena saya mencari rpp silabus mata pelajaran umum ini, yang khusus untuk pesantren *salafiyah* ini masih susah bu, jadi saya mengambil dari yang kurikulum yang umumnya dipakai seperti matematika tentang alogaritma, perkalian dan sebagainya.⁵²

Pembelajaran yang ada di pondok pesantren lebih didominasi oleh pelajaran kitab kuning dan mata pelajaran umum hanya ada 1 kali pertemuan pada setiap kelas di hari Sabtu, sehingga kurikulum mata pelajaran umum memang tidak mengganggu santri dalam memperdalam kitab kuning, para santri yang mengikuti program tahfiz juga tetap mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran umum. Seperti yang dijelaskan oleh penanggung jawab pendidikan kesetaraan berikut.

Program tahfidz itu kita pisahkan asramanya, supaya dia lebih fokus untuk hafalan, tapi kalau yang belajar kitab kuning itu karena setiap hari itu full kitab hanya 1 kali pertemuan di hari Sabtu itu aja yang belajar mata pelajaran umum, jadi kalau membagi waktu santri

⁵¹Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 3 Oktober 2020

⁵²Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

nyaman-nyaman aja, karena memang pelajaran umum tidak menekan santri.⁵³

Menurut A selaku tenaga pendidik mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan pondok pesantren mengungkapkan bahwa jadwal kegiatan sudah terorganisir secara baik, mengingat beliau juga punya pekerjaan di kantor kecamatan, namun waktu yang telah dijadwalkan tersebut dirasa belum cukup untuk pengembangan keilmuan santri.

Kegiatan pembelajaran mata pelajaran umum dilaksanakan selama satu minggu ada satu kali pertemuan di tiap kelas yakni hari Sabtu dari pukul 07:30 sampai pukul 08:30 di kelas 7, dari pukul 08:30 sampai 09:30 di kelas 9, dan pukul 10:00 sampai 11:00 di kelas 8. Pembelajaran pun cukup singkat, karena dalam satu kali pertemuan langsung diajarkan dua mata pelajaran secara bergantian.⁵⁴

Metode pembelajaran yang digunakan di pendidikan kesetaraan hanya menggunakan metode hafalan, ceramah, tanya jawab dan penugasan. Penerapan metode pembelajaran dijelaskan lebih lanjut oleh A selaku tenaga pengajar sebagai berikut.

Metode yang saya gunakan seperti dalam Bahasa Inggris itu saya tekankan untuk menghafal lima kosakata dalam sehari, terserah kosakata apa saja dan ketika memulai pembelajaran saya meminta sekitar lima orang santri untuk maju ke depan untuk menyebutkan lima kosa kata yang telah dihafalkannya, dan saya berlakukan di setiap kelas. Dan untuk matematika lebih banyak saya gunakan metode tanya jawab, biasanya saya kasih tips-tips contoh soal yang

⁵³Wawancara bersama AA, di Babaung, 23 September 2020

⁵⁴Dokumentasi Jadwal Pembelajaran di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 23 September 2020

punya jalan pintas seperti itu, sedangkan untuk metode yang lain seperti diskusi belum pernah saya gunakan dalam pembelajaran.⁵⁵

Dengan metode tersebut para tenaga pendidik dan para santri bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajarnya. Dengan jadwal yang sudah diatur dan pelajaran yang sudah ditentukan para santri yang mengikuti pembelajaran mata pelajaran umum mengikuti dengan baik. Hasil dari peserta didik pun juga ada yang memuaskan, ada juga yang kurang memuaskan karena dipengaruhi inteligen santri yang berbeda pula.

Sarana dan prasana yang digunakan yakni seperti sarana dan prasarana pondok pesantren yang ada saja, karena memang sarana dan prasarana yang ada memang kurang. Sedangkan untuk buku-buku paket atau materi juga didapat dari internet. Seperti yang dinyatakan A berikut:

Karena fasilitas yang dimiliki pesantren memang kurang, sedangkan saya mengajar pun mengambil materinya juga dari internet, misalnya untuk materi kelas 9 yang saya cari di internet memang seharusnya menggunakan *powerpoint*, tapi memang sarana prasarana tidak memadai untuk itu, ya jadi pakai spidol papan tulis yang ada aja, seperti Matematika untuk memberikan contoh kasus soal dan dikerjakan oleh santri.⁵⁶

Santri yang mengikuti kegiatan mata pelajaran umum mencatat apa yang sudah diajarkan oleh pendidik mata pelajaran, kadang juga pendidik memberikan materi dalam bentuk lembaran yang kemudian diperbanyak untuk dibagikan kepada santri. Untuk pengoperasian data dan administrasi kurikulum mata pelajaran umum, pondok pesantren menyediakan alat elektronik berupa laptop dan printer, guna mempermudah tenaga

⁵⁵Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

⁵⁶Wawancara bersama AA di Babaung, 27 September 2020

pendidik namun beliau lebih sering menggunakan printer punya sendiri karena tidak punya waktu untuk ke pondok.

Pelaksanaan ujian sekolah, ujian tertulis dan ujian praktek diadakan di pondok pesantren. Sedangkan untuk pelaksanaan Ujian Nasional berada di SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta belum terakreditasinya pondok pesantren dan pendidikan kesetaraan. Sehingga setiap ujian nasional dilaksanakan di SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan. Seperti yang dikatakan oleh AA selaku Penanggung Jawab Program Pendidikan Kesetaraan di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman.

Sarana yang digunakan hanya seperti biasa, spidol, papan tulis. Sebenarnya ada Laptop tapi proyekturnya belum ada untuk dijadikan media pada pembelajaran mata pelajaran umum, laptop juga didapatkan pada saat pengusulan bantuan-bantuan dari Kementerian Agama, sehingga apabila diadakan ujian berbasis komputer tahun ini fasilitas kami mencukupi untuk melaksanakan secara mandiri, namun beberapa tahun terakhir kami melaksanakan Ujian Nasional numpang di SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan.⁵⁷

Pembiayaan untuk program pendidikan kesetaraan *Wustha* di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman menggunakan uang bantuan operasional sekolah atau sering yang disebut dengan BOS. BOS ini didapatkan dari pemerintah yang melalui Kementerian Agama. Awalnya untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah yaitu dengan mengajukan proposal dan persyaratan yang ada, setelah diterima maka BOS bisa diberikan kepada pondok pesantren atau pelaksana program pendidikan kesetaraan dengan ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya hanya dengan

⁵⁷Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

surat perjanjian kerja sama antara komitmen dan penanggung jawab program. Dari BOS tersebut sebagian besar terealisasi untuk kegiatan Pendidikan Kesetaraan yakni untuk membeli peralatan, perlengkapan, honor tenaga pendidik, perawatan sarana dan prasarana pondok pesantren, sebagian pembayaran listrik dan digunakan untuk lain-lain yang bersangkutan dengan pendidikan kesetaraan. Namun dana BOS juga tidak bisa menutupi keseluruhan pembiayaan yang ada, jadi sedikit banyak juga menggunakan dana dari yayasan.

c. Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Darul Aitam

Pondok Pesantren Darul Aitam atau yang lebih dikenal masyarakat sekitar dengan panti asuhan Putra Borneo mengadakan jalur pendidikan nonformal yakni pendidikan kesetaraan, program yang setara dengan pendidikan formal. Sejak tahun 1998 pondok pesantren ini berdiri hanya sebagai panti asuhan, hingga pada tahun 2006 akhirnya pengasuh mendaftarkan yayasan yang dibangunnya menjadi pondok pesantren *salafiyah* yang sekarang tercatat sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* di kantor Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur. Setidaknya ada empat alasan pengasuh membentuk pendidikan kesetaraan di Panti Asuhan Putra Borneo antara lain: 1) mempermudah pendataan dari Kementerian Agama, 2) mempermudah memberikan fasilitas-fasilitas pembangunan dan sarana pendukung lainnya, 3) mempermudah untuk mendapatkan dana bantuan

operasional dan 4) mempertahankan keaslian *salafiyah*. Empat alasan ini diutarakan pengasuh dalam kutipan berikut:

Pertama, untuk mempermudah pendataan dari Kementerian Agama, kedua, mempermudah untuk memberikan fasilitas-fasilitas pembangunan dan hal pendukung lainnya, ketiga untuk membantu ustadz maupun pengasuh pesantren berkaitan masalah dana operasional, keempat karena banyaknya pondok-pondok pesantren sudah meninggalkan keaslian *salafiyah*nya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.⁵⁸

Pengasuh beranggapan banyak pondok pesantren sekarang yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan menghilangkan keaslian *salafiyah*, sehingga pembelajaran lebih didominasi oleh mata pelajaran umum daripada mata pelajaran agama, sehingga pengasuh Darul Aitam memilih untuk mendaftarkan pondok pesantrennya di pendidikan kesetaraan saja asalkan keaslian *salafiyah* masih terjaga.

Tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Darul Aitam mayoritas dari alumni Pondok Pesantren Darul Aitam yang melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Darussalam yang kemudian kembali ke pondok pesantren, sebagian kecil lainnya berasal dari pondok pesantren di Kandangan dan Sarjana IAIN Banjarmasin. Ada juga santri Pondok Pesantren Darul Aitam yang sudah menamatkan kitabnya dan langsung mengabdikan di pondok pesantren.

Sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Aitam masih mempertahankan sistem *salafiyah*, sehingga tidak mengenal silabus, RPP sebagaimana ketentuan Kemendikbud. Pada pondok pesantren darul Aitam

⁵⁸Wawancara bersama MY di Ketapang, 6 Oktober 2020

pun tidak ada daftar hadir, karena dirasa ruang lingkup yang masih satu rumpun dan para ustadz masih mampu menghafal santri di Pondok Pesantren Darul Aitam.

Sarana dan prasana yang digunakan dalam pembelajaran di pondok pesantren *salafiyah* Darul Aitam untuk tingkat *wustha* yakni dua buah ruang kelas, meja belajar, papan tulis dan spidol, selain itu sarana penunjang lain di pondok pesantren ini seperti laptop, printer serta proyektor juga lengkap. Pondok Pesantren Darul Aitam juga memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku agama dan buku-buku mata pelajaran umum juga. Perpustakaan ini dibuat pengasuh agar santri bisa fleksibel mendalami ilmu umum, jadi tidak dipaksakan, seperti yang dinyatakan pengasuh dalam kutipan berikut:

Buku yang kami miliki lengkap, kami dulu minta bantuan di Kanwil dari Kementerian Pendidikan juga ada, sampai ke Tv kami juga minta kirimkan buku untuk mengisi perpustakaan, jadi santri bisa belajar mandiri, tidak dipaksakan, yang penting urusan agamanya kita utamakan, ibarat kata bila bertanam padi, rumput akan tumbuh, bertanam rumput pagi tidak akan dapat, semata-mata dunia saja.⁵⁹

Pengasuh mengibaratkan ilmu agama seperti padi yang apabila ditanam, rumput pun juga akan tumbuh, pendapt ini diutarakan pengasuh agar santri mengutamakan ilmu akhirat atau ilmu agama, maka ilmu umum akan mudah juga untuk mengikuti, dan apabila yang ditanamkan ilmu umum maka ilmu akhirat tidak akan tertanam, semata-mata hanya mengejar dunia saja. Inilah yang dipegang oleh pengasuh untuk tidak memaksakan santri-santrinya mempelajari ilmu umum. Sehingga memang mata pelajaran

⁵⁹Wawancara bersama MY di Ketapang, 6 Oktober 2020

umum tidak termasuk dalam kegiatan pembelajaran di pondok pesantren ini, alasan tidak diajarkannya mata pelajaran umum ditegaskan pengasuh dalam kutipan berikut:

Selama ini kami belum menerima juknis penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*, pendidikan kesetaraan memang harus ada mata pelajaran umum karena supaya setara tadi, namun sebelum kita melaksanakan kita harus acc sebagaimana juknis yang diberikan oleh pemerintah, dan tetap mendukung program pemerintah, setelah juknis dikeluarkan dan apabila memungkinkan disertai pembiayaan maka akan menjadi bahan pertimbangan, dan jikalau ternyata juknisnya memberatkan sampai pembelajaran umum lebih dominan akan kita spekulasi, karena ini amanah abah guru sekumpul jadi harus banyak agamanya.⁶⁰

Meski terlihat tidak melaksanakan administrasi secara rinci Pondok Pesantren Darul Aitam tetap rutin melaksanakan evaluasi pembelajaran setiap 1-2 bulan sekali, evaluasi pembelajaran santri ini juga diadakan dalam bentuk pertandingan-pertandingan rutin selama 3 bulan sekali, dan pondok pesantren juga mengeluarkan hasil belajar santri, karena melihat keadaan santri yang biasanya bertahan satu sampai dua tahun. Adanya hasil belajar santri atau rapot ini agar santri bisa dengan mudah jika ingin melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan lainnya. Hal ini disampaikan pengasuh dalam kutipan berikut:

Evaluasi sudah pasti ada, ya sekitar 1-2 bulan sekali, kemudian juga diadakan pertandingan-pertandingan itu 3 bulan sekali, pertandingan-pertandingan baca doa haul, tawasul panjang, adzan, qomad, khutbah, talkin arab dan arab melayu, hadiahnya ya buku, pulpen, wadai-wadai, dan kami juga mengeluarkan rapot seperti sekolah biasa, karena ada santri yang kadang cuma bertahan setahun dua

⁶⁰Wawancara bersama MY di Ketapang, 6 Oktober 2020

tahun, jadi supaya mempermudah santri melanjutkan pendidikan ke luar.⁶¹

Pondok pesantren sekaligus panti asuhan khusus santri putra yang berdiri di jalan Teratai IV kota Sampit dengan biaya operasional mencapai 50 juta setiap bulannya ini beroperasi dengan dibantu pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga (donator) dan usaha perseorangan pengasuh. Hingga kini santri di pondok pesantren ini mencapai 82 orang dengan biaya penghidupan ditanggung sepenuhnya oleh pondok pesantren.

2. Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Se-Kotawaringin Timur

a. Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin

Suatu lembaga pasti memiliki problem-problem atau kendala-kendala yang dihadapi, begitu pula dengan pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin. Problematika tersebut kadang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan. Tetapi dengan problematika tersebut dapat menjadikan pelajaran dan cara untuk meningkatkan agar menjadi lebih baik kembali, apabila bisa mencari jalan untuk memperbaiki problematika tersebut.

Hambatan yang dilalui dari beberapa tahun yang lalu menurut penanggung jawab pendidikan kesetaraan yaitu dari awal terbentuknya

⁶¹Wawancara bersama MY di Ketapang, 6 Oktober 2020

pendidikan kesetaraan yang menjadi hambatan yakni dari penanggung jawab yang kurang komunikasi dengan pihak Yayasan. Dan yang menjadi hambatan lagi setelah beberapa tahun terselenggaranya program ini tidak turunnya ijazah selama tiga tahun. Sekarang ijazah bisa diturunkan setahun sekali, dan pengelola pendidikan kesetaraan ini telah dipantau langsung oleh pihak yayasan dan bergabung dalam struktur penanggung jawab pendidikan kesetaraan sehingga dalam mengatur dan berkomunikasi lebih mudah.

Dalam hal pembelajaran yang menjadi kendala di pendidikan kesetaraan, khususnya kegiatan mata pelajaran umum di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin yaitu kurangnya waktu pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama dikarenakan permintaan dari pengasuh sehingga pihak penanggung jawab mau tidak mau mengindahkan arahan dari pengasuh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ZM selaku penanggung jawab pendidikan kesetaraan berikut.

Kalau kendala dalam pelaksanaan kurikulum mata pelajaran umum ini ada, yang pastinya kendala-kendala itu dari pihak santri, dan juga kadang ada dari keadaan pondok pesantren, kendala-kendala yang ada disini yaitu kurangnya waktu pembelajaran yang memang diminta pengasuh untuk dibatasi satu kali pertemuan di setiap kelas dalam satu minggu saja, agar ini menjadi karakteristik madrasah *salafiyah* dan membedakannya dengan tingkat MTs dan juga sarana prasarana juga masih kurang menunjang untuk pendidikan mata pelajaran umum.⁶²

Dibatasinya waktu pembelajaran ini diutarakan penanggung jawab pendidikan kesetaraan membuat santri lebih fokus kepada pembelajaran kitab kuning saja, dan membuat antusias terhadap mata pelajaran umum

⁶²Wawancara bersama ZM di Jaya Karet, 21 September 2020

juga kurang. Keadaan ini dinyatakan oleh penanggung jawab pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

Pembagian waktu mereka memang tidak terlalu fokus pada pelajaran umum, karena pelajaran umum ini dianggap baru ya, jadi mereka tidak terlalu antusias seperti pembelajaran kurikulum agama, sehingga itu tidak mempengaruhi mereka, kemudian untuk keseimbangan antara jadwal mata pelajaran umum dan kurikulum agama sangat timpang, sehingga waktu mereka full time belajar pembelajaran kitab.⁶³

Meskipun pembelajaran mata pelajaran umum hanya diajarkan satu kali pertemuan saja setiap minggunya, namun ini tidak menjadi hambatan bagi tenaga pendidik, hanya saja dari waktu pembelajaran yang berdurasi satu jam tersebut, banyak santri yang tidak disiplin sehingga menyita waktu pembelajaran, seperti yang diutarakan oleh SH selaku tenaga pendidik mata pelajaran umum di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin berikut:

Tentu ada hambatannya, yang pertama, kadang santri-santri itu kurang disiplin, terutama dalam membawa buku catatan, kadang mereka suka lupa, karena mungkin pelajaran sebelumnya mereka tidak menggunakan buku catatan hanya menulis di kitabnya saja, kadang itu yang membuat mereka lupa dan tidak membawa buku catatannya di kelas ketika mata pelajaran umum berlangsung, untuk cara mengatasinya biasanya kita perbolehkan mereka mengambil dulu bukunya di asrama dengan jangka waktu yang kita tentukan, artinya mereka harus cepat mengambil, karena jarak asrama dengan kelas juga tidak terlalu jauh.⁶⁴

Hal demikian juga dirasakan oleh AW pada saat jam pembelajarannya berlangsung:

Ada mbak, baik itu dari santri maupun dari pembelajaran itu sendiri, hambatan yang pertama dari beberapa santri yang terkadang kurang disiplin dan masih menyepelekan dan juga kurangnya ketersediaan buku-buku materi untuk anak-anak mbak, sedangkan untuk mengatasi dari santri yaitu tergantung tenaga pendidik sendiri untuk

⁶³Wawancara bersama ZM di Jaya Karet, 21 September 2020

⁶⁴Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

mengaturinya, sebenarnya waktu yang diberikan pondok pesantren untuk pendidikan umum ini sudah cukup menurut saya, tetapi kadang ada beberapa siswa yang kurang disiplin, sehingga waktu pembelajaran terpotong karena harus menunggu beberapa santri yang kurang disiplin tersebut, tetapi hal tersebut bisa dikondisikan oleh tenaga pendidik masing-masing, kalau saya mengatasi santri yang terlambat dengan menyuruh mereka berdiri saat pembelajaran, waktu berdirinya tergantung mereka terlambat masuk dalam ruangan, misalnya mereka terlambat 5 menit, maka mereka juga harus berdiri 5 menit.⁶⁵

Dengan hambatan yang ada tenaga pendidik berusaha sebaik mungkin untuk mengatasinya agar pembelajaran kembali berjalan dengan lancar. Sedangkan yang menjadi kendala dalam pembelajaran mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren *salafiyah* Sabilal Muhtadin yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dan akhirnya tenaga pendidik perlu memikirkan cara lain agar kendala tersebut bisa teratasi. Seperti pernyataan SH berikut:

Kendala dalam pelaksanaan kurikulum, tentu ada, disetiap sekolah pun pasti ada, dan khususnya di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin ini, salah satu kendalanya dari segi media, terutama LCD, kalau menerapkan pembelajaran yang berbasis IT, itu agak sulit karena keterbatasan alat atau media yang tersedia disini. Namun dari kendala-kendala yang ada, pihak pondok pesantren, Alhamdulillah masih bisa mengatasi, misalnya ketidakadaan LCD, guru-guru disini juga bisa mengatasi dengan menggunakan media yang lain, yang hampir serupa dengan itu, sehingga dapat membantu sampai pembelajaran kepada anak-anak, meskipun tidak sepenuhnya bisa sehebat dan sebagus sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang memiliki banyak fasilitas.⁶⁶

Selain terkendala sarana yang berbasis IT, lebih lanjut SH mengutarakan kurangnya ketersediaan buku bacaan hal ini juga dikarenakan tidak adanya perpustakaan yang bisa digunakan santri untuk belajar secara

⁶⁵Wawancara bersama AW di Jaya Karet, 03 Oktober 2020

⁶⁶Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 02 Oktober 2020

mandiri. Keterbatasan buku bacaan ini pun juga dirasakan oleh AW dalam pernyataannya berikut:

Tentunya dengan sarana dan prasarana yang ada sudah membantu tetapi ada yang masih kurang yaitu keterbatasan buku-buku pelajaran, cara mengatasinya saya sebagai tenaga pendidik yaitu dengan memberikan materi-materi kepada santri dengan mencatat dan menjelaskan materi-materi yang ada. Cara mengatasi dari problematika yang ada, saya selaku tenaga pendidik yaitu dengan memberikan lebih materi yang ada lebih menjelaskannya dan mendisiplinkan santri dengan memberi konsekuensi yang terlambat dan yang menyepelkan atau yang tidak memperhatikan kepada para santri.⁶⁷

Tenaga pendidik menyatakan problem terkait sarana prasarana ini disebabkan karena kurangnya dana dan juga belum tersampainya bantuan dari pemerintah atau instansi terkait dalam pengadaan sarana prasarana pondok pesantren. Namun sebagai tenaga pendidik selalu berusaha mencari solusi untuk mengatasi problem-problem yang ada.

Dengan beberapa problematika tersebut, penanggung jawab juga menginginkan Pendidikan Kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* Sabilal Muhtadin juga bisa terlaksana dengan semestinya. Dari pondok pesantren juga sudah melakukan beberapa usaha agar bisa meningkatkan Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa problem yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin. Problem-problem tersebut antara lain: a) media pembelajaran, b) santri yang kurang disiplin, dan c) buku-buku bahan bacaan.

⁶⁷Wawancara bersama AW di Jaya Karet, 03 Oktober 2020



b. Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Suatu lembaga pasti memiliki problem-problem atau kendala-kendala yang dihadapi, begitu pula dengan Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman terutama pada kurikulum mata pelajaran umum. Problem tersebut kadang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tetapi dengan problem-problem tersebut dapat menjadikan pelajaran dan cara untuk meningkatkan agar menjadi lebih baik ke depannya, apabila bisa mencari jalan untuk memperbaiki problem tersebut.

Awalnya yang menjadi hambatan dalam pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman ialah pada saat pertama kali diadakannya pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* terkait masalah EMIS atau pendataan santri dikarenakan pendataan dilakukan via website, sehingga perlu tenaga operator untuk menginput data santri ke pendataan EMIS, namun hal tersebut membuat sekretaris pondok pesantren untuk belajar dengan berbagai sumber sehingga sekarang bisa melakukan input data Emis secara mandiri.

Dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran umum yang menjadi kendala utama di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren *salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman yaitu kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten. Untuk merekrut tenaga pendidik yang berkompeten tentu memerlukan biaya lebih, sehingga pihak pondok pesantren meminta tenaga

pendidik yang berprofesi sebagai guru di SMKN Pulau Hanaut untuk membantu jalannya kurikulum mata pelajaran umum, hingga saat ini pondok pesantren hanya memiliki satu orang tenaga pendidik mata pelajaran umum yang juga merupakan pegawai kecamatan Pulau Hanaut. Lebih lengkap AA menerangkan kendala-kendala dalam pembelajaran mata pelajaran umum sebagai berikut:

Kendala yang didapati seperti kurangnya guru yang kompeten dibidangnya, kalau kita ngambil keluar tentu biayanya besar, sementara ini kami memang juga ngambil guru luar juga yang ngajar di SMP atau memiliki pekerjaan lain dan sambilan ngajar disini untuk sementara dengan gaji seadanya, seperti bapak A yang sekarang juga merupakan pegawai di kecamatan Pulau hanaut, tapi dia membidangi matematika dan bahasa Inggris, dan untuk sementara ini yang masih aktif hanya dia seorang, kalau dulu ada 2-3 orang guru yang mengajarkan mata pelajaran umum, ya mungkin karena honorinya terlalu kecil.⁶⁸

Selain kurangnya tenaga pendidikan yang berkompeten dan problem terkait pendanaan, Pondok Pesantren *Salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman juga memiliki problem terkait waktu pembelajaran yang dirasakan oleh A selaku tenaga pendidik mata pelajaran umum yang menyatakan sebagai berikut.

Kalau menurut saya kurang bu, cuma saya dari Senin sampai Jum'at fokus ke kerjaan saya di kecamatan, semestinya memang harus nambah, dan saya juga pembelajaran diberi waktu satu jam semua setiap kelas, dan saya rasa waktu tersebut belum cukup.⁶⁹

Sedangkan untuk waktu belajar memang pihak pondok pesantren tidak menginginkan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mata pelajaran

⁶⁸Wawancara bersama AA di Babaung, 27 September 2020

⁶⁹Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

umum, karena ingin mempertahankan ciri khas pesantren seperti yang dinyatakan AA selaku pengasuh PPs. Tahfidzul Qur'an Darul Iman berikut.

Jika dipenuhi semua mata pelajaran umum sesuai ketentuan, kami juga tidak menerima, kalau banyak pelajaran umum nanti kekhasan pesantren hilang. Kalau sampai menghilangkan kekhasan pesantren rugi kita, itulah marwah pesantren.⁷⁰

Selain itu, A lebih lanjut menyatakan kendala lain yang beliau rasakan yaitu dari segi ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kurikulum mata pelajaran umum. Seperti pernyataan bapak A berikut.

Kendala yang saya rasakan dari segi sarana prasarana sekolah sih bu, saya memahami kalau pesantren ini arahnya ke agama, pernah saya mengusulkan di pondok pesantren dikasih alat peraga seperti gambar di depan kelas atau ruangan berupa pengayaan kosa kata Bahasa Inggris yang ada terjemah Bahasa Indonesianya, sehingga santri cepat hafal, minimal kosakata yang mengarah ke agama juga, misalnya shalat Bahasa Inggrisnya apa, berdoa Bahasa Inggrisnya apa, ketika itu dilihat setiap hari kan pasti masuk ke dalam akalnya (ingatan).⁷¹

Ketersediaan buku-buku mata pelajaran umum juga dirasakan A, sehingga beliau sering mengambil materi bersumber dari internet. Ketika mengambil sumber materi dari internet, A pun sering menggunakan kurikulum yang berbeda-beda diakibatkan ketidakjelasan kurikulum yang digunakan dalam mata pelajaran umum di pondok pesantren. Bahkan ketika diminta membuat RPP dan Silabus untuk keperluan akreditasi membuat beliau kebingungan.

Melihat beberapa problematika tersebut, penanggung jawab juga menginginkan pembelajaran mata pelajaran umum juga bisa terlaksana dengan semestinya dan juga ingin meningkatkan pendidikan kesetaraan di

⁷⁰Wawancara bersama AA di Babaung, 27 September 2020

⁷¹Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman. Dari pondok pesantren juga sudah melakukan beberapa usaha agar bisa meningkatkan pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, seperti mencari jalan keluar dari problematika-problematika yang sudah ada, dengan mencari tenaga pendidik dari sekolah di sekitar lingkungan pondok pesantren serta pihak pondok pesantren memberikan dukungan dari segi pendanaan yang kurang.⁷²

Berdasarkan hasil pemaparan data di atas, penulis mendapati beberapa problem yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman. Problem-problem tersebut antara lain: a) kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten, b) alokasi waktu belajar, c) tidak adanya kurikulum kesetaraan khusus untuk pondok pesantren *salafiyah*, d) sarana prasarana penunjang dan e) pembiayaan.

c. Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* Darul Aitam

Suatu lembaga pasti akan ada yang namanya problem-problem atau kendala-kendala yang dihadapi, begitu pula dengan pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Darul Aitam. Problematika tersebut kadang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan. Meskipun pihak pondok pesantren menyatakan tidak ada problem, namun berdasarkan observasi penulis menemui beberapa problem yang harus dicari

⁷²Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 3 Oktober 2020

jalan keluarnya untuk meningkatkan pendidikan kesetaraan agar menjadi lebih baik, berikut penulis kemukakan beberapa problem yang penulis temui di lapangan dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah* Darul Aitam.

Hal pertama yang menjadi problem dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Darul Aitam yaitu tingkatan kelas pada jenjang *wustha*, seperti yang diketahui pada hasil wawancara pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam bahwa jenjang *wustha* hanya memiliki 2 ruangan kelas, dan tidak ada klasifikasi tingkatan kelas 7, 8, 9 selayaknya pada jenjang SMP/MTs, sehingga hal ini menjadi kendala apabila diterapkan kurikulum mata pelajaran umum terutama dalam hal penentuan materi yang akan diajarkan.⁷³

Problem yang kedua yaitu tidak adanya tenaga pendidik yang mengajarkan mata pelajaran umum, dari dokumen yang penulis terima ada enam orang tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren Darul Aitam yang mengampu mata pelajaran umum, ketiadaan tenaga pengajar ini dikarenakan memang belum diterapkannya mata pelajaran umum dan juga begitu ketatnya seleksi yang dilakukan pengasuh untuk menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Darul Aitam. Pada masa awal berdirinya pondok pesantren, pengasuh mendapatkan rekomendasi beberapa tenaga pendidik yang akan membantu di pondok pesantren namun hal tersebut ditolak oleh pengasuh, karena beliau berprinsip untuk membangun

⁷³Observasi di Pondok Pesantren Darul Aitam, 12 September 2020

kebiasaan beribadah santri-santrinya secara secara emosional juga. Seperti pernyataan beliau dalam kutipan berikut:

Jika dapat bantuan tenaga pendidik, hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk itu ada hal-hal penting yang harus dijaga pondok pesantren, antara lain jika tenaga pengajarnya berbackground umum semata, itu akan berpengaruh kepada kejiwaan santri, tetapi kalau backgroundnya itu guru Bahasa Indonesia, tetapi latar belakangnya keagamaan maka akan lahir Bahasa-bahasa keagamaannya, tetapi apabila latar belakang gurunya umum melulu, pasti akan timbul pengaruh² kejiwaan santri dalam bidang keduniaan. Jadi harus melalui seleksi, jadi pernah pada tahun 2006 dari Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur, pertama kali didirikan pesantren, itu langsung ada TU dari Kementerian Agama, pengajarnya dari Kementerian Agama, akhirnya menimbulkan hal-hal yang kami anggap kurang maksimal para santri untuk kuat ibadah, karena terpengaruh harus menghafal mata pelajaran umum.⁷⁴

Problem ketiga yaitu kurangnya komunikasi antara Kementerian Agama dan pihak Pondok Pesantren Darul Aitam yang membahas terkait penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* serta membahas dimasukkannya kurikulum mata pelajaran umum sebanyak 6 mata pelajaran dan wajib diajarkan minimal 1 kali pertemuan per minggu pada setiap mata pelajarannya,⁷⁵ hal ini tergambar dari pernyataan pengasuh yang mengatakan: “Kami belum menerima juknis” sedangkan juknis penyelenggaraan pendidikan kesetaraan telah diterbitkan pada tahun 2018. Meskipun pengasuh sangat berprinsip untuk mengutamakan pendidikan agama, namun beliau menyatakan terbuka apabila tetap masuk mata pelajaran umum asalkan tidak lebih dari 40% dari jam pembelajaran seperti pernyataan beliau dalam kutipan berikut:

⁷⁴Wawancara bersama MY di Ketapang, 6 Oktober 2020

⁷⁵Observasi di Pondok Pesantren Darul Aitam, 12 September 2020

Jikalau ternyata juknisnya memberatkan sampai pembelajaran umum 60% dalam artian lebih dominan maka akan kita spekulasi menjadi 40% pembelajaran umum yang penting dananya turun. Karena pondok pesantren ini amanah abah guru sekumpul jadi harus banyak agamanya.⁷⁶

Tiga hal ini yang penulis anggap sebagai problem tidak diterapkannya kurikulum mata pelajaran umum di pondok pesantren Darul Aitam, yang semestinya juga perlu diketahui oleh Kementerian Agama agar penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pondok pesantren *salafiyah* di kabupaten Kotawaringin Timur bisa meningkat.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa problem yang menghambat penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* Darul Aitam. Problem-problem tersebut antara lain: a) keterbatasan sarana prasarana, b) tidak adanya tenaga pendidik mata pelajaran umum yang sesuai dengan kualifikasi pengasuh, dan c) kurangnya komunikasi antara pihak pondok pesantren dan Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur terkait juknis pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*

⁷⁶Wawancara bersama MY di Ketapang, 6 Oktober 2020

3. Solusi dari Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* se-Kotawaringin Timur

Diterbitkannya SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1772 dan nomor 3543 tahun 2018 tentu menghadirkan problem baru bagi pimpinan pondok pesantren dengan adanya penambahan mata pelajaran umum yang harus diterapkan sebagai kewajiban untuk program pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*. Mempertahankan kekhasan pesantren memang jadi problem yang dipegang teguh oleh pimpinan pondok pesantren, namun bekerjasama dengan kementerian Agama untuk menjalankan regulasi agar peserta didik memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah formal juga tidak diabaikan begitu saja oleh pimpinan pondok pesantren. Tiap pimpinan pondok pesantren ternyata punya strategi yang berbeda dalam menjalankan regulasi yang diterapkan dalam SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1772 dan nomor 3543 tahun 2018 ini, berikut penyajian data terkait solusi yang diusulkan ataupun yang telah dijalankan oleh pondok pesantren *salafiyah* di kabupaten Kotawaringin Timur:

a. Solusi dari Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin

Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin merupakan yayasan yang terdiri dari beberapa jenjang, dan salah satunya pendidikan kesetaraan *salafiyah*. Penjenjangan yang beragam membuat perhatian dari pihak yayasan juga terpecah, sehingga pada awal beroperasi jenjang pendidikan kesetaraan

masih kurang komunikasi dengan pihak yayasan. Namun setelah bergabungnya pengurus yayasan dalam struktur penanggung jawab pendidikan kesetaraan, komunikasi antara pendidikan kesetaraan dengan pihak yayasan sudah berjalan dengan baik.⁷⁷

Selama kurang lebih empat tahun pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin berjalan, dan kurikulum mata pelajaran umum telah diajarkan selama dua tahun di pondok pesantren, dari kegiatan pembelajaran mata pelajaran umum tersebut tenaga pendidik mengalami problem terkait santri yang kurang disiplin, problem ini diatasi tenaga pendidik dengan memberikan sanksi ringan kepada santri, seperti yang diungkapkan SH berikut.

Cara mengatasi problematika pembelajaran misalnya tadi santri yang kurang disiplin, biasanya kami selaku guru memberikan *punishment* (hukuman) kepada mereka yang kurang disiplin, misalnya dengan menambah tugas dan sebagainya. Atau juga memberikan motivasi kepada mereka agar juga cepat menyelesaikan tugas, misalnya diberi hadiah dan sebagainya, nah itu salah satu menyelesaikan problematika pembelajaran di kelas, kemudian masalah-masalah yang lain misalnya ketika santri datang telat ke kelas, kadang kita beri sanksi meminta maaf kepada teman-temannya, itu juga salah satu pembelajaran agar mereka tidak mengulangi kesalahannya.⁷⁸

Kurang disiplinnya santri juga dirasakan oleh AW, ia juga mempunyai cara tersendiri untuk mendisiplinkan santri, seperti dalam penjelasannya berikut.

Ada beberapa siswa yang kurang disiplin, sehingga waktu pembelajaran terpotong karena harus menunggu beberapa santri yang kurang disiplin tersebut, tetapi hal tersebut bisa dikondisikan oleh tenaga pendidik masing-masing, kalau saya mengatasi santri yang terlambat dengan menyuruh mereka berdiri saat pembelajaran, waktu

⁷⁷Observasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 3 Oktober 2020

⁷⁸Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 2 Oktober 2020

berdirinya terganggu mereka terlambat masuk dalam ruangan, misalnya mereka terlambat 5 menit, maka mereka juga harus berdiri 5 menit.⁷⁹

Selain santri yang kurang disiplin keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang juga menjadi problem kegiatan mata pelajaran umum di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin, seperti tidak adanya LCD dan Proyektor yang dapat dijadikan media pembelajaran. Namun hal ini bisa diatasi oleh tenaga pendidik dengan mencari media yang lain.⁸⁰

Keterbatasan sarana dan prasarana lainnya seperti kurangnya buku-buku materi pelajaran umum serta tidak adanya perpustakaan yang bisa dipergunakan santri untuk belajar secara mandiri. SH mengatasi problem ini dengan memberikan materi lebih untuk dipelajari santri ketika di asrama, seperti pernyataannya berikut:

Keterbatasan bahan bacaan penyebabnya mungkin karena kurangnya dana dan juga belum tersampainya bantuan baik itu dari pemerintah ataupun pihak lain, cara kita mengatasinya adalah kami sebagai guru biasanya memberikan materi lebih berupa ringkasan-ringkasan kepada anak-anak, agar mereka juga lebih mudah untuk memahami dan juga mendalami pembelajaran yang mereka laksanakan.⁸¹

Beberapa kendala yang dialami oleh tenaga pendidik tentu juga diketahui oleh ZM selaku penanggung jawab program, beliau menyatakan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran umum perlu dilakukan beberapa hal seperti yang beliau ungkapkan sebagai berikut:

Cara mengatasi problematika tersebut kami berusaha mendisiplinkan santri agar waktu pembelajaran tidak berkurang, sedangkan untuk buku pelajaran sementara waktu ini karena belum bisa dalam

⁷⁹Wawancara bersama AW di Jaya Karet, 3 Oktober 2020

⁸⁰Obervasi di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, 3 Oktober 2020

⁸¹Wawancara bersama SH di Jaya Karet, 2 Oktober 2020

menyediakan buku materi lebih banyak, harapannya kedepan bisa mendirikan perpustakaan yang memiliki banyak buku materi mata pelajaran umum, sehingga santri bisa belajar secara mandiri tidak terpaku dengan jam pembelajaran yang hanya satu kali setiap minggu.⁸²

b. Solusi dari Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman

Lokasi Pondok Pesantren *Salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman berada di desa yang memang tidak terlalu ramai, dan dapat dikatakan tertinggal sehingga kecakapan dalam teknologi guru-guru disana juga minim, sedangkan untuk pendataan santri sudah menggunakan EMIS (*Education Management Information System*) yang diinput via website. Namun problem keterbatasan IT tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh pondok pesantren, sehingga menugaskan sekretaris pendidikan kesetaraan untuk mempelajari penginputan data EMIS. Seperti yang dinyatakan penanggung jawab pendidikan kesetaraan berikut:

Yang menjadi hambatan dulu itu masalah Emis atau pendataan santri karena itu via website, pokoknya yang berbau-bau internet, Alhamdulillah sebisa-bisanya kami belajar dengan berbagai sumber, sedikit demi sedikit sudah bisa dikerjakan secara mandiri oleh sekretaris di pendidikan kesetaraan.⁸³

Pembiayaan Pondok Pesantren *salafiyah* Tahfidzul Qur'an Darul Iman hanya bersumber dari bantuan operasional sekolah sedangkan pondok pesantren memutuskan untuk menggratiskan biaya bulanan dan semester seluruh santrinya, hal ini membuat pihak pondok pesantren terkendala dari segi pembiayaan. Untuk menutupi seluruh pembiayaan operasional seperti

⁸²Wawancara bersama ZM di Jaya Karet, 21 September 2020

⁸³Wawancara bersama AA di Babaung, 27 September 2020

sarana sekolah, honor guru, honor tenaga kependidikan, biaya administrasi, biaya listrik dan sebagainya tidak bisa hanya mengandalkan dana BOS sehingga selalu ada biaya yang ditanggung oleh pihak Yayasan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pembiayaan yang juga minim membuat pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman mencari solusi untuk mengatasi kebutuhan akan tenaga pendidik untuk mengajarkan mata pelajaran umum di pondok pesantren dengan mencari tenaga pendidik dari sekolah lain disekitar lingkungan pondok pesantren, tenaga pendidik yang bersedia mengajar di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman sebagai sampingan dari pekerjaannya dengan gaji yang tidak seberapa. Seperti pernyataan penanggung jawab pendidikan kesetaraan berikut.

Sementara ini kami memang juga ngambil guru luar juga yang ngajar di SMP atau memiliki pekerjaan lain dan sambilan ngajar disini untuk sementara dengan gaji seadanya, seperti bapak A yang sekarang juga merupakan pegawai di kecamatan Pulau Hanaut.⁸⁴

Bapak A merupakan satu-satunya Tenaga yang mengajarkan mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, alasan A bersedia mengajar di Pondok Pesantren berdasarkan permintaan pengasuh. Selama mengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman ada beberapa problem yang ditemui seperti kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran umum, namun hal ini beliau atasi dengan mengarahkan santri-santri untuk mengeksplere

⁸⁴Wawancara bersama AA di Babaung, 27 September 2020

pengetahuan dari beberapa website-website pada saat HP santri dibagikan oleh pihak pondok pesantren. seperti dalam pernyataan A berikut.

Biasanya kan HP santri itu kan dikumpulkan dan pada saat hari libur minggu seperti itu baru dibagikan, disitu biasanya kesempatan santri, biasanya saya sampaikan untuk membuka website-website yang berupa pendidikan, baik itu Bahasa Inggris atau Matematika, karena mereka saya kasih tahu semua jawaban itu pada dasarnya ada di mbah google.⁸⁵

Selain terkendala dari segi sarana, A juga merasa waktu pembelajaran mata pelajaran bagi santri juga kurang, namun beliau tidak bisa banyak berkomentar mengenai ini karena kesibukan beliau juga di kecamatan. Yang menjadi problem besar bagi A adalah ketidakjelasan kurikulum yang harusnya digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran umum di PK-PPS. Sehingga beliau menggunakan kurikulum yang bervariasi dari kurikulum 2003 sampai kurikulum 2013. Ketidakjelasan buku pelajaran yang harusnya digunakan juga dialami oleh A, sehingga beliau lebih sering menggunakan materi yang bersumber dari internet.⁸⁶

Untuk lebih meningkatkan pembelajaran mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* A memberikan beberapa usulan dalam pernyataan beliau sebagai berikut:

Pertama, kurikulum yang seharusnya dipakai bisa diperjelas, memakai kurikulum yang sama dengan sekolah formal atau bagaimana, yang kedua semestinya teknik pembelajaran di pesantren *salafiyah* ini beda dengan sekolah formal, karena prinsipnya yang *salafiyah* ini kan mengarah ke agama, kemudian tingkat persentase yang menerima umum ini berapa persen, kemaren saya diminta pengasuh untuk bikin rpp dan silabus untuk akreditasi, dan saya kebingungan mencari acuan pembuatannya, karena memang untuk kurikulum khusus untuk pesantren yang merngarah ke umum ini

⁸⁵Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

⁸⁶Observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, 3 Oktober 2020

belum ada, apakah memang harus sama dengan sekolah formal, seharusnya sih berbeda, karena tingkat serapannya kurang, dan waktu pembelajaran juga tidak bisa mencapai untuk kompetensi sesuai dengan peraturan.⁸⁷

c. Solusi dari Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum di Pondok Pesantren *Salafiyah* Darul Aitam

Penulis mengalami kesulitan untuk menemukan hal-hal apa saja yang telah diupayakan oleh pihak Pondok Pesantren Darul Aitam dalam mencari solusi dari problem penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *salafiyah* Darul Aitam, dikarenakan yang menjadi problem terbesarnya adalah pelaksanaan kurikulum mata pelajaran umum sama sekali tidak diterapkan di Pondok Pesantren Darul Aitam. Sedangkan mata pelajaran umum adalah poin yang akan diujikan pada ujian kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*.⁸⁸

Menyadari karena tidak terlaksananya penerapan mata pelajaran umum sebagai mata pelajaran wajib di Pondok Pesantren Darul Aitam pengasuh memfasilitasi santri dengan perpustakaan yang banyak berisi buku-buku mata pelajaran umum, sehingga santri bisa belajar secara mandiri di waktu yang tidak ditentukan oleh pondok pesantren.

Sedangkan untuk pelaksanaan ujian kesetaraan yang berbasis komputer, Pondok Pesantren Darul Aitam masih menumpang ke Pondok Pesantren Darul Amin. Setiap menjelang ujian, Kementerian Agama selalu memberikan kisi-kisi soal ujian nasional kepada pihak pondok pesantren

⁸⁷Wawancara bersama A di Babaung, 3 Oktober 2020

⁸⁸Observasi di Pondok Pesantren Darul Aitam, 12 September 2020

sebagai gambaran materi pada ujian Nasional. Pondok Pesantren Darul Aitam, sebagai alternatif agar peserta didik siap menghadapi ujian kesetaraan, para pengajar memberikan kisi-kisi ujian kesetaraan yang didapat dari kemenag, seperti yang disampaikan AS salah seorang pengajar di Darul Aitam

Mengenai ujian kesetaraan, kami memang memerlukan persiapan untuk menghadapi ujian, sebelum ujian itu ada kisi-kisi dari yang mengadakan ujian, jadi itu yang kami pelajari sebelum menghadapi ujian, agar para santri bisa mempelajari mata pelajaran umum, agar siap dalam menghadapi ujiannya.⁸⁹

Disamping memberikan kisi-kisi ujian bagi santri yang akan menghadapi ujian kesetaraan para tenaga pengajar juga membimbing santri dalam mempelajari bahan-bahan ujian tersebut.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan pada Mata Pelajaran Umum di Pondok Pesantren se-Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di temukan beberapa temuan dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di tiga pondok pesantren *salafiyah* yang penulis teliti, antara lain:

1. Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin menerapkan kurikulum mata pelajaran umum dengan enam mata pelajaran umum yaitu, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diajarkan 1 kali

⁸⁹Wawancara bersama AS di Ketapang, 27 September 2020

pertemuan pada setiap kelas. Enam mata pelajaran tersebut diajarkan secara bergantian dalam setiap minggunya. Kurikulum yang digunakan yaitu KTSP untuk kelas 9 dan K13 untuk kelas 7 dan 8. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, resitasi dan penugasan. Sedangkan evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala dengan diberikan soal-soal latihan dan ulangan yang dilakukan secara serentak di akhir semester.

2. Pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman menerapkan kurikulum mata pelajaran umum dengan dua muatan mata pelajaran umum yaitu matematika dan Bahasa Inggris, diajarkan setiap hari Sabtu sebanyak 1 kali pertemuan pada setiap kelas. Kurikulum yang digunakan bervariasi dari kurikulum CBSA sampai K13, metode pembelajaran yang digunakan yaitu hafalan, ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sedangkan evaluasi yang dilakukan setiap minggu dengan setoran hafalan dan diberikan beberapa soal-soal latihan.
3. Pondok pesantren Darul Aitam tidak menerapkan kurikulum mata pelajaran umum, namun di pondok pesantren Darul Aitam menyediakan perpustakaan untuk para santri bisa belajar mata pelajaran umum secara mandiri. Sedangkan untuk menghadapi ujian kesetaraan, tenaga pendidik pondok pesantren Darul Aitam memberikan kisi-kisi ujian dan membimbing santri untuk mempelajari kisi-kisi tersebut agar santri siap menghadapi ujian.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* di Kotawaringin Timur, belum sepenuhnya

diterapkan bahkan sebagian pondok pesantren sama sekali tidak memberikan ruang untuk mata pelajaran umum dalam jam pembelajaran wajib di pondok pesantren *salafiyah*.

Kurikulum merupakan salah satu komponen wajib dalam sebuah sistem pendidikan, tidak terkecuali di lembaga pendidikan keagamaan Islam (kurikulum pendidikan pondok pesantren *salafiyah*). Dalam arti sempit kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran/bidang studi atau silabus dan isi dari pendidikan dan pembelajaran. Isi kurikulum (bidang studi) pada lembaga pendidikan keagamaan Islam, sebagian besar dan bahkan 100% adalah mata pelajaran agama Islam (kurikulum pendidikan pondok pesantren *salafiyah*) yang diambil dari kitab-kitab kuning/klasik yang diberikan secara bertahap dari sekuens yang sangat rendah atau sederhana menuju kepada kitab atau bahasan yang lebih tinggi atau kompleks sesuai dengan tingkat penjenjangan santri. Pada masing-masing lembaga pendidikan keagamaan Islam biasanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang menentukan kurikulum pendidikan pondok pesantren *salafiyah* yang menjadi konsumsi para santrinya.

Pondok pesantren dapat dikelompokkan berdasarkan segi isi atau materi yang diajarkan, atau dengan istilah lain dari segi kurikulumnya. Pembagian pola ini yang menjadi standar pokok atau yang menjadi tolak ukur di dalam mempolakannya, adalah materi pelajaran yang bersifat intrakurikuler dan metode penyampaian, yang diikuti pula dengan kepopuleran pola-pola tersebut di dunia pondok pesantren.

Daulay membagi pola pondok pesantren dari segi kurikulumnya, seperti berikut ini:⁹⁰ Pola I, materi pelajaran yang dikemukakan di pondok pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab klasik. Metode penyampaian adalah wetonan dan sorogan, tidak memakai sistem klasikal. Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum tidak diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja, yang paling dipentingkan adalah pendalaman ilmu-ilmu agama semata-mata melalui kitab klasik.

Pola II, pola ini hampir sama dengan pola I di atas, hanya saja pada pola II proses belajar mengajar diajarkan secara klasikal dan non klasikal, juga dididik ketrampilan dan pendidikan berorganisasi. Pada tingkat tertentu diberikan sedikit pengetahuan umum. Santri telah dibagi jenjang pendidikan mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Metode yang digunakan adalah wetonan, sorogan, hafalan dan musyawarah.

Pola III, pada pola ini materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum, dan ditambah dengan memberikan aneka macam pendidikan lainnya, seperti ketrampilan, kepramukaan, olahraga, kesenian dan pendidikan berorganisasi, dan sebagian telah melaksanakan program pengembangan masyarakat.

Pola IV, pola ini menitikberatkan pada pelajaran ketrampilan di samping pelajaran agama. Ketrampilan ditunjukkan untuk bekal kehidupan

⁹⁰Haidar Putra Daulay, *Historisitas Dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, h. 33-34

bagi seorang santri setelah tamat dari pondok pesantren. Ketrampilan yang diajarkan adalah pertanian, pertukangan, peternakan.

Pola V, Pada pola ini materi yang diajarkan di pondok pesantren diantaranya adalah pengajaran kitab-kitab klasik. Pondok pesantren mulai mengadakan pendidikan model madrasah dan ketrampilan, selain mengajarkan mata pelajaran agama, juga mengajarkan mata pelajaran umum. Kurikulum madrasah pondok pesantren dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama, kurikulum yang dibuat oleh pondok pesantren. Kedua, kurikulum pemerintah dengan memodifikasi materi pelajaran agama.

Pada pola terakhir ini, pondok pesantren ini dilengkapi dengan sekolah umum. Materi pelajaran umum pada sekolah umum yang ada di pondok pesantren seluruhnya berpedoman kepada kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan materi pelajaran agama disusun oleh pondok pesantren sendiri. Kurikulum pendidikan agama yang diajarkan di sekolah, pada waktu-waktu yang sudah terjadwal santri menerima pendidikan agama lewat membaca kitab-kitab klasik. Sedangkan beberapa pondok pesantren yang tergolong besar telah membuka universitas atau perguruan tinggi.

Beberapa tipologi pondok pesantren tersebut di atas, yang dibedakan berdasarkan segi kurikulumnya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pendidikan di pondok pesantren sangat bervariasi, diantaranya dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, seperti sekolah keagamaan (MI, MTS, MA dan PT Agama Islam) dan sekolah umum (SD,

SMP, SMU, dan PT Umum). Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. Pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah, dan pondok pesantren yang sekedar menjadi tempat pengajian.⁹¹

Berdasarkan pembagian secara kurikulum tersebut, pondok pesantren Salafiyah dalam perkembangannya ada yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulumnya, dan disusun sendiri menurut kebutuhan. Sehingga kurikulum yang disusun tidak menggunakan kurikulum yang disusun oleh pemerintah secara nasional, ijazah yang diterima tidak mendapat pengakuan pemerintah secara formal.⁹²

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren *Salafiyah*, tertulis bahwa:

Struktur kurikulum mata pelajaran yang wajib diajarkan pada Pondok Pesantren *Salafiyah* tingkat *Wustha* paling sedikit : 1). al Qur'an, 2). Hadits, 3) Aqidah, 4) Akhlaq, 5) Fiqih, 6) Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam, 7) Bahasa Arab, 8). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
9) Matematika, 10) Bahasa Indonesia, 11) Bahasa Inggris, 12) Ilmu Pengetahuan Alam, 13) Ilmu Pengetahuan Sosial.⁹³

⁹¹Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok ...*, h. 6-8

⁹²M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000, h. 149-150

⁹³SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 Tahun 2018

Kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* harus memuat tentang pembelajaran al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an, Hadist dan Mustalahal Hadits, Tajwid, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Imla dan Khat) dan Tarikh. Namun pihak penyelenggara pendidikan diniyah dalam menentukan referensi kitab-kitab yang dipakai yang dijadikan kurikulum tentu berbeda-beda, meskipun demikian biasanya mereka lebih banyak menggunakan kitab-kitab klasik yang *mu'tabarah* atau kitab-kitab yang sanad keilmuannya sampai kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Khusus muatan atau isi kurikulum pendidikan diniyah tingkat *wustha* pada lembaga pendidikan keagamaan Islam berlaku bidang-bidang keilmuan dan kitab-kitabnya, sebagai berikut ini:

- a. Bidang Tajwid, kitab yang digunakan adalah Tuhfah al-Athfal, Hidayah al- Mustafid, Mursyid al-Wildan, Syafa' al-Rahman.
- b. Bidang Aqidah, kitab kitab yang digunakan adalah Aqadah al-Awwam, Al Dina al-Islami.
- c. Bidang Fiqih, kitab yang digunakan adalah Fath al-Qarib (Taqrib), Minhaj al-Qawim Safinah al-Shalah.
- d. Bidang Akhlak, kitab yang digunakan adalah Ta'lim al-Muta'allim.
- e. Bidang Nahwu, kitab yang digunakan adalah Jurumiyah, Mutammimah, Nazham 'Imrithi, al-Makudi, al'Asymawy.
- f. Bidang Sharaf, kitab yang digunakan adalah Nazham Maksud, dan al-Kailani.

g. Bidang Tarikh, kitab yang digunakan adalah Nūr al-Yaqīn.⁹⁴

Dari berbagai bidang keilmuan dan kitab-kitab tersebut di atas kemudian didistribusikan ke masing-masing jenjang kelas dan semester ganjil dan genap secara berkesinambungan. Setelah kurikulum pendidikan Keagamaan Islam ditambah lagi kurikulum mata pelajaran umum. Yang meliputi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu pengetahuan Sosial.

Dalam SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1772 tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 3543 tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok pesantren tidak ditemui ketentuan jam mata pembelajaran per minggu untuk mata pelajaran umum, begitu pula dengan teknis pembelajarannya, kemudian penulis menanyakan hal tersebut kepada bidang Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Pada Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur terkait ketentuan penerapan jam mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*.

Jam pembelajaran mata pelajaran umum untuk pondok pesantren pendidikan kesetaraan, minimal satu mata pelajaran pendidikan umum ada dua jam pelajaran atau satu kali pertemuan pada setiap minggunya. Dan untuk teknis pembelajarannya tidak ditentukan hanya pada jam pembelajaran wajib

⁹⁴Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003, h. 33

pondok pesantren saja, karena pendidikan pada pondok pesantren 24 jam. Pembelajaran mata pelajaran umum juga boleh diterapkan pada hari libur pondok pesantren, jadi waktu pembelajaran fleksibel bisa menyesuaikan dengan kebijakan pondok pesantren tidak ada batas ketentuan seperti jam sekolah formal biasa.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan referensi yang penulis temui berhubungan dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, penulis merumuskan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* dengan mengkombinasikan struktur kurikulum pendidikan diniyah formal yang terdapat pada SK Dirjen Pendis nomor 6963 tahun 2017 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal *Wustha* dan hasil wawancara bersama ketua bidang Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan pada Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur akan didapati struktur kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren sebagai berikut.

Tabel 15. Rancangan Struktur Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Komponen Mata Pelajaran	Kelas dan Alokasi Waktu Per Minggu		
	1	2	3
A. Keagamaan Islam			
1. Al-Qur'an-Ilmu Tafsir	10	10	10
2. Hadis-Ilmu Hadis	2	4	4
3. Aqidah-Tauhid	4	2	4
4. Fiqh-Ushul Fiqh	4	4	6

5. Akhlak-Tasawuf	2	2	4
6. Tarikh	2	2	2
7. Bahasa Arab	10	10	12
B. Pendidikan Umum			
8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
9. Matematika	2	2	2
10. Bahasa Indonesia	2	2	2
11. Bahasa Inggris	2	2	2
12. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
13. Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
C. Muatan Lokal	10	10	2
Jumlah	56	56	56

Komponen muatan lokal (C) merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu pesantren yang materinya menuntut untuk dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri,⁹⁵ Berdasarkan pengamatan penulis dari jadwal pelajaran di tiga pondok pesantren di kotawaringin Timur muatan lokal diisi dengan Kaligrafi dan Latihan Khutbah/Pidato (*muhadharah*).

Perhatian pemerintah dalam memandang pendidikan pesantren telah mengalami perubahan sejak era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menyusun produk hukum baik berupa perundang-undangan dan peraturan yang mengakui dan mendukung eksistensi sistem pendidikan pesantren. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan terbitnya SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1772 dan 3543 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*, namun

⁹⁵SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 Tahun 2017

dengan adanya SK tersebut juga menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya adalah persoalan pondok pesantren yang belum bisa menyesuaikan dengan standar pendidikan berdasarkan ketentuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* yang telah diatur oleh pemerintah khususnya pada kurikulum mata pelajaran umum.

Standar pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* bukanlah standar yang menghapus ciri khas pesantren dengan beragam epistemologi keilmuannya, namun standar itu merupakan standar umum pesantren yang bisa dianggap layak untuk disamakan dengan pendidikan formal. Pada tataran pelaksanaan implementasi pondok pesantren *salafiyah* khususnya di Kotawaringin Timur mempertahankan pembelajaran kitab kuning. Pondok pesantren tidak menolak dan tidak pula menerima sepenuhnya kurikulum pemerintah namun mendapatkan pengakuan dari pemerintah sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga membedakan dengan pesantren yang lain yang mengadopsi standar penuh kurikulum pemerintah dalam pembelajarannya.

Karakteristik kurikulum pondok pesantren *salafiyah* di Kotawaringin Timur menunjukkan ilmu-ilmu keagamaan lebih dominan dibandingkan disiplin keilmuan umum, hal ini menunjukkan bahwa struktur kurikulum pondok pesantren *salafiyah* di Kotawaringin Timur memiliki perbedaan dibandingkan lembaga pendidikan formal walaupun sama-sama diakui oleh pemerintah setara dengan madrasah formal. Karakteristik kurikulum yang disusun oleh pemerintah dalam SK Dirjen nomor 1772 dan nomor 3543 tahun

2018 tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* juga lebih menonjolkan ilmu-ilmu keagamaan dan menerima sebagian kecil kurikulum modern menurut hemat penulis hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, sebagaimana dikutip oleh Abuddin menyebutkan lima ciri kurikulum pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan teknikya bercorak agama.
- b. Meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya. Yaitu kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Di samping itu juga memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual.
- c. Bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan pengembangan sosial.
- d. Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik seperti seni, pendidikan jasmani, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing.

- e. Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik.⁹⁶

Ciri-ciri ini menggambarkan adanya berbagai tuntutan yang harus ada dalam kurikulum pendidikan Islam termasuk dalam hal ini kurikulum pesantren. Tuntutan ini terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman sekarang tentu sangat berbeda dengan zaman klasik dulu. Tuntutan di zaman sekarang ini lebih kompleks. Oleh karena itu, sebaiknya ada ciri-ciri permanen dan ciri-ciri responsif terhadap tuntutan zaman di dalam kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri permanen merupakan ciri-ciri elementer yang melekat pada pendidikan Islam, misalnya dijiwai oleh nilai-nilai ketauhidan. Sementara itu, ciri-ciri responsif merupakan sikap dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, seperti bersikap adaptif-selektif terhadap kecenderungan global.

Di samping itu, struktur kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan, pondok pesantren *salafiyah* dalam pandangan penulis sudah memuat prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pendidikan Islam seperti yang dikemukakan oleh Al Toumy Al Syaibany menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaklah mengacu pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar baginya. Adapun prinsip-prinsip umum yang terpenting adalah seperti berikut:

- a. Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai nilainya.

⁹⁶Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta[: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 127

- b. Prinsip-prinsip menyeluruh (*universal*) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- c. Keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- d. Ada keterkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan pelajar, begitu juga dengan alam sekitar fisik dan sosial tempat para peserta didik berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan, pengalaman, dan sikapnya.
- e. Pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan masalahnya serta memelihara perbedaan di antara alam sekitar dan masyarakat.
- f. Prinsip perkembangan dan perubahan.
- g. Prinsip pertautan antar mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.⁹⁷

Dalam sudut pandang peneliti, pondok pesantren *salafiyah* diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan arah kurikulum keagamaan Islam yang menjadi ciri khas pondok pesantren beserta segala instrumen penilaian di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mujammil Qomar bahwa pesantren justru memiliki kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan, memilih, dan memberlakukan suatu jenis atau model kurikulum yang digunakan di pesantren. Pemerintah sama sekali tidak mengusik kurikulum pesantren ini, karena tidak memiliki akibat pengakuan pada ijazah yang di

⁹⁷Omar Mohammad Al-Thoumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 520-523

keluarkan oleh pesantren terkait dengan studi lanjutan di lembaga pendidikan formal atau pekerjaan kedinasan.⁹⁸

Afiful Khair mengatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal harus mengadakan perubahan dan pembaharuan agar menghasilkan generasi yang tangguh dan berpengetahuan luas dengan kekuatan jiwa pesantren serta memiliki keteguhan untuk mengembangkan pengetahuan yang bersumber pada al-qur'an dan hadis. Pesantren saat ini dihadapkan dengan arus globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan cepatnya laju informasi dan teknologi. Karena itu, pesantren harus melakukan perubahan format, bentuk, orientasi dan metode pendidikan dengan catatan tidak sampai merubah visi, misi dan orientasi pesantren itu, akan tetapi perubahan tersebut hanya pada sisi luarnya saja, sementara pada sisi dalam masih tetap dipertahankan. Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan SDM yang handal.⁹⁹

Jika dilihat dari pembahasan di atas, kurikulum yang ditetapkan dalam SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1772 dan 3543 tahun 2018 sudah menyesuaikan dengan pendapat ahli terkait dalam pelaksanaan pendidikan Islam, hanya saja dalam penerapannya di pondok pesantren *salafiyah* Kotawaringin Timur ketentuan mengenai kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan masih tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Pesantren

⁹⁸Mujammil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 157

⁹⁹Moh. Afiful Khair, "Manajemen Pembaharuan Pesantren di Tengah Tantangan Kehidupan Masyarakat Global", *Jurnal Fikrotuna*, Vol. 4, No. 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Desember, 2016, h. 2

harus mampu menghadapi tuntutan perubahan zaman yang tidak terbatas sebagai akibat dari kuatnya arus modernitas. Maka pesantren harus mampu mencetak santri sebagai kader bangsa yang tidak hanya berkutat dalam kemampuan bidang kitab kuning saja, tetapi harus memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Atas dasar inilah, pesantren harus melakukan terobosan baru dengan melakukan perubahan sistemnya dengan mengintegrasikan kurikulum baru yang dapat mengimbangi antara kecerdasan spritual dan kecerdasan intelektual sehingga setelah santri lulus dari pesantren, mereka siap untuk berkompetisi di tengah masyarakat.

2. Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* se-Kotawaringin Timur

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 7 problem dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* se-Kotawaringin Timur. Tujuh problem tersebut antara lain: a) Tenaga pendidik, b) alokasi waktu belajar, c) substansi kurikulum, d) kedisiplinan santri, e) sarana prasarana, f) pembiayaan dan g) kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan dan pihak penyelenggara.

a. Tenaga Pendidik Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Pendidik pada Pondok Pesantren *Salafiyah* harus memenuhi kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar kualifikasi umum sebagaimana meliputi:

- 1) Beragama Islam,

- 2) Berakhlak mulia, dan
- 3) Sehat jasmani dan rohani.¹⁰⁰

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Standar kompetensi merupakan kompetensi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi:

- 1) Kompetensi pedagogik;

Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰¹

Sedangkan Paulo Freire berpendapat, bahwa kompetensi pedagogis itu meliputi kemampuan, antara lain:

- a) Memahami peserta didik,
- b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran,
- c) Melaksanakan pembelajaran,
- d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta

¹⁰⁰SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 Tahun 2018

¹⁰¹Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf a.

- e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰²

Secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran memang perlu mendapat perhatian yang serius, karena akan menentukan keberhasilan Proses Belajar Mengajar (PBM).

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, disiplin, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.¹⁰³ Sedangkan menurut M.A. May, bahwa kompetensi kepribadian itu meliputi kemampuan antara lain:

- a) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil,
- b) Memiliki kepribadian yang dewasa,
- c) Memiliki kepribadian yang arif,
- d) Memiliki kepribadian yang berwibawa, dan
- e) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.¹⁰⁴

Kepribadian guru memang memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Karena akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan kepribadian peserta didik. Ini dapat dimaklumi, karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk

¹⁰²Paulo Freire, *Pedagogi of the Oppressed*, New York: The Continuum Publishing Company, 1993, h. 76

¹⁰³Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf b

¹⁰⁴M.A. May, *The Foundation of Personality Psikology of Work*. P.S. Archillen: Mc Craw-Hill, Book Company, 1983, h. 32

mencontoh pribadi gurunya sebagai teladan. Oleh karena itu wajar, ketika orang tua akan mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah, akan mencari tahu terlebih dahulu siapa guru-guru yang akan membimbing dan mendidik anaknya.

3) Kompetensi professional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.¹⁰⁵ Sedangkan lebih khusus, ruang lingkup kompetensi profesional guru dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a) Memahami, memilih, dan menentukan secara tepat jenis-jenis materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik,
- b) Menguasai, menjabarkan dan mengembangkan materi standar
- c) Mengurutkan materi pembelajaran dengan batasan ruang lingkungnya,
- d) Mengorganisasikan materi pembelajaran dengan teori elaborasi,
- e) Memahami Standar Nasional Pendidikan (SNP),
- f) Memahami, menguasai dan dapat menerapkan konsep dasar, landasan-landasan serta tujuan kependidikan, baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya,

¹⁰⁵Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf c

- g) Memahami dan dapat menerapkan teori belajar serta prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik,
- h) Memahami dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP),
- i) Mengelola kelas,
- j) Merumuskan tujuan pembelajaran,
- k) Memahami dan melaksanakan pengembangan kemampuan peserta didik dalam materi pembelajaran,
- l) Memahami dan melaksanakan penelitian dalam pembelajaran menurut bidang studinya masing-masing,
- m) Memahami dan melaksanakan konsep pendidikan individual
- n) Memahami dan dapat menerapkan metode pengajaran yang bervariasi,
- o) Mampu mengembangkan dan mendayagunakan berbagai alat, media dan sumber pembelajaran yang relevan,
- p) Mampu mengelola, mengorganisasikan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang relevan,
- q) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan
- r) Melaksanakan penilaian yang sebenarnya (*authentic Assessment*).¹⁰⁶

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Sehingga

¹⁰⁶E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2008, h. 136-137

seorang guru dituntut untuk menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang studinya.

4) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹⁰⁷

Kompetensi sosial ini harus dimiliki dan dikuasai oleh guru memang cukup beralasan, karena guru adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan lingkungannya tidak dapat dilepaskan, yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran di sekolah saja. Di samping itu, karena guru juga sebagai pembina, tokoh, panutan, petugas dan agen perubahan sosial masyarakatnya. Sehingga diharapkan guru merupakan kunci penting dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Kompetensi tidak hanya berkenaan dengan kemampuan pribadi untuk menjalankan tugas, akan tetapi termasuk juga kemampuan untuk bekerja sama secara kelompok (tim) dalam sebuah lembaga atau organisasi sehingga tujuan yang dicanangkan dapat tercapai. Kompetensi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, dan tujuan lembaga dapat

¹⁰⁷Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf d

tercapai saat individu dapat menjalankan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok sesuai standar yang ditetapkan.¹⁰⁸

Kompetensi terdiri dari beberapa kategori, mulai dari tingkat dasar atau sederhana hingga tingkat yang lebih sulit atau kompleks yang berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, dan lazimnya terdiri dari penguasaan minimal kompetensi dasar, praktik kompetensi dasar, serta penambahan, penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan.¹⁰⁹

Menurut Mulyasa, Kompetensi sebagai suatu kemampuan mengandung enam aspek yaitu:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar melaksanakan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya,

¹⁰⁸Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 28

¹⁰⁹Jamal Ma'mur Asmani, *7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional* Yogyakarta: Power Books, 2009, h. 38

misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik.

- 4) Nilai (*value*), adalah standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran demokratis, dan lainnya.
- 5) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- 6) Minat (*interest*), adalah kecenderungan seorang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau untuk mempelajari sesuatu.¹¹⁰

Sedangkan jika ditinjau dari konsepsi pendidikan Islam, seorang guru harus memiliki beberapa kompetensi yang lebih filosofis-fundamental, setidaknya ada tiga kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu:

- 1) Kompetensi personal-religius, yaitu memiliki kepribadian berdasarkan Islam dan di dalam dirinya melekat nilai-nilai yang dapat diinternalisasikan kepada peserta didik, seperti jujur, adil, suka musyawarah, disiplin, dan lain-lain.
- 2) Kompetensi sosial-religius, yaitu memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, suka menolong, egalitarian, toleransi, dan sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang dapat diwujudkan dalam proses pendidikan.

¹¹⁰E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 39

- 3) Kompetensi profesional-religius, yaitu memiliki kemampuan menjalankan tugasnya secara profesional, yang didasarkan atas ajaran agama Islam.¹¹¹

Berdasarkan pembahasan mengenai kompetensi guru di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara kualifikasi guru di pendidikan umum dan guru di pondok pesantren. Kompetensi tenaga pendidik di pondok pesantren harus berlandaskan nilai religiositas, hal inilah yang membuat pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam tidak menerima sembarangan orang sebagai tenaga pendidik, agar tidak mengganggu emosional santri untuk tetap fokus beribadah.

b. Alokasi Waktu Belajar Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* tidak luput dari persoalan keterbatasan waktu. Bermula dari masalah pendanaan serta minimnya kualitas guru yang berkompeten, dan juga dalam hal alokasi waktu. Sementara alokasi waktu pembelajaran yang sangat terbatas berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembelajaran.

Sebagaimana diketahui, proses pembelajaran santri pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dari Dirjen pendidikan Islam seperti di Pondok Pesantren Darul Iman yang

¹¹¹Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif (Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa)*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 61

mengalokasikan 2 jam pelajaran per minggu untuk 2 mata pelajaran umum, Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin yang mengalokasikan 2 jam pelajaran per minggu untuk 6 mata pelajaran dan Pondok Pesantren Darul Aitam yang memilih untuk tidak melaksanakan mata pelajaran umum.

Terbatasnya waktu belajar sangat berpengaruh pada pencapaian hasil belajar. Karena habisnya alokasi waktu yang ditetapkan, tidak jarang Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh ustad-ustadzah dan santri terhenti atau ditunda sebelum materi selesai dibahas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian tujuan hasil belajar dan pemahaman siswa akan materi yang dipelajari.

Dalam keterbatasan waktu yang diberikan perlu dilihat pendapat Slameto, menurutnya waktu pembelajaran ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar dipondok pesantren, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Dalam satu hari kita mempunyai waktu sebanyak 24 jam, selama 24 jam ini santri dapat mengalokasikan waktu dalam sehari untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik itu disekolah maupun dirumah.¹¹²

Pendapat Slameto ini senada dengan budaya pondok pesantren yang kesehariannya berada dalam ruang lingkup pendidikan, jadi pembelajaran tidak terbatas pada waktu yang telah ditentukan saja, tapi bisa menggunakan waktu lain diluar pembelajaran wajib.

¹¹²Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta 2013, h. 69

**c. Substansi Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren
*Salafiyah***

Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat bertahan di masyarakat karena dengan adanya kurikulum selain dapat membentuk manusia-manusia yang matang juga dapat membentuk manusia yang berkepribadian integral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Melihat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dasar dari kurikulum.

Kurikulum sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua, masyarakat dan pihak siswa itu sendiri. Pada dasarnya kurikulum memuat hal-hal yang kompleks yang sifatnya menyeluruh dan dalam penyusunannya bersumber dari berbagai landasan pengetahuan dan didalamnya terdapat pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk mencapai semua tujuan dalam pendidikan.

Pendidikan di pondok pesantren sudah mulai diperhatikan sejak satu dekade belakangan ini, dan pendidikan di pondok pesantren pun yang dinaungi oleh Kementerian Agama terbagi kepada beberapa macam, yang paling sering dikenal seperti madrasah, pendidikan mu'adalah, pendidikan

diniyah formal (PDF) dan yang baru saja dikeluarkan kebijakannya adalah Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah (PK-PPS). Dibentuknya (PK-PPS) agar pondok pesantren *salaf* yang menjalankan tradisi pembelajaran berdasarkan kitab kuning bisa dipertahankan dan lulusannya bisa mendapat ijazah yang disetarakan dengan sekolah formal.

Pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren *salafiyah* tidak bisa disamakan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) karena intensitas pembelajarannya pun berbeda, dan tujuan pembelajarannya juga berbeda, sehingga penulis menyimpulkan tidak bisa kurikulum yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan pada umumnya digunakan pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*. Dalam SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 3543 tidak dijelaskan secara rinci mengenai substansi kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah*, sehingga hal ini masih menjadi kebingungan dan problem bagi tenaga pendidik kurikulum mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah*.

Secara historis penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren. Kecuali kiai, kitab kuning mempunyai peran penting dalam menentukan arah kurikulum

pesantren. Kitab kuning turut memengaruhi kehidupan santri dalam membangun peradaban dan karakter Islam Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (2) mengamanatkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Apabila konsep kurikulum tersebut diterapkan dalam konteks pesantren maka perlu diversifikasi kurikulum tersebut sebagai upaya untuk menetapkan standar minimal kurikulum pesantren serta penyamaan visi dan misi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), agar keberadaan kurikulum formal pesantren diakui secara nasional.¹¹³

Penataan ulang terhadap kurikulum pendidikan pesantren didasari oleh beberapa pertimbangan yaitu; 1) pendidikan pesantren, oleh masyarakat dianggap kurang bermutu sehingga minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren menurun; 2) pendidikan pesantren memiliki kelemahan terutama dari faktor kepemimpinan, metodologi, dan adanya disorientasi pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi, sehingga orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren identik dengan golongan ekonomi bawah; 3) masyarakat menganggap bahwa budaya

¹¹³Lailial Muhtifah, *Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren*, Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati, Vol. XVII No. 2 2012/1433, h. 204-205, DOI Link: [10.15575/jpi.v27i2.507](https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507)

akademik dan budaya ilmiah di pesantren cenderung lemah dibandingkan dengan lembaga pendidikan pada umumnya.¹¹⁴

Struktur kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* memang tidak dijelaskan secara rinci dalam SK Dirjen nomor 1772 ataupun nomor 3543 tahun 2018, dalam SK tersebut hanya ditentukan mata pelajaran umum yang wajib diajarkan saja, namun berpegang dengan pendapat Lailial Muhtifah bahwa kurikulum PK-PPS ini bisa saja diambil dari kurikulum standar pendidikan nasional yang kemudian dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

d. Kedisiplinan Santri Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Problem pembelajaran yang berkaitan dengan kedisiplinan santri dialami oleh Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, disiplin diperlukan oleh siapa saja dan dimana saja, termasuk bagi para santri. Disiplin diperlukan oleh para santri dalam perkembangan pribadi dirinya. Melalui disiplinlah santri dapat belajar berperilaku dengan baik agar diterima oleh warga pondok pesantren maupun masyarakat. Perilaku santri di pondok pesantren yang tidak mengarah pada nilai-nilai kedisiplinan sehingga tidak mematuhi peraturan dan tata tertib pondok pesantren yang ada tidak hanya disebabkan oleh dirinya sendiri namun ada berbagai faktor yang mempengaruhinya.

¹¹⁴Bagus Tris Atmaja, *Rekonstruksi Pendidikan Pesantren dengan Membangun Budaya Ilmiah dan Islamisasi Sains. Pesantren dan Peradaban Islam*. Amien Haedari (Ed.), Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, h. 359-360

Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru, santri dan lingkungan.

- 1) Faktor dari guru yaitu guru sebagai teladan bagi santri yang masih suka datang terlambat pada saat jam pembelajaran sehingga kemungkinan santri yang terlambat masuk ke kelas karena mencontoh keteladanan guru yang tidak baik.
- 2) Faktor dari santri yaitu kurangnya kesadaran diri santri dalam mematuhi peraturan yang berlaku seperti sikap santri yang tidak disiplin saat berada di kelas, santri yang terlambat datang masuk ke kelas dan santri yang tidak menjalankan tugas piket.
- 3) Faktor dari lingkungan yaitu ketidaktertiban di lingkungan pondok pesantren, suasana gaduh di lingkungan pondok pesantren karena santri menggedor-gedor pembatas kelas dan dari pelaksanaan di lingkungan pondok pesantren yang tidak terduga.¹¹⁵

Problem kedisiplinan santri ternyata tidak hanya disebabkan oleh santri itu sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh guru kelas dan lingkungan pondok pesantren.

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

Salafiyah

¹¹⁵Mahasti Windha Wardhani, *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Siswa Sdn Kepek Pengasih Kulon Progo Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 19 Tahun ke-7 2018, h. 1885

Dalam juknis penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* dibahas terkait sarana dan prasarana yang harus ada di pondok pesantren, poin dari sarana dan prasarana tersebut antara lain:

- 1) Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2) Pondok pesantren *salafiyah* penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang belajar, ruang tenaga pendidik dan/atau kependidikan, instalasi daya dan jasa, tempat beribadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 3) Memiliki ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajarnya.
- 4) Pondok Pesantren *salafiyah* penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menggunakan sarana prasarana lain yang dimilikinya untuk menunjang proses pembelajaran.¹¹⁶

Sarana dan prasaran pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis dan sifatnya.

- 1) Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar. Sarana pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran, seperti

¹¹⁶SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 Tahun 2018

alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung, seperti gedung, tanaman, halaman.

- 2) Ditinjau dari jenisnya yaitu: *pertama*, fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berwujud benda mati yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha, seperti kendaraan, komputer, mesin tulis, dan sebagainya. *kedua*, fasilitas non fisik, segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan, seperti manusia, jasa, uang.
- 3) Ditinjau dari sifat barangnya yaitu: (1) barang tak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai, seperti kapur tulis, tinta, kertas, penghapus dan sebagainya; barang tak habis pakai, seperti komputer, mesin tulis, kendaraan dan sebagainya. (2) barang tidak bergerak yaitu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti gedung, sumur dan sebagainya.¹¹⁷

Dari kualifikasi sarana prasarana di atas sebagian besar telah terpenuhi oleh pondok pesantren *salafiyah* di Kotawaringin Timur, namun ada beberapa sarana dan juga prasarana yang belum terpenuhi, sehingga menjadi faktor penghambat dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*. Seperti problem sarana dan prasarana yang dirasakan oleh Pondok Pesantren Darul Iman dan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin dengan keterbatasan buku-buku bacaan mata pelajaran umum dan ruang perpustakaan.

¹¹⁷Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 115

Perpustakaan memegang peranan penting dalam lingkungan pendidikan, termasuk juga di pondok pesantren. Menurut Bafadal ada beberapa fungsi perpustakaan di lingkungan pendidikan sebagai berikut.

- 1) Fungsi Edukatif, segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama koleksi yang dikelolanya banyak membantu para santri untuk belajar dan memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan, sehingga di kemudian hari para santri memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut.
- 2) Fungsi Informatif, mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para santri dan guru.
- 3) Fungsi Rekreasi, fungsi ini bukan merupakan fungsi utama dari dibangunnya perpustakaan, namun hanya sebagai pelengkap saja guna memenuhi kebutuhan sebagian anggota masyarakat pondok pesantren akan hiburan intelektual.
- 4) Fungsi Riset dan Penelitian, koleksi perpustakaan dapat dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana.¹¹⁸

Lebih lanjut Bafadal menyatakan manfaat perpustakaan di lingkungan sebagai berikut.

- 1) Perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan santri terhadap membaca.
- 2) Perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar santri.

¹¹⁸Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h.

- 3) Perpustakaan dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya santri dapat belajar dengan mandiri.
- 4) Perpustakaan dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca.
- 5) Perpustakaan dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa.
- 6) Perpustakaan dapat melatih santri untuk bertanggung jawab.
- 7) Perpustakaan dapat memperlancar santri dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran.
- 8) Perpustakaan dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran.
- 9) Perpustakaan sekolah dapat membentuk santri, guru-guru dan staf pondok pesantren dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹⁹

Perpustakaan menjadi media dan pusat informasi serta sumber ilmu pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya untuk digali, ditimba, dan dikembangkan. Ketersediaan koleksi di perpustakaan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang bertugas menyediakan informasi bagi pembaca dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pembaca. Maka salah satu usaha yang dapat dilaksanakan oleh suatu perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi pembaca dalam memperoleh informasi adalah adanya pengadaan koleksi yang terencana dan terarah.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 5

Keberadaan perpustakaan sangat penting untuk menunjang pengetahuan santri, karena alokasi waktu pembelajaran untuk mata pelajaran umum di pondok pesantren sangat terbatas, maka perpustakaan bisa menjadi alternatif siswa untuk memperdalam ilmu pengetahuannya terutama pada mata pelajaran umum, oleh karena itu di samping keberadaan perpustakaan, ketersediaan buku-buku bacaan yang menarik dan bermutu akan sangat memotivasi siswa dalam memperluas pengetahuannya.

f. Pembiayaan

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman, Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, dan Pondok Pesantren Darul Aitam merupakan lembaga pendidikan Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur. Operasional pesantren-pesantren ini bersumber dari dana BOS dan juga pengasuh/pemilik yayasan. Menurut SK Dirjen Pendis nomor 3543 tahun 2018, biaya pengelolaan bersumber dari: 1) penyelenggara, 2) pemerintah, 3) pemerintah daerah, 4) masyarakat, dan/atau 5) sumber lain yang sah.¹²⁰

Pembiayaan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah*, terdiri atas:

- 1) Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

¹²⁰SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1772 Tahun 2018

- 2) Biaya operasi meliputi: a. gaji pendidik/ustadz dan tenaga kependidikan serta segala insentif atau tunjangan yang melekat pada gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya.
- 3) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik/santri untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.¹²¹

Setiap pondok pesantren *salafiyah* yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan berhak menerima bantuan biaya operasional dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan biaya inilah yang diandalkan pondok pesantren *salafiyah* mengingat dari tiga pondok pesantren memungut biaya infak bulanan yang tidak terlalu besar, bahkan gratis seperti Pondok Pesantren Darul Aitam dan Darul Iman.

Problem utama dari pembiayaan adalah karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali. Sebelum adanya dana BOS sumber dana utama operasional pondok pesantren, rata-rata diperoleh dari iuran SPP santri. Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap, meskipun secara nominal sebenarnya jumlah dana yang dapat dikumpulkan tidak seberapa, mengingat kebanyakan pondok pesantren berada di pinggiran kota/pedesaan dan

¹²¹SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 Tahun 2018

melayani pendidikan bagi santri yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi kurang mampu seperti petani, buruh, dan pegawai rendah lainnya.¹²²

Pendeknya, pondok pesantren memperoleh pemasukan dari komponen SPP dalam jumlah yang tidak besar karena pondok pesantren sendiri harus menetapkan besaran biaya SPP yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di mana ia berada. Namun hal ini sudah mengalami perubahan seiring dengan kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh sekolah dasar dan menengah. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup pembiayaan pendidikan yang diperlukan.

Sumber dana lainnya adalah bantuan yang diberikan masyarakat berupa zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Sumber dana ini terbilang tidak tetap. Selain itu, jumlah dan keberadaannya tidak dapat dipastikan. Ini dapat dimengerti, mengingat masalah pengelolaan zakat dan peruntukannya sendiri. Bantuan lain yang bersifat insidental adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana halnya dengan ZIS, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Imbal Swadaya, BOP, BKG, dan BKS, selain lebih bersifat insidental dan tidak menyeluruh, juga tidak seluruh madrasah memperolehnya.¹²³

Dalam hal ini, faktor kedekatan unsur penyelenggara pondok pesantren dengan pihak pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap

¹²²Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan dalam Perspektif Islam*, Jurnal At-Ta'dib Vol. 8 No. 2, 2013, h. 234

¹²³Ahmad Nunu, *Pembiayaan Pendidikan di Madrasah dan Peranan Pemerintah Daerah di Era Otonomi*, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Bandung, Vol. 5 No. 2 April-Juni 2007, h. 123

kelancaran bantuan tersebut. Adapun pondok pesantren yang tidak memiliki akses kepada pihak-pihak tertentu sangat sulit mendapatkannya. Di sisi lain, persoalan SDM yang bisa dikatakan belum memadai, selain keterbatasan pengetahuan mengenai sirkulasi dan pengaturan mengenai anggaran dalam pembiayaan, merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan tidak adanya analisis yang panjang mengenai, bagaimana, mengapa, dan seperti apa pembiayaan itu dilakukan. Hal ini diperparah dengan ketertutupan akses yang menyebabkan tidak adanya usaha untuk mencari dan mengembangkan peluang. Alhasil, lembaga bersifat eksklusif, hanya mengandalkan dana dari pemerintah.

Masalah lain yang biasanya muncul ialah daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Padahal, hal ini sangat penting mengingat masyarakat sebagai partisipan dan pendorong ke arah suksesi program lembaga pendidikan. Keberadaannya sangat penting guna menunjang pembiayaan pendidikan. Sering dijumpai masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penganggaran, sehingga tingkat perhatian mereka terhadap lembaga berhenti pada ranah memasrahkan anak didiknya saja.¹²⁴

g. Kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan dan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis suatu problem yang sama di tiga pondok pesantren *salafiyah* yang diteliti, yaitu pengasuh atau pimpinan pondok pesantren tidak memahami perbedaan persentase

¹²⁴Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 235

muatan pembelajaran antara pendidikan kesetaraan dengan pendidikan diniyah formal/madrasah. Ketidakpahaman ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan dan penyelenggaran pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan mempunyai bobot 70% untuk kurikulum agama Islam sesuai ciri khas pesantren dan 30% untuk kurikulum mata pelajaran umum. Sedangkan pendidikan diniyah formal/madrasah mempunyai bobot muatan materi yang sebaliknya, yaitu 30% kurikulum agama Islam dan 70% kurikulum umum.

Penulis menimbang dimasukkannya kurikulum mata pelajaran umum tidak menjadi dominan pada kurikulum yang dijalankan pesantren, terlebih waktu pembelajaran boleh diajarkan secara fleksibel, dan hal ini tidak menghilangkan ciri khas pesantren.

Menurut Hoogerwerf, koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu. Koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi, karena masing-masing kesatuan memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan dari kesatuan-kesatuan lainnya.¹²⁵

Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

¹²⁵A. Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1978, h. 520

- 1) Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, para anggota dari pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan mengembangkan pandangan mereka masing-masing tentang bagaimana cara mencapai kepentingan pondok pesantren yang baik.
- 2) Perbedaan dalam orientasi waktu, pemangku kebijakan akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek.
- 3) Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi, menjalankan suatu kebijakan memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedangkan pelaksana kebijakan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lainnya.
- 4) Perbedaan dalam formalitas struktur. Kementerian Agama dan pondok pesantren mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan.¹²⁶

Kurangnya komunikasi antara pemangku kebijakan dalam hal ini Kementerian Agama dan pihak pondok pesantren menjadi faktor penghambat dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah* di kotawaringin Timur.

¹²⁶T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2003, h. 197

3. Solusi dari Problem Penerapan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan pada Mata Pelajaran Umum di Pondok Pesantren *Salafiyah* Se-Kotawaringin Timur

Dari tujuh problem yang ada, penulis memberikan beberapa rekomendasi dalam upaya penyelesaian problem penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pada mata pelajaran umum, solusi yang penulis berikan berdasarkan pemikiran penulis, berdasarkan temuan observasi dari pondok pesantren lain dan beberapa referensi yang relevan.

a. Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Menentukan tenaga pengajar yang cocok dan sesuai dengan kriteria pengasuh dan pondok pesantren memang tidak mudah, secara formalitas dalam perekrutan tenaga pendidik perlu diadakannya seleksi. Seleksi adalah proses memilih calon tenaga pendidik sesuai dengan kriteria atau job spesifikasi yang sudah ditentukan. Proses seleksi secara umum biasanya terdiri dari seleksi administrasi atau seleksi berkas, seleksi tulis, seleksi wawancara dan tes kesehatan. Tahapan seleksi yang dijelaskan oleh Hariwijaya harus dilakukan secara berurutan. Apabila dalam proses di salah satu tahapan tersebut gagal maka calon pendidik atau pelamar tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika di tahapan tahapan tersebut selalu lolos, maka bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya sampai tahapan akhir. Apabilah pelamar bisa lolos sampai tahapan akhir, maka pelamar dinyatakan

ditrima dalam lembaga tersebut.¹²⁷ Selain itu, apabila pengasuh tidak ingin mengambil proses seleksi permasalahan ini penulis mempunyai usulan solusi lain yang ditawarkan yaitu program pendidikan dan latihan guru

Menurut Sumarsono pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja.¹²⁸

Pelatihan menurut Dessler, adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam dunia kerja. Pegawai, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan. Karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.¹²⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan memang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pelatihan adalah penciptaan suatu lingkungan dimana pegawai dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk membantu menjalankan pekerjaan mereka. Dengan pengertian seperti diatas pelatihan sering disama artikan dengan pendidikan karena memiliki suatu konsep yang sama yaitu memberi bantuan pada pegawai untuk berkembang.

¹²⁷Hariwijaya, *Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan*, Yogyakarta: Elmatara, 2017, h. 2

¹²⁸Sumarsono, *Metode Riset Sumber daya manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 93

¹²⁹Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, h. 263

Beberapa hal yang menunjang kearah keberhasilan pelatihan menurut Rivai, yaitu antara lain:

- a) Materi yang Dibutuhkan, materi disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan dalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang dibutuhkan.
- b) Metode yang digunakan, metode yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.
- c) Kemampuan instruktur pelatihan, mencari sumber-sumber informasi yang lain yang mungkin berguna dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.
- d) Sarana atau prinsip-prinsip pembelajaran, pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif.
- e) Peserta pelatihan, sangat penting untuk memperhitungkan tipe pekerja dan jenis pekerja yang akan dilatih.
- f) Evaluasi pelatihan, setelah mengadakan pelatihan hendaknya di evaluasi hasil yang didapat dalam pelatihan, dengan memperhitungkan tingkat reaksi, tingkat belajar, tingkat tingkah laku kerja, tingkat organisasi dan nilai akhir.¹³⁰

Dengan diadakannya pendidikan dan latihan akan lebih menghemat pondok pesantren *salafiyah* untuk memberdayakan tenaga pengajar yang ada daripada merekrut tenaga pengajar baru khusus untuk mengajarkan mata pelajaran umum.

¹³⁰Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 240

b. Alokasi Waktu Belajar Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Merealisasikan mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* bukanlah suatu hal yang mudah, sedangkan alokasi waktu untuk mata pelajaran umum sangat sedikit. Dengan demikian dapat menjadi problem dalam pembelajaran kurikulum pendidikan umum. Maka dari itu pendidik harus pandai-pandai mencari solusi jalan keluarnya, jalan keluarnya sebagai berikut:

1) Menambah jam pelajar.

Alokasi waktu pembelajaran mata pelajaran umum yang diterapkan pondok pesantren di Kotawaringin Timur kurang dari ketentuan juknis penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* yang mewajibkan mata pelajaran umum mempunyai 2 jam pelajaran per mata pelajaran per minggu sedangkan materi yang disampaikan sangat banyak berdasarkan rumusan kurikulum yang ada. Oleh karena itu perlu penambahan waktu jam pelajaran. Penambahan jam pelajaran ini untuk mengimbangi padanya isi kurikulum. Adapun maksud dari penambahan jam pelajaran ini agar materi pembelajaran mata pelajaran umum yang disampaikan dapat terpenuhi seluruhnya, pendidik memiliki waktu yang cukup sehingga dapat menerangkan materi yang ada secara jelas dan gambaran sesuai yang direncanakan.

2) Menganjurkan belajar kelompok.

Kelompok belajar dibentuk oleh pendidik, antara santri yang dasar pengetahuan agamanya tinggi dengan yang kurang mampu dapat saling bertukar pikiran dan santri yang belum paham dapat bertanya pada temannya yang sudah paham sehingga pendidik tidak perlu lagi mengulang-ulang materi yang telah disampaikan.

3) Menyesuaikan tingkat materi pembelajaran dengan kemampuan anak didik serta dengan waktu yang terbatas tersebut

Penyesuaian tersebut harus dilakukan pendidik, sebab pemberian sesuatu bila sesuai dengan obyek pendidikannya, maka pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran umum akan mudah dicapai. Oleh karena itu, pengajar mata pelajaran umum dalam pembelajaran harus menyapaikan materi sesuai dengan kemampuan dan tingkat kecerdasan santri, sebab hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat, motivasi, respon dan keaktifan anak didik.

Menurut Djamarah dalam belajar terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar potensi belajar dapat tercapai dengan baik yaitu: 1) Belajar dengan teratur, 2) Disiplin, 3) Konsentrasi, 4) Pengaturan waktu.¹³¹ Berikut adalah petunjuk penyusunan waktu belajar yang baik menurut Djamarah yaitu:¹³²

1) Perhitungan waktu setiap hari untuk keperluan tidur, belajar, makan mandi, olah raga dan lain-lain.

¹³¹Saipul Bahri Djamarah, *Rahasia Sukses Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 15

¹³²*Ibid.*, h. 24

- 2) Menyelidiki dan menentukan waktu yang tersedia setiap hari.
- 3) Merencanakan penggunaan belajar dengan cara menetapkan jenis-jenis mata pelajaran dan urutan-urutan yang seharusnya dipelajari.
- 4) Menyelidiki waktu-waktu yang dapat dipergunakan untuk belajar dengan hasil terbaik. Sebaiknya pelajarilah mata pelajaran yang dianggap sulit diwaktu yang lain.
- 5) Berhematlah dengan waktu dan jangan ragu-ragu untuk memulai pekerjaan termasuk belajar.

Pembatasan waktu yang ketat memang dilakukan di pondok pesantren *salafiyah*, jika memang dirasa waktu pembelajaran kurang, bisa diadakan pembelajaran tambahan diluar waktu yang telah ditentukan, misalnya pada hari libur, tentu saja hal ini dengan seizin dan persetujuan pengasuh pondok pesantren.

c. **Substansi Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah***

Solusi yang dapat penulis sarankan mengenai substansi kurikulum adalah harus dilakukan penyusunan kurikulum khusus untuk mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah* secara terperinci. Penyusunan kurikulum sama halnya dengan pengembangan kurikulum yang sudah ada. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengaitkan satu komponen dalam hal ini kurikulum pendidikan kesetaraan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dengan komponen lainnya yaitu tradisi dan ciri khas pondok pesantren *salafiyah* untuk menghasilkan kurikulum yang

sesuai dengan budaya pondok pesantren sehingga bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran di pondok pesantren *salafiyah* dengan tetap memenuhi standar pendidikan nasional.¹³³

Dalam penyusunan kurikulum, penulis mengutip Ralp W. Tyler dalam buku S. Nasution yang mengajukan 4 pertanyaan pokok dalam penyusunan kurikulum terkait dengan komponennya sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Tujuan apa yang harus dicapai pondok pesantren?
- 2) Bagaimanakah memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu?
- 3) Bagaimanakah bahan disajikan agar efektif diajarkan?
- 4) Bagaimanakah efektivitas belajar dapat dinilai?

Berdasarkan empat pertanyaan tersebut maka akan diperoleh keempat komponen kurikulum yakni: 1) tujuan, 2) bahan pelajaran, 3) proses belajar-mengajar, 4) evaluasi atau penilaian. Keempat komponen tersebut harus saling berhubungan. Setiap komponen bertalian erat dengan ketiga komponen lainnya. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal yaitu pertama kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum.

d. Kedisiplinan Santri Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

¹³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung: Rosdakarya, 1997, h. 102

¹³⁴S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 18

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapati bahwa problem kedisiplinan santri ternyata tidak hanya disebabkan oleh santri itu sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh guru kelas dan lingkungan pondok pesantren. Guru perlu meningkatkan kedisiplinan bagi diri sendiri karena guru sebagai model dan panutan bagi santri. Oleh karena itu, dalam bertingkah laku hendaknya dijaga agar menjadi panutan yang baik bagi santri. Selain itu guru perlu meningkatkan pengetahuan tentang kedisiplinan dan aktif melakukan koordinasi dengan pengasuh/pimpinan pondok pesantren dalam membimbing kedisiplinan santri. Santri diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinan mereka serta mempunyai rasa sadar diri akan pentingnya disiplin di pondok pesantren. Pengasuh/pimpinan pondok pesantren perlu melakukan sidak atau peninjauan kembali tentang kedisiplinan baik bagi guru maupun santri agar guru bisa menjadi teladan bagi santri dan agar santri tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren.¹³⁵

Upaya peningkatan kedisiplinan dapat terlaksana dengan cukup baik dengan adanya sikap santri yang mau terbuka terhadap nasihat guru sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk diarahkan, selain itu kerjasama yang baik antar guru di pondok pesantren dan antara pondok pesantren dengan orang tua santri juga sangat mendukung terhadap keberhasilan pondok pesantren untuk membina santrinya. Adanya ketegasan dan keteladanan sikap guru dalam menjalankan tata tertib pondok pesantren

¹³⁵Mahasti Windha Wardhani, *Faktor-Faktor Penyebab ...*, h. 1885

akan sangat membantu siswa untuk mengembangkan pola perilaku yang baik dalam dirinya.

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Dari problem yang penulis temui ada satu pondok pesantren yang memiliki permasalahan terkait keterbatasan ruang kelas yaitu Pondok Pesantren Darul Aitam yang hanya memiliki 2 kelas untuk jenjang *wustha* yang seharusnya memiliki tiga tingkatan kelas. Dan di dua Pondok Pesantren lainnya yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman dan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin mempunyai keterbatasan dalam media penunjang pembelajaran dan juga keberadaan perpustakaan.

Menyelesaikan problem sarana dan prasarana perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan kegiatan menyediakan keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain merupakan upaya merealisasikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pengadaan perlengkapan harus didasari dengan kejujuran dan tanggung jawab didalam merealisasikan kegiatan tersebut. Sehingga pengadaan akan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah terlaksana.

Menurut Bafadal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembelian, pembelian merupakan suatu proses menukar uang dengan barang yang dibutuhkan dengan ketentuan yang telah berlaku.

- 2) Sumbangan, hal ini bersifat cuma-cuma karena mendapatkannya tidak dengan tukar menukar uang ataupun jasa.
- 3) Tukar menukar untuk memperoleh tambahan perlengkapan.
- 4) Meminjam, pengadaan sarana dan sarana pendidikan bisa dilakukan dengan meminjam kepada pihak-pihak tertentu.¹³⁶

f. Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Pembiayaan atau biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input biaya pendidikan itu juga identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah, (*public cost*) dan masyarakat dan orang tua peserta didik (*private cost*). *Public cost* adalah biaya pendidikan dari pemerintah, yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya (hibah) baik dalam dan luar negeri, sedangkan *private cost* adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada individu peserta didik dan masyarakat (seperti: biaya sekolah, pembelian buku dan peralatan sekolah lainnya).¹³⁷

Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* memiliki anggaran dana yang diperoleh dari bantuan operasional sekolah/pesantren yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setiap 3 atau 6 bulan sekali, namun dana tersebut tentu tidak mampu menutupi seluruh biaya operasional

¹³⁶Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan...*, h. 32

¹³⁷Arwildayanto, dkk, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2017, h. 50

sekolah belum lagi ditambah dengan biaya pembangunan. Dari tiga sekolah yang penulis teliti, Pondok Pesantren Darul Iman menyatakan pendanaan merupakan suatu problem dari penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pada mata pelajaran umum terlebih pondok pesantren ini menggratiskan biaya bulanan dan semester peserta didiknya.

Dalam problem ini penulis merekomendasikan solusi yang penulis analisis dari hasil observasi di dua pondok pesantren *salafiyah* lain yang penulis teliti, yaitu Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin dan Pondok Pesantren Darul Aitam.

1) Usaha milik pesantren

Pondok pesantren mempunyai puluhan, ratusan, hingga ribuan santri tentunya memiliki perputaran uang yang banyak di lingkungan pondoknya, hal ini dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren Darul Aitam dengan mendirikan kios yang dikelola oleh yayasan. Kios ini berada tepat didepan pondok pesantren sekitar 20 meter dari gerbang pondok pesantren. Karena posisi kios berada sedikit diluar lingkungan pondok sehingga banyak juga dari masyarakat yang berbelanja di kios tersebut.

2) Usaha milik tenaga pendidik

Potensi perputaran uang yang banyak juga dimanfaatkan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin dengan mengizinkan para tenaga pengajarnya membuka warung/kantin milik perseorangan disekitar lingkungan pondok pesantren. Meski tenaga pendidik dibayar dengan gaji yang tidak terlalu besar, namun dengan usaha sampingan yang

dimiliki sangat membantu untuk mencukupi ekonomi tenaga pengajar di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin.

3) Donatur

Orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya.¹³⁸ Menyatakan diri untuk menerima santri secara gratis serta menanggung biaya tempat tinggal, makan dan sebagainya dengan rata-rata biaya bulanan sekitar 56 juta rupiah membuat pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam mengajak donator untuk memberikan donasi secara tetap.

Selain solusi yang dituliskan penulis di atas, Ahmad Munir memberikan solusi pembiayaan yang lebih detail sebagai berikut:¹³⁹

1) Persoalan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya.

Hal ini karena bisa membawa kemajuan lembaga jika dikelola dengan baik, sebaliknya akan membawa lembaga menjadi terpuruk, oleh karena itu pihak pondok pesantren harus mengelola pembiayaan secara professional dan berprinsip pada keterbukaan, berorientasi pada perbaikan dan kepetingan untuk membangun pondok pesantren.

2) Terkait dengan penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Apabila

¹³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/donatur> diakses pada 27 September 2020

¹³⁹Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 236

komponen di dalamnya ada yang kurang mengerti, perlu dilakukan diklat tentang bagaimana menyusun anggaran yang baik. Bisa dengan pelatihan penyusunan anggaran atau hal lain yang sejenis.

- 3) Kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian.
- 4) Pondok pesantren hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikian dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan.
- 5) Lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren, sebagai lembaga yang berbasiskan agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen lembaga.

Agar pembiayaan bisa terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan *output* yang akan dicapai, perlu adanya rancangan pembiayaan. Menurut Wodhall dalam jurnal Subkhan, Ada beberapa cara dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya pendidikan yang terkait dengan

hubungan antara input dan *output* dalam pendidikan pembiayaan pendidikan antara lain¹⁴⁰:

1) *Money cost and opportunity cost*

Input dari pendidikan dapat diukur dalam bentuk uang, dan dapat juga diukur dari seluruh dari sumber daya riil yang digunakan dalam proses pendidikan (waktu guru/dosen, waktu murid, waktu staf, buku, material, peralatan, gedung). Meskipun tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, tetapi sumber daya ini memiliki nilai karena dapat digunakan dibidang lainnya, sehingga dinamakan "*opportunity costs*".

Konsep *opportunity costs* lebih luas daripada konsep *money costs/expenditure*, karena tidak hanya mencakup uang saja, tapi pada sumber daya riil yang direpresentasikan dengan pengeluaran uang walaupun tidak dibeli/dijual. Contoh seperti:

- a) Nilai waktu guru/dosen yang dapat disamakan dengan sejumlah gaji
- b) Waktu siswa masuk sekolah yang dapat disamakan apabila dia mendapatkan pekerjaan
- c) Sukarelawan yang tidak dibayar tapi memiliki alternatif penggunaan yang lain, sehingga memiliki *economic value* dan *opportunity costs*
- d) Nilai tanah atau bahan mentah hasil hibah

Opportunity costs dari pendidikan dapat diukur sebagai biaya kepada individu (*private costs*) seperti biaya pendidikan, buku, dan

¹⁴⁰Subkhan, *Peranan Kyai Dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Pondok Pesantren Asma' Chusna Kranji Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*, Journal of Economic Education, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012, ISSN 2301-7341, h. 79-80

peralatan dan biaya kepada masyarakat (*social cost*) seperti biaya gaji guru dan staf, buku, peralatan, bahan mentah, gedung.

2) *Capital and recurrent cost*,

Biaya operasional (*recurrent cost*) meliputi semua pengeluaran pada barang-barang konsumtif seperti buku, ATK, bahan bakar, dan jasa lainnya yang dapat membawa benefit dalam jangka menengah atau pendek. *Capital costs* meliputi pembelian *durable assets* seperti gedung atau perlengkapan yang diharapkan memberikan keuntungan untuk jangka panjang.

Baik *current* maupun *capital cost* dapat diukur secara *actual* atau *current prices* atau dalam tingkat harga yang konstan/*constant purchasing power*. Analisis biaya ini sebagai "*elemental costs analysis*" sukses diaplikasikan pada pendidikan yang menghasilkan pengurangan biaya, karena membandingkan bangunan-bangunan yang menggunakan material yang berbeda, teknik pembangunan berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pembangunan gedung baru.

3) *Average and marginal cost*,

Analisis biaya berkaitan dengan total biaya pendidikan atau dengan unit *costs* (biaya permurid). Ada dua cara untuk menghitung unit *costs*:

- a) Biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/ suatu level.

- b) Biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan

Untuk menunjukkan hubungan antara biaya-biaya dengan output atau skala operasional suatu usaha dan melihat keterkaitannya dengan biaya total (TC), biaya rata-rata (AC) dan biaya marjinal (MC) adalah dengan memperhatikan fungsi biaya. Perhitungan tiap-tiap Fungsi biaya dilakukan sebagai berikut:

Biaya total (TC) pertahun adalah biaya tetap (FC) ditambah biaya variable (VC, tergantung jumlah murid). Sedangkan biaya rata-rata (AC) adalah (TC) dibagi dengan jumlah output. Maka (AC) akan rendah bila jumlah siswa tinggi. Biaya marjinal (MC) adalah tambahan biaya yang terjadi karena ada penambahan unit costs per murid yang mendaftar.

4) Biaya Privat vs Biaya Sosial Pendidikan

Perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial ditentukan oleh besarnya subsidi pemerintah terhadap pendidikan, seperti di beberapa negara dimana pendidikan dasar dan menengah diberikan gratis, sehingga biaya personal hanya terbatas untuk membeli buku, seragam, dan transport. Kalau jenis pendidikan tersebut bersifat wajib, maka tidak ada *private opportunity cost* dalam bentuk pendapatan yang hilang karena melanjutkan pendidikan, paling hanya dari biaya pajak yang dikenakan pemerintah secara *implicit*.

5) *Joint Costs* Pendidikan

Konsep ini muncul untuk menilai implikasi dari berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidikan (seperti *cognitive* dan *noncognitive outputs*) atau oleh pendidikan tinggi (*teaching* dan *research*). Karena sulit diukur *single unit cost* untuk *single output/product*. Contoh: beberapa input menghasilkan dua atau lebih output, seperti misalnya bangunan-bangunan sekolah, administrasi pusat, perpustakaan-perpustakaan, dan lain-lain.

6) Pendekatan Kecukupan (*Adequacy Approach*)

Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan.

Oleh karenanya, berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Analisis kecukupan biaya pendidikan ini telah digunakan di beberapa negara bagian Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana pendidikan. Berbagai studi di Indonesia telah pula mencoba memperhitungkan biaya pendidikan berdasarkan standar kecukupan.

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a) Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
- b) Jumlah siswa
- c) Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai *highly labour intensive*)
- d) Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
- e) Kualifikasi guru
- f) Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
- g) Perubahan dari pendapatan (*revenue theory of cost*).

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan di pondok pesantren tidak hanya bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah saja atau sering dikenal dengan dana BOS, tapi juga perlu pembiayaan dari personal santri, atau dari masyarakat. Penetapan besaran biaya pendidikan bisa ditentukan dengan menganalisis biaya pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan bisa menyesuaikan dengan *output* yang diharapkan pondok pesantren.

g. Kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan dan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren *Salafiyah*

Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* memberikan dampak yang besar terhadap derajat lulusan pondok pesantren, sehingga dalam penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren

salafiyah terutama pada mata pelajaran umum yang menjadi substansi dari mata pelajaran yang diujikan pada ujian akhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan berkelanjutan oleh pemerintah terutama Kementerian Agama yang menaungi pendidikan pondok pesantren.

Dalam menunjang penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* penulis merekomendasikan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menyatakan bahwa ada empat variabel penting dalam implementasi suatu kebijakan publik antara lain:

1) Komunikasi (*communications*)

Komunikasi diartikan sebagai “Proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Dengan demikian informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumber Daya (*resources*)

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai

sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

3) Disposisi atau sikap (*dispositions atau attitudes*)

Disposisi atau sikap diartikan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Sehingga jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Jadi meskipun sumber-sumber untuk menerapkan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya.

Kesimpulanya bahwa penerapan kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.¹⁴¹

Ketika empat variabel ini dipenuhi dengan baik maka akan tercipta koordinasi yang baik pula bagi pemangku kebijakan dalam hal ini Kementerian Agama dan pelaksana kebijakan yakni pondok pesantren dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pondok pesantren *salafiyah*.



¹⁴¹Rahayu kusuma dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, h. 168

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin menerapkan kurikulum mata pelajaran umum dengan enam mata pelajaran umum yaitu, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diajarkan 1 kali pertemuan pada setiap kelas. Enam mata pelajaran tersebut diajarkan secara bergantian dalam setiap minggunya. Kurikulum yang digunakan yaitu KTSP untuk kelas 9 dan K13 untuk kelas 7 dan 8. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, resitasi dan penugasan. Sedangkan evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala dengan diberikan soal-soal latihan dan ulangan yang dilakukan secara serentak di akhir semester. Ada beberapa problem yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren *Salafiyah* Sabilal Muhtadin. Problem-problem tersebut antara lain: a) media pembelajaran, b) santri yang kurang disiplin, dan c) buku-buku bahan bacaan. Solusi yang dilakukan mengenai problem tersebut antara lain: a) membuat alternatif media pembelajaran yang lebih sederhana, b) mendisiplinkan santri, dan c) memberikan materi tambahan untuk dipelajari santri secara mandiri di asrama.
2. Pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman menerapkan kurikulum mata pelajaran umum dengan dua muatan mata pelajaran umum yaitu matematika

dan Bahasa Inggris, diajarkan setiap hari Sabtu sebanyak 1 kali pertemuan pada setiap kelas. Kurikulum yang digunakan bervariasi dari kurikulum CBSA sampai K13, metode pembelajaran yang digunakan yaitu hafalan, ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sedangkan evaluasi yang dilakukan setiap minggu dengan setoran hafalan dan diberikan beberapa soal-soal latihan. Ada beberapa problem yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Iman. Problem-problem tersebut antara lain: a) kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten, b) alokasi waktu belajar, c) tidak adanya kurikulum kesetaraan khusus untuk pondok pesantren *salafiyah*, d) sarana prasarana penunjang dan e) pembiayaan. Solusi yang dilakukan mengenai problem tersebut antara lain: a) mencari tenaga pendidik dari sekolah disekitar lingkungan pondok pesantren, b) mengefektifkan pertemuan dengan pembagian waktu dalam satu kali pertemuan, c) mencari kurikulum yang sesuai dengan materi yang diajarkan, d) mengarahkan peserta didik untuk mengeksplora melalui website ketika HP dibagikan, dan e) pembiayaan dari pihak yayasan.

3. Pondok pesantren Darul Aitam tidak menerapkan kurikulum mata pelajaran umum, namun di pondok pesantren Darul Aitam menyediakan perpustakaan untuk para santri bisa belajar mata pelajaran umum secara mandiri. Sedangkan untuk menghadapi ujian kesetaraan, tenaga pendidik pondok pesantren Darul Aitam memberikan kisi-kisi ujian dan membimbing santri untuk mempelajari kisi-kisi tersebut agar santri siap menghadapi ujian. Terdapat beberapa problem yang menghambat penerapan kurikulum mata pelajaran umum di pondok

pesantren *salafiyah* Darul Aitam. Problem-problem tersebut antara lain: a) keterbatasan sarana prasarana, b) tidak adanya tenaga pendidik mata pelajaran umum yang sesuai dengan kualifikasi pengasuh, dan c) kurangnya komunikasi antara pihak pondok pesantren dan Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin Timur terkait juknis pendidikan kesetaraan pondok pesantren *salafiyah*. Dari tiga masalah di atas belum ada solusi yang dilakukan pihak pondok pesantren dalam penerapan kurikulum mata pelajaran umum.

B. Saran

Pada tesis ini, penulis memiliki saran-saran bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren

Pengasuh/pimpinan pondok pesantren harus mampu memperdayakan semua anggota pondok pesantren khususnya guru dan tenaga kependidikan agar dapat maksimal menjalankan tugasnya masing-masing, serta menjalin koordinasi yang baik dengan Kementerian Agama setempat. Sehingga pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* di Kotawaringin Timur bisa berjalan dengan maksimal.

2. Bagi guru/tenaga pendidik

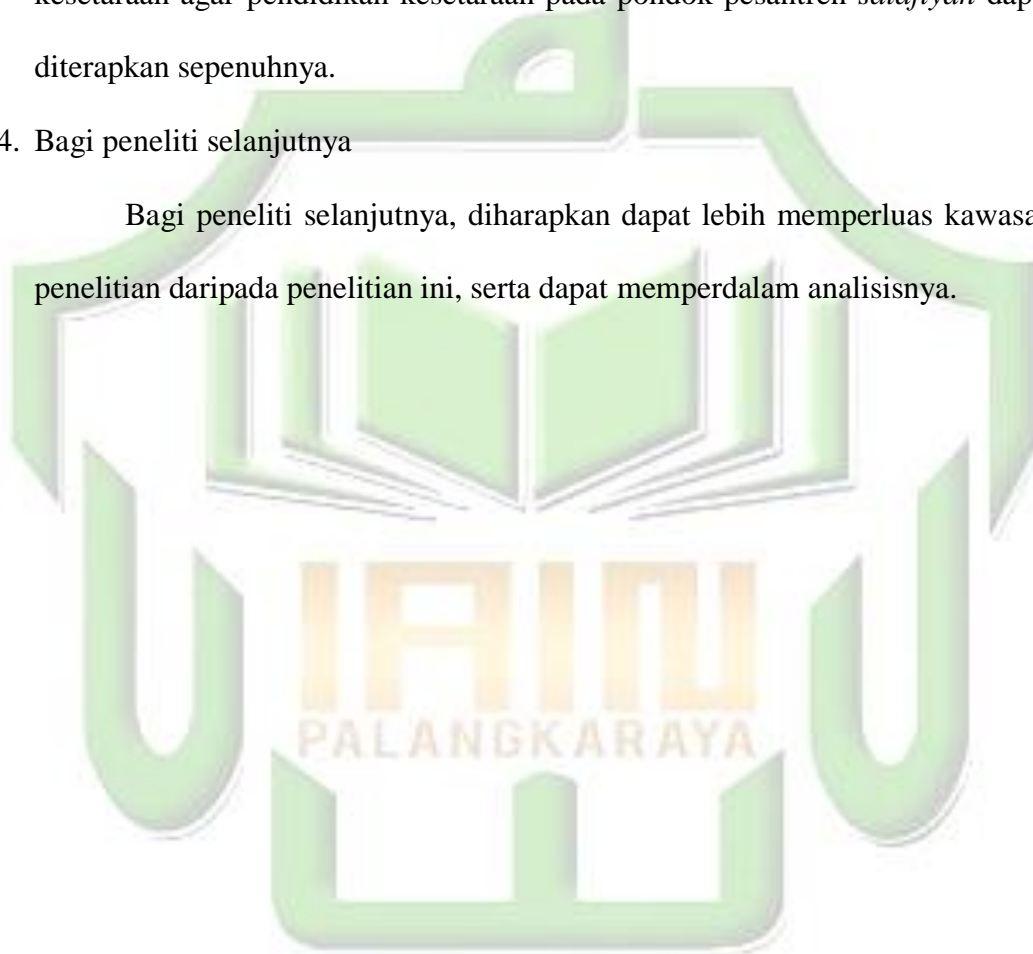
Guru sebagai pelaksana kurikulum mata pelajaran umum dan memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembelajaran. Guru mata pelajaran umum harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas diri dan selalu *update* terhadap metode maupun media pembelajaran agar penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di pondok pesantren *salafiyah* dapat berjalan maksimal.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pemangku kebijakan harus mengkaji ulang sebelum menerapkan sebuah kebijakan, agar problem yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir, serta melakukan pendampingan dan menjalin koordinasi yang baik dengan pondok pesantren yang berstatus kesetaraan agar pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren *salafiyah* dapat diterapkan sepenuhnya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperluas kawasan penelitian daripada penelitian ini, serta dapat memperdalam analisisnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abawihda, Ridwan. “*Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Thoumy. *Filsafat Pendidikan Islam*. terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- Amin, M. Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Arifin, Zainal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Arwildayanto. dkk. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*. Yogyakarta: Power Books. 2009.
- Atmaja, Bagus Tris. *Rekonstruksi Pendidikan Pesantren dengan Membangun Budaya Ilmiah dan Islamisasi Sains. Pesantren dan Peradaban Islam*. Amien Haedari (Ed.), Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Aunurrahman. *Belajar Dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Bafadal, Ibrahim. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Basri, Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Beauchamp, George A. *Curriculum Theory*. Wilmette, Illinois: The KAGG Press. 1975.
- Daulay, Haidar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.
- Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Dirjen Bimarga Islam. 2003.

- Depdiknas. *Acuan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2006.
- _____. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gamedia Pustaka Umum. 2003.
- Dessler, Gary. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.
- Dewi, Rahayu Kusuma. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S. 1983.
- Djamarah, Saipul Bahri. *Rahasia Sukses Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Fadillah. *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Freire, Paulo. *Pedagogi of the Oppressed*. New York: The Continuum Publishing Company. 1993.
- Gunawan, Ary H. *Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Hamruni. *Strategi dan model-model Pembelajaran aktif menyenangkan*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE. 2003.
- Hariwijaya. *Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan*. Yogyakarta: Elmatara. 2017.
- Hasbullah. *Dasar –Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999.
- _____. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan, Konsep Perinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Educa. 2010.
- Hoogerwerf, A. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1978.

- MacDonald, James B. *Educational Models for Instruction*. Washington DC: The Association for Supervision and Curriculum Development. 1965.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta : INIS. 1994.
- Masyhud, Sulthon dan Moh. Khusnurdilo. *Manajemen Pondok Pesantren*. ed. Mundzier Suparta. Jakarta: Diva Pustaka. 2005.
- May, M.A. *The Foundation of Personality Psikology of Work*. P.S. Archillen: Mc Craw-Hill, Book Company. 1983.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muchith, Saekan. Dkk. *Cooperative Learning*. Semarang: Rasail Media Group. 2010.
- Muhaimin. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Nuansa Press. 2010.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- _____. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rodakarya. 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Bahasa Arab-indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif. 1997.
- Musfah, Jejen. *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Naim, Ngainun. *Menjadi Guru Inspiratif (Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- _____. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner (Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum)*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

- _____. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2001.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- _____. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rohani, Ahmad dan Abu Ahmad. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Sanaky, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta 2013
- Sudarsono. *Kamus Filsafat dan Psikologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya. 1997.
- Sulthon, Masyhud dan Moh. Khusnuridlo. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2006.
- Sumarsono. *Metode Riset Sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Sutrisno. *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV. Diandra Primamita Media. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tedjasudhana, Lilian D. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. 1990.
- UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education. *Achieving EFA Through Equivalency Programmes in Asia-Pacific*. Bangkok: Mom Luang Pin Malakul Centenary Building. 2010.

Usman, Uzar. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.

Yasmadi. *Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

JURNAL DAN TESIS

Hidayat, Ara dan Eko Wahib. dengan judul “*Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan*”, *Jurnal Pendidikan Islam*: Volume III, Nomor 1, Juni 2014.

Khair, Moh. Afiful. “*Manajemen Pembaharuan Pesantren di Tengah Tantangan Kehidupan Masyarakat Global*”. *Jurnal Fikrotuna*. Vol. 4, No. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Desember, 2016.

Muhtifah, Lailial. *Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren*. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*. Vol. XVII No. 2 2012/1433. DOI Link: [10.15575/jpi.v27i2.507](https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507)

Munir, Ahmad. *Manajemen Pembiayaan dalam Perspektif Islam*. *Jurnal At-Ta’dib* Vol. 8 No. 2. 2013.

Mushollin. “*Kurikulum Pondok Pesantren Muadalah*”. *Jurnal Nuansa*. Vol. 11 No. 1 Januari – Juni 2014.

Nunu, Ahmad. *Pembiayaan Pendidikan di Madrasah dan Peranan Pemerintah Daerah di Era Otonomi*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. Vol. 5 No. 2 April-Juni 2007.

Subkhan, *Peranan Kyai Dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Pondok Pesantren Asma’ Chusna Kranji Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*. *Journal of Economic Education*. Vol. 1 No. 1, Agustus 2012. ISSN 2301-7341.

Suroso. “*Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah Surabaya*”, *Adabiyah Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1, Desember 2017, h. 73 – 106. DOI Link: <https://doi.org/10.21070/ja.v2i1.1237>

Umam, Khairul dan Imron Fauzi. “*Implementasi Program Mu’adalah Di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember*”. *Penelitian DIPA tahun 2017*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember. 2017. t.d.

Wardhani, Mahasti Windha. *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Siswa Sdn Kepek Pengasih Kulon Progo Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 19 Tahun ke-7. 2018.



TESIS

Afifah, Binti Nur. *“Implementasi Sistem Pendidikan Mu’adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumber Sari Kencong Kepung Kediri”*. Tesis Magister. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. 2017. t.d.

Budiarto, Sherly. *“Desain dan Implementasi Kurikulum Mu’adalah Pada Kulliyatul Mu’allimat Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan Pondok Modern Tazakka (Analisis Integrasi Kurikulum)”*. Tesis Magister. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2020. t.d.

Hasanah, Siti Mau’izatul *“Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Barito Kuala”*. Tesis Magister. Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin. 2012, t.d.

Munif, Ali. *“Manajemen Mutu Program Pendidikan Kesetaraan Di Ma’had Al-Faruq Karanglewas Kabupaten Banyumas”*. Tesis Magister. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019. t.d.

Muthoharoh. *“Problem Dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Mi Kota Semarang (Studi Kasus Di Mi Darul Ulum Wates Ngaliyan Dan Min Sumurrejo, Gunungpati)”*. Tesis Magister. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2017. t.d.

Shodiq, Abdulloh. *“Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)”*. Tesis Magister. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018. t.d.

DOKUMEN DAN SURAT

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1772 Tahun 2018

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 Tahun 2018

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6963 Tahun 2017

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/donatur> diakses pada 27 September 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/problem> Diakses pada 27 Juli 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/penerapan> Diakses pada 27 Juli 2020

